

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU
TAHUN 1926 – 1947**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Paulina Nola

NIM : 021314006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PERANAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU
TAHUN 1926 – 1947**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh :

Paulina Nola

NIM : 021314006

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2007

SKRIPSI

**PERANAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU
TAHUN 1926 - 1947**

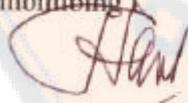
Oleh :

Paulina Nola

NIM : 021314006

telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Drs. A.K. Wiharyanto M.M

Tanggal : 28 Februari 2007

Pembimbing II



Drs. B. Musidi. M.Pd

Tanggal : 28 Februari 2007

SKRIPSI

**PERANAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU
TAHUN 1926 - 1947**

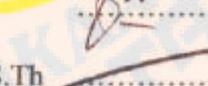
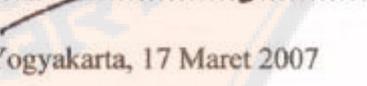
Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Paulina Nola

NIM : 021314006

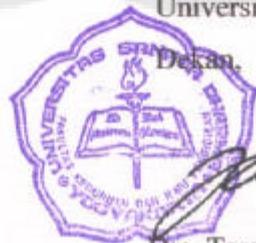
telah dipertahankan di depan panitia penguji
pada tanggal, 17 Maret 2007
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan panitia penguji

	Nama Lengkap	Tanda Tangan
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th	
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M	
Anggota	: Drs. B. Musidi, M.Pd	
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th	

Yogyakarta, 17 Maret 2007

Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma



Dekan,

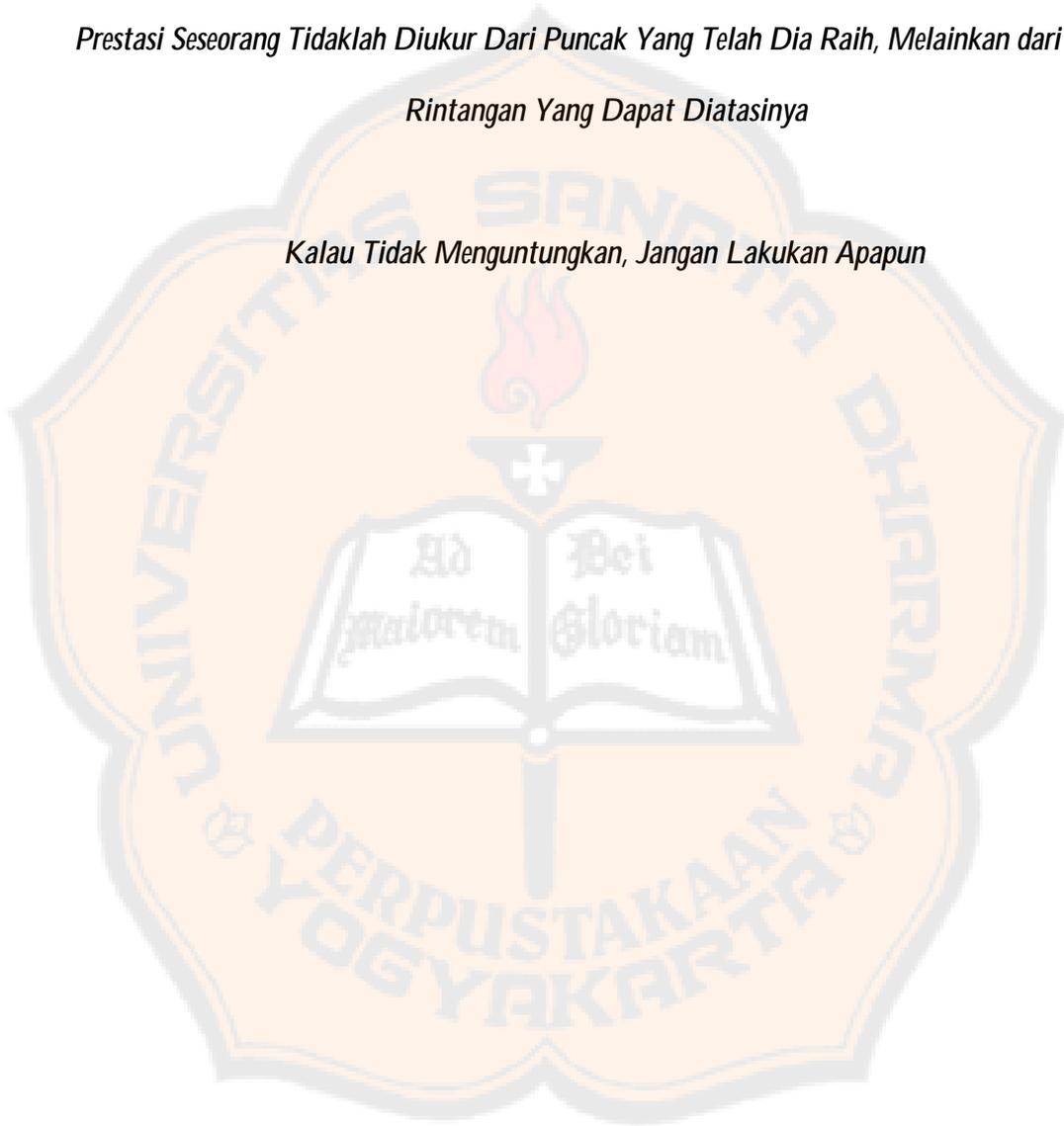
Drs. Tarsisius Sarkim, M.Ed, Ph.D.

MOTTO

Prestasi Seseorang Tidaklah Diukur Dari Puncak Yang Telah Dia Raih, Melainkan dari setiap

Rintangan Yang Dapat Diatasinya

Kalau Tidak Menguntungkan, Jangan Lakukan Apapun



PERSEMBAHAN

Skripsi Ini ku Persembahkan Untuk :

*Tuhan Yesus Kristus Yang Selalu Membimbing Dan Memberkati Aku Dalam Segala Hal
Papa (L. Sakiman) dan Mama (Martha), Abang (Yakobus H. S), Kakak Ipar Ku (Linna),
Adik Ku Tersayang (Michael H. S & Agustinus H. S), Keponakan Ku (Bera Lindanus) Serta
keluarga Ku Yang Lainnya Yang Telah Memberikan Dukungan Baik Secara Material Maupun*

Spiritual Sehingga Skripsi Ku bisa Terselesaikan

Seseorang Paling Aku Cintai Yang Nantinya Akan Menjadi Pendamping

Hidup Ku

Para Pendidik Dan Sahabat – sahabat Ku Di Pendidikan Sejarah

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebut dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 17 Maret 2007

Penulis


Paulina Nola

ABSTRAK

**PERANAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU
TAHUN 1926-1947**

Oleh: Paulina Nola
NIM : 021314006

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis : 1) biografi Hasyim Asy'ari; 2) latar belakang dan berdirinya NU; 3) sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

Metode penelitian ini adalah metode sejarah, dan pendekatannya adalah pendekatan sosial dan budaya. Skripsi ini ditulis secara deskriptif analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasyim Asy'ari adalah tokoh ulama tradisional yang berpendidikan pesantren di Surabaya, Semarang, Madura dan Mekkah, serta pendiri Pesantren Tebuireng.

NU didirikan untuk mempertahankan paham ahlussunnah wal jamaah, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi, dan praktek tarekat.

Sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947 tampak dari usahanya untuk mempertahankan organisasi NU, antara lain : dengan membuat aturan-aturan dasar organisasi yaitu Qanun al-asasi al-Nahdlatul Ulama sebagai dasar ideologi NU, mendirikan institusi pendidikan pada masa pendudukan Jepang, dan ikut serta mempersiapkan lahirnya Indonesia merdeka baik secara fisik maupun nonfisik.

ABSTRACT

**THE ROLE OF HASYIM ASY'ARI IN NU ORGANIZATION
BETWEEN 1926 – 1947**

By: Paulina Nola
NIM: 021314006

The purpose of this research were to describe and analyse: 1) the biography of Hasyim Asy'ari; 2) the background and the emergence of NU; 3) the contribution of Hasyim Asy'ari in NU organization between 1926 – 1947.

The method of this research were the history method, and the approach of this research were social and cultural approach. This thesis was written in analitical descriptive.

The result of this research showed that Hasyim Asy'ari was a traditional Moslem figure who studied in the school of koranic studies in Surabaya, Semarang, Madura and Makkah, and also the founder of Tebuireng school of koranic studies.

NU were established to defend ahlusunnah wal jamaahism, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'I, Syafi'i, and the tarekat application.

The contribution of Hasyim Asy'ari in NU organization between 1926-1947 was the effort to defend NU organization, such as : arranging the basic rules of the organization, that was Qanun al-asasi al-Nahdlatul Ulama as the basic ideology of NU, establishing educational institution during Japanes occupation and participating in preparing Indonesian independent physically and non physically.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya yang telah memberikan anugrah dan kasihnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERANAN HASYIM ASY’ARI DALAM ORGANISASI NU TAHUN 1926 – 1947”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Universitas Sanata Dharma.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak memperoleh bimbingan, dukungan, bantuan dan perhatian dari semua pihak. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar – besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
4. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto. M.M selaku pembimbing I yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis hingga selesai.
5. Drs. B. Musidi. M.Pd. selaku pembimbing II yang penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis hingga selesai.
6. Perpustakaan Sanata Dharma Yogyakarta yang telah memberikan banyak sumber dalam penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

7. Semua teman – teman seperjuangan dalam menimba ilmu di Pendidikan Sejarah khususnya angkatan 2002 Yang telah memberikan perhatian, semangat dan persahabatan selama studi dan menyusun skripsi.

8. Untuk orang yang nanti menemani aku seumur hidup, yang telah sabar menemani dan memberikan semangat, maupun dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis dengan senang hati bersedia menerima sumbangan pemikiran saran maupun kritik untuk menyempurnakan tulisan ini.

Penulis

Paulina Nola
Paulina Nola

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penulisan.....	8
D. Manfaat Penulisan.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Hipotesis.....	29
H. Metode Penelitian Dan Pendekatan.....	29
I. Sistematika Penulisan.....	32
BAB II HASYIM ASY'ARI	34
A. Latar Belakang Keluarga.....	34
B. Latar Belakang Pendidikan.....	37
C. Riwayat Hasyim Asy'ari.....	40
BAB III LATAR BELAKANG DAN BERDIRINYA NU	44
A. Kondisi Islam Sebelum Tahun 1926.....	44
B. Pertentangan Antara Kaum Tradisionalis Dan Modernis.....	48
C. Proses Berdirinya NU.....	52

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

D. Perkembangan Organisasi NU Pada Masa Hasyim Asy'ari.....	57
BAB IV SUMBANGAN HASYIM ASY'ARI DALAM ORGANISASI NU	
TAHUN 1926-1947	70
A. Masa Kolonial Belanda (1926-1942).....	70
B. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).....	83
C. Setelah Kemerdekaan Indonesia (1945-1947).....	95
BAB V PENUTUP	102
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	
Lampiran 1 : Foto diri K. H. M. Hasyim Asy'ari	108
Lampiran 2 : Lambang Organisasi Nahdlatul Ulama	109
Lampiran 3 : Para pendiri Nahdlatul Ulama.....	110
Lampiran 4 : Islam Bersosialisasi dengan Budaya Lokal Secara Damai	112
Lampiran 5 : Bedug : Akulturasi Budaya Islam dan Lokal.....	114
Lampiran 6 : Muhammadiyah Dan Dakwah Kultural.....	116
SILABUS	121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Peranan dan kedudukan ulama, senantiasa tidak bisa dipisahkan dalam membicarakan tentang keberadaan Nahdlatul Ulama. Sebab, sejak kelahiran NU hingga dewasa ini, peranan ulama masih sangat dominan di dalam mewarnai perjalanan Nahdlatul Ulama. Di sisi lain, ulama dan kiai juga tidak bisa dipisahkan dengan pondok pesantren. Terkait hal itu, maka dari sinilah proses itu berlangsung, sehingga mereka yang semula sebagai santri kemudian beralih menjadi kiai untuk mengajarkan ilmunya kepada santri-santri baru.

Haldratus Syeh K. H. Hasyim Asy'ari, salah satu ulama terkemuka di tanah air yang berhasil mengembangkan ilmu agama Islam melalui pondok pesantren dan juga merupakan seorang ulama yang penuh karisma. Pada tahun 1899 K. H. Hasyim Asy'ari mendirikan sebuah pondok pesantren di Tebuireng Jombang. Dalam perkembangannya, sejak didirikan tahun 1899 hingga tahun 1943 (menurut catatan pemerintah Jepang) pondok pesantren Tebuireng yang legendaris ini telah berhasil mencetak 25.000 orang kiai. Berdasarkan kenyataan ini, dapat diketahui betapa besar pengaruh pesantren Tebuireng dalam pengembangan Islam di awal abad XX.¹

K. H. Hasyim Asy'ari lahir dari keluarga elit kiai Jawa pada tanggal 24 Dzul Qa'dah 1287 / 14 Februari 1871 di desa Gedang. K.H. Hasyim Asy'ari

¹ Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah. Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 25.

menyerap lingkungan agama dari lingkungan pesantren keluarganya sehingga ia mendapatkan ilmu pengetahuan agama Islam. K. H. Hasyim Asy'ari adalah tokoh dari pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama yang patut untuk diteladani siapapun, baik warga Nahdlatul Ulama maupun umat Islam dan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Selain sebagai tokoh Nahdlatul Ulama, K. H. Hasyim Asy'ari juga sekaligus sebagai tokoh yang sangat gigih memperjuangkan Islam dan kebangsaan dari sejak muda sampai akhir hayat dengan ikhlas tanpa keingingan balas jasa.²

K. H. Hasyim Asy'ari mendorong kaum Muslim mengikuti salah satu empat mazhab : Maliki, Hambali, Syafi'i, Hanafi yang memiliki tuntunan yang paling benar. Mazhab adalah golongan sepemikir yang sepaham dalam teori-teori dan ajaran-ajaran tertentu, dan yang berusaha untuk memajukan teori dan ajaran itu.³ Dalam bidang politik, K. H. Hasyim Asy'ari mengajak kaum Muslim memperkuat persaudaraan Islam. Walaupun K. H. Hasyim Asy'ari menghabiskan sebagian besar waktunya mengajar di pesantren, beliau memainkan peran politik yang penting khususnya sebagai pemimpin gabungan organisasi Islam pada masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang dan Indonesia merdeka, serta pendukung utama kemerdekaan Indonesia pada akhir 1940-an. Utamanya, K. H. Hasyim Asy'ari dipandang sebagai pemimpin utama Muslim tradisional sejak 1920-an sampai 1940-an, tetapi juga disegani kalangan Muslim modernis walaupun ketika itu hubungan antar mereka kurang mengena. Karena itu, K. H. Hasyim

² Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. vii.

³ Ariyono Suyono, *Kamus Antropologi*, Akademika Pressindo : Jakarta, 1985, hal. 249.

Asy'ari dapat dikatakan sebagai pemimpin spiritual bagi banyak ulama, tentara, dan politikus.⁴

K. H. Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama (1926-1947) membawakan ketinggian derajat kompetensi ilmu keagamaan yang sangat tinggi ke dalam tubuh Nahdlatul Ulama, yang masih menjadi standar rujukan kepemimpinan tertinggi Nahdlatul Ulama sampai saat ini.⁵ Ada 4 faktor yang melatarbelakangi watak kepemimpinan Kiai Hasyim Asy'ari, antara lain :

1. Ia lahir di tengah meningkatnya *Islamic Revivalisme* baik di Indonesia maupun di seluruh dunia Islam yang berpusat di Timur Tengah, khususnya di Mekkah.
2. Orang tua dan kakeknya adalah pemimpin-pemimpin pesantren yang berpengaruh di desa-desa di Jombang, Jawa Timur.
3. Ia sendiri dilahirkan sebagai seorang yang amat cerdas dan memiliki bakat kepemimpinan.
4. Berkembangnya perasaan anti kolonial, nasionalisme Arab dan Pan-Islamisme di dunia Islam.⁶

K. H. Hasyim Asy'ari belajar di Mekkah di saat Syaikh Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Buah pikiran Muhammad Abduh sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Adapun ide-ide reformasi Muhammad Abduh antara lain : mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam, reformasi

⁴ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangsaan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. v.

⁵ Abdurrahman Wahid, dkk, *op.cit.*, hal. vii.

⁶ *Ibid.*, hal. 2.

pendidikan Islam di tingkat Universitas, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern, dimaksudkan agar Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan. Dengan alasan inilah Muhammad Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterkaitan mereka kepada pola pikiran para madzhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tersebut.

Sebenarnya Kiai Hasyim Asy'ari juga menerima ide-ide Muhammad Abduh untuk kembali membakar semangat Islam, tetapi ia menolak pikiran Muhammad Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatannya dengan para Mazhab. Kiai Hasyim Asy'ari tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan pada masa itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam hal mazhab, tidak mungkin untuk memahami maksud dari ajaran-ajaran Qur'an dan Hadits tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang bergabung dalam sistem mazhab, karena hal ini hanya akan menghasilkan pemutar-balikan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.⁷

Pada awal abad ke-20, perlawanan kaum muslim santri melawan rezim kolonial Belanda telah berakhir. Peperangan ini mengakibatkan kekayaan pemerintah Belanda terkuras sehingga mereka melaksanakan sistem paksa (*cultuurstelsel*) untuk menanggulangi kerugian. Akibat dari sistem paksa ini menumbuhkan kesadaran sebagian birokrat Belanda atas "utang budi" mereka terhadap Bumi Pertiwi. Karena itu pemerintah kolonial menerapkan "politik etis"

⁷ *Ibid.*, hal. 6-9.

yang antara lain menyediakan pendidikan Belanda kepada penduduk Pribumi. Tetapi akses ke sekolah ini hanyalah untuk anak-anak pegawai tinggi (priyayi), sementara sebagian rakyat tertinggal. Akan tetapi, para Muslim santri harus puas dengan pendidikan tradisional mereka di pesantren. Beberapa orang mencoba mendirikan sekolah model Belanda, tetapi jumlahnya relatif kecil. Dualisme sistem pendidikan ini pada gilirannya menyebabkan dualisme kader kepemimpinan elit pribumi, antara elit abangan dan priyayi di satu pihak dan elit santri di pihak lain. Akibatnya, peran para pemimpin pribumi merosot tajam sehingga memperlebar jarak antara masyarakat biasa dengan penguasa lokal.⁸

Kerasnya politik kolonial dan semakin suramnya politik, ekonomi, sosial dan budaya menyebabkan kebangkitan Islam di Nusantara. Ini mendorong penduduk pribumi untuk mengubah perjuangan melawan Belanda dari strategi militer ke perlawanan yang damai dan terorganisir sehingga terbentuklah berbagai organisasi yang bertujuan meningkatkan kondisi ekonomi, pendidikan dan sosial masyarakat luas.

Adanya semangat pembaharuan ini mengakibatkan perpecahan umat Islam di Indonesia menjadi dua kelompok yaitu modernis dan tradisional. Dalam periode inilah, tepatnya pada tanggal 31 Januari 1926, K. H. Hasyim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, suatu organisasi tradisional yang artinya Kebangkitan Ulama.⁹ Pembentukan Nahdlatul Ulama tak lain sebagai wadah pemersatu para ulama dan pengikutnya sebagai upaya untuk mempertahankan paham ahlussunnah wal jamaah serta tercapainya cita-cita kejayaan umat Islam.

⁸ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 3-4.

⁹ *Ibid.*, hal. 5-7.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi ulama tradisional yang memiliki pengikut yang besar jumlahnya, organisasi non pemerintah paling besar yang masih bertahan dan mengakar di kalangan bawah. Kehadiran organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi masyarakat di Indonesia memiliki arti yang sangat penting sekaligus strategis. Beragam kemanfaatan telah dihadirkan oleh Nahdlatul Ulama baik bermanfaat bagi warga Negara Nahdlatul Ulama maupun bagi bangsa Indonesia pada umumnya.¹⁰ K. H. Hasyim Asy'ari merupakan pemimpin pertama organisasi ini dan dianggap sebagai pemimpin agung (Ra'is Akbar). Karisma dan kepemimpinan beliau sangat mendukung perkembangan organisasi ini. Dilahirkan dari keluarga elit kiai di Jombang, Jawa Timur, K. H. Hasyim Asy'ari pernah belajar di berbagai pesantren di Jawa. Beliau kemudian kembali ke Indonesia dan mendirikan Pesantren Tebuireng di Jombang yang terkenal dengan ilmu haditsnya.¹¹

Sebagai pendiri Nahdlatul Ulama, K. H. Hasyim Asy'ari biasanya digambarkan sebagai tradisional dan konservatif. Gambaran ini dapat dimengerti berdasarkan sikap tradisional Nahdlatul Ulama sendiri, suatu julukan berdasarkan reaksi Nahdlatul Ulama pada masa awal perkembangannya. Sikap awal Nahdlatul Ulama agak menolak tantangan-tantangan dunia modern dan mentoleransi praktek Islam "sinkretik" dan memegang teguh mazhab fiqh.¹²

Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 kini masih tetap menjadi organisasi Islam yang paling berpengaruh di

¹⁰ Khoiril Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. ii.

¹¹ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 7.

¹² *Ibid.*, hal. 8.

desa-desa di Jawa, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah dan di mana mayoritas orang Islam bertempat tinggal.¹³ Aturan-aturan dasar organisasi Nahdlatul Ulama yang ditulis oleh K. H. Hasyim Asy'ari sebagai dasar ideologi sampai kini masih dipakai. Selain itu K. H. Hasyim Asy'ari tidak saja berperan utama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mengenai berbagai masalah keagamaan yang diperdebatkan banyak ulama, tetapi juga berperan dalam mempromosikan NU sebagai organisasi Nasional.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk mengetahui lebih jelas tentang “Peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU Tahun 1926-1947”. Permasalahan-permasalahan tersebut yaitu :

1. Bagaimanakah biografi Hasyim Asy'ari ?
 - A. Latar belakang keluarga.
 - B. Latar belakang pendidikan.
 - C. Riwayat Hasyim Asy'ari.
2. Bagaimanakah latar belakang dan berdirinya NU?
 - A. Kondisi Islam sebelum tahun 1926.
 - B. Pertentangan antara kaum tradisional dan modernis.
 - C. Proses berdirinya NU.
 - D. Perkembangan NU pada masa Hasyim Asy'ari.
3. Apakah sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

¹³ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais ' Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2002, hal. 18.

- A. Masa Kolonial Belanda (1926-1942).
- B. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945).
- C. Masa Kemerdekaan Indonesia (1945-1947).

C. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka tujuan penulisan ini adalah

1. Mendeskripsi dan menganalisis biografi Hasyim Asy'ari.
2. Mendeskripsi dan menganalisis latar belakang dan berdirinya NU.
3. Mendeskripsi dan menganalisis sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

D. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan ini adalah

1. Bagi dunia pendidikan, penulisan ini dapat berguna untuk menambah informasi dan menambah khasanah pengetahuan sejarah khususnya tentang peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.
2. Bagi para pembaca, penulisan ini dapat memperluas pengetahuan sejarah khususnya tentang peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.
3. Bagi mahasiswa, penulisan ini dapat dijadikan bahan dalam pengetahuan tentang peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam skripsi ini penulis menggunakan sumber-sumber tertulis yaitu berupa buku-buku. Buku ini digunakan sebagai bahan penunjang penulisan skripsi, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Sumber yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah karangan Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat dan Pengabdianya*, 1985, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Inventarisasi Dan Dokumentasi Nasional. Buku ini menguraikan tentang latar belakang keluarga dan pendidikan Hasyim Asy'ari, latar belakang berdirinya NU dan sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU.

Sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pertama, karangan Lathiful Khuluq, 2000, yang berjudul *Kebangunan Ulama (Biografi Hasyim Asy'ari)*, LkiS: Yogyakarta. Buku ini menguraikan kepribadian Hasyim Asy'ari dari latar belakang keluarga K. H. Hasyim Asy'ari, masa awal belajarnya, tulisan-tulisannya, usahanya di pesantren, karyanya dalam membentuk dan memajukan Nahdlatul Ulama dan kerjanya dalam Kementerian Agama pada masa Jepang yang baru dibentuk.

Kedua, buku yang ditulis Abdurrahman Wahid, dkk, 1995, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Buku ini menguraikan tentang profil seorang tokoh Indonesia yang menggambarkan fase-fase kehidupan sosial, kultural, keagamaan dan politik Indonesia sejak akhir abad ke-19 sampai dengan masa sekarang ini.

Ketiga, buku yang ditulis Martin van Bruinessen, 1994, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LkiS dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Buku ini membicarakan tentang berdirinya Nahdlatul Ulama.

Keempat, buku yang ditulis Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, 1992, *NU Pasca Khilafah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Medya Widya Mandala: Yogyakarta. Buku ini membicarakan tentang sejarah perkembangan NU.

Kelima, buku yang ditulis Thalhas, 2002, *Alam Pikiran K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. M. Hasyim Asy'ari (Asal-usul dua kutub gerakan Islam di Indonesia)*, Galua Pasé: Jakarta. Buku ini membicarakan tentang sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

F. Landasan Teori

Sebelum masuk pada pembahasan permasalahan perlu dijelaskan landasan konseptual dalam pembahasan ini. Konsep-konsep ini adalah mengenai akulturasi, inkulturasi dan modernisme Islam. Penjelasan konsep ini sangatlah penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembahasan masalah. Sebelum membahas konsep modernisme Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian akulturasi dan inkulturasi guna memahami atau melihat bagaimana bentuk akulturasi dan inkulturasi agama Islam dengan kebudayaan lokal, dan pengaruh akulturasi dan inkulturasi terhadap Islam di Indonesia yang mana sampai sekarang ini tetap dipertahankan.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah :

- a. Proses percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi.
- b. Proses masuknya pengaruh kebudayaan asing terhadap suatu masyarakat, sebagian menyerap secara selektif sedikit atau banyak unsur kebudayaan asing itu dan sebagian berusaha menolak pengaruh itu.¹⁴

Dari pengertian diatas maka dalam akulturasi terjadi percampuran dua kebudayaan atau lebih yang mana dalam percampuran tersebut masing-masing kebudayaan tidak hilang salah satunya namun justru melahirkan kebudayaan baru yang mana kebudayaan baru ini merupakan percampuran dari kedua kebudayaan tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inkulturasi adalah usaha suatu agama untuk menyesuaikan diri dengan kebudayaan setempat.¹⁵

Seperti yang telah diketahui bahwa sebelum Islam masuk di Nusantara telah berkembang agama dan kebudayaan Hindu-Budha. Agar Islam dapat diterima di kalangan masyarakat Nusantara maka Islam harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dengan cara akulturasi dan inkulturasi. Dan seperti yang telah diketahui bahwa Islam berhasil melakukan akulturasi dan inkulturasi tersebut yang dibuktikan bahwa Islam berkembang dengan cepat di Nusantara dan karena akulturasi dan inkulturasi ini Islam dapat diterima oleh masyarakat di Nusantara. Bentuk-bentuk akulturasi dan inkulturasi Islam terhadap kebudayaan setempat/lokal adalah :

1. Perayaan/Upacara Grebeg

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, hal. 20.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 380.

Perayaan Grebeg merupakan bentuk akulturasi dan inkulturasi Islam dengan kebudayaan setempat/lokal, yaitu kebudayaan Hindu-Budha. Hal ini sesuai dengan pendapat Solichin Salam dimana menurutnya perayaan grebeg yang telah menjadi tradisi nenek moyang sejak sebelum Islam, disesuaikan dengan perayaan hari raya Idul Fitri dan Maulid Nabi Muhammad S.A.W yang sejak itu terkenal dengan sebutan Grebeg Poso (Ramadhan) dan Grebeg Mulud (Maulid).¹⁶

Kata bahasa Jawa Garebeg, Grebeg, Gerbeg bermakna suatu angin mender. Kata bahasa Jawa (H)anggrebeg, mengandung makna mengiring raja, pembesar atau pengantin. Dahulu para raja Jawa selalu menyelenggarakan selamatan kerajaan (bahasa Jawa wilujengan nagari) setiap tahun baru dan disebut rojowedo. Maksudnya hewan korban raja. Tujuan selamatan kerajaan adalah suatu upacara kurban itu ialah agar Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan perlindungan, keselamatan kepada raja, kerajaan serta rakyatnya.¹⁷

Dalam selamatan itu raja keluar dari keraton dengan diiringi putra dan segenap peunggawa keraton untuk tampil dihadapan rakyat yang datang menyampaikan sembah baktinya. Jadi sangat mirip dengan upacara sekarang yang disebut Pasowanan Garebeg. Kalau dahulu upacara itu berlangsung di bangsal ponconiti, maka pada masa-masa berikutnya sampai dengan abad XX, upacara itu berlangsung di bangsal manguntur (bahasa Jawa, siti) yang dibuat tinggi (bahasa Jawa hinggil) dibagian depan keraton.

Akulturasi dan inkulturasi nampak bahwa kerajaan Pengging semasa pemerintahan Prabu Hajipamoso, dilanda wabah penyakit menular. Penyalit

¹⁶ Solichin Salam, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta: Djajamurni, 1964, hal. 50.

¹⁷ B. Soelarto, *Grebeg Di Kesultanan Yogyakarta*, Kanisius: 1996, hal. 9.

tersebut disebarkan oleh para makhluk halus tentara Batari Durga yang bersemayam dalam rimba Krendowahono. Untuk menghilangkan malapetaka itu, Prabu Hajiparmoso menitahkan agar menyelenggarakan upacara kurban yang khusus dipersembahkan kepada Batari Durga. Upacara kurban itu disebut mahesolawung. Yang dijadikan hewan kurban adalah kerbau (bahasa Jawa maheso) liar (bahasa Jawa lawung).¹⁸ Setelah diselenggarakan hamesolawung lenyaplah wabah penyakit manular yang melanda kerajaan Pengging. Adat upacara seperti itu terus menerus dilakukan oleh para raja Jawa sampai akhir.

Tak lama setelah Raden Patah dinobatkan menjadi Sultan pertama Kesultanan Demak dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar atau Sultan Ngabdil Suryongalam, baginda menghapuskan adat menyelenggarakan upacara korban yang selalu dilakukan oleh para raja Jawa Hindu terdahulu. Sebab adat demikian, dinilai bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Penghapusan adat itu menimbulkan keresahan di kalangan rakyat. Sebab rakyat yang selama berabad-abad turun temurun sudah terbiasa hidup dengan adat dari kepercayaan lama tak dapat menerima sikap rajanya yang baru itu. Keresahan yang menimbulkan gangguan keamanan negara itu ditambah dengan musibah lainnya yaitu berjangkitnya wabah penyakit menular.

Atas saran Wali Songo, adat dari kepercayaan lama itu dihidupkan kembali namun diberi warna keIslaman. Hewan kurban disembelih menurut peraturan agama Islam. Awal dan akhir doa selamatan berupa doa Islam yang dipanjatkan oleh Sunan Giri dan Sunan Bonang. Maka setelah kerajaan

¹⁸ *Ibid.*, hal. 10.

menyelenggarakan upacara kurban itu, tak berapa lama kemudian menghilanglah wabah penyakit manular dan ketentraman pulih kembali.¹⁹ Sesudah aman dan tentram, Wali Songo kemudian menggiatkan menyebarkan agama Islam. Untuk mendukung syiar Islam tersebut, maka didirikanlah Masjid Besar sebagai pusat peribadatan umum. Menurut Candra Sengkala yang berbunyi *Geni Mati Siniram ing Janmi*. Masjid Besar itu selesai pembangunannya pada tahun 1408.

Namun meski sudah terdapat Masjid Besar dan Wali Songo giat berdakwah, penyebaran agama Islam tidak banyak mengalami kemajuan, masih sedikit rakyat yang memeluk agama Islam. Maka para Wali Songo selalu bermusyawah. Mereka sependapat bahwa untuk menginsafkan rakyat dan kebenaran ajaran agama Islam, haruslah dilakukan secara bertahap dan dengan penuh kearifan. Bersikap sopan-santun ramah tamah dalam berdakwah dan tanpa mencela adat serta unsur-unsur kebudayaan rakyat. Bahkan memanfaatkan unsur-unsur kebudayaan rakyat sebagai sarana dakwah, terutama dengan memanfaatkan bahasa, adat istiadat dan kesenian rakyat.

Sunan Kalijogo mengetahui bahwa rakyat menyukai perayaan keramaian yang dihubungkan dengan upacara-upacara keagamaan. Apalagi jika perayaan keramaian itu disertai irama gamelan tentu akan sangat menarik perhatian rakyat untuk datang menghadiri. Timbullah gagasan Sunan Kalijogo agar kerajaan menyelenggarakan perayaan, keramaian setiap menyongsong hari kelahiran Nabi Muhammad S.A.W pada bulan Rabiulawal. Untuk menarik perhatian rakyat agar mau masuk ke Masjid Besar, dibunyikan gamelan yang ditempatkan di halaman

¹⁹ *Ibid.*, hal. 11.

Masjid. Para Wali dapat berdakwah langsung dihadapan rakyat.²⁰ Usul ini diterima oleh Wali yang lain dan Sultan. Maka dalam bulan Rabiulawal, seminggu sebelum hari kelahiran Nabi diselenggarakan perayaan, keramaian yng disebut sekaten. Di halaman Masjid Besar didirikan tempat khusus untuk menaruh dan membunyikan gamelan, disebut Pagongan. Makna Pagongan adalah tempat gong (gamelan) yang dibuat oleh Sunan Giri. Konon sebagian dari gendhing-gendhing (lagu) gamelan diciptakan oleh Sunan Giri dan sebagian lgi Sunan Kalijogo. Selama satu minggu gamelan diperdengarkan terus menerus kecuali pada waktu sholat dan pada malam jumat sampai lewat sholat Jumat.²¹ Gamelan ini berhasil memikat rakyat/masyarakat dan mereka mau mendengarkan dakwah Sunan Kalijogo dan bahwa dakwah ini berhasil menyentuh hati orang banyak.

Selama perayaan, keramaian sekaten dalam satu minggu itu banyak rakyat secara sukarelawan masuk Islam dengan mengucapkan dua kalimat Syahadat. Dan kaum pria yang sudah menyatakan masuk Islam itupun menjalani khitanan. Untuk lebih menarik simpatik rakyat pada malam menjelang hari kelahiran Nabi yang bertepatan dengan tanggal 12 bulan Rabiulawal, Sultan berkenan mengikuti upacara keagamaan di Masjid Besar. Sultan keluar dari kraton diiringi (bahasa Jawa ginarebeg) para putra dan segenap pembesar kerajaan. Selepas sholat Isya, Sultan dan para pengiringnya duduk diserambi kembali ke keraton. Gamelan yang selama seminggu ditaruh dan dibunyikan di halaman Masjid Besar, juga dibawa ke keraton sebagai tanda berakhirnya perayaan, keramaian sekaten dan upacara peringatan hari kelahiran Nabi.

²⁰ B. Soelarto, *op.cit.*, hal. 11.

²¹ *Ibid.*, hal. 12.

Rupanya keberhasilan perayaan, keramaian sekaten sebagai suatu sarana menyiarkan Islam di kalangan rakyat mendorong Sultan untuk mengeluarkan undang-undang kerajaan yang menetapkan penyelenggaraan sekaten selama satu minggu setiap tahun menjelang peringatan hari kelahiran Nabi dalam bulan Robiulawal. Kiranya jelas sudah bahwa perayaan keramaian sekaten dan upacara peringatan hari kelahiran Nabi yang diselenggarakan secara resmi oleh kerajaan setiap tahun sekali itu, dimulai pada zaman kesultanan Demak semasa pemerintah Sultan Syah Alam Akbar (Raden Fatah).

2. Seni Bangunan

Dalam segi keagamaan juga dapat dilihat akulturasi dan inkulturasi Islam dengan kebudayaan setempat/lokal seperti pada masjid di Nusantara. Di Indonesia bentuk-bentuk masjid kuno menunjukkan keistimewaan dalam denahnya yang persegi empat atau bujur sangkar dengan tiga, lima, atau lebih dikelilingi oleh aprit atau kolam air pada bagian depan atau sampingnya, dan mempunyai serambi. Bagian-bagian lainnya seperti *mihrab* dengan lengkungan pola *kala makara*, mimbar, yang mengingatkan ukiran pola-pola teratai, *mastaka*, atau memolo itu kesemuanya jelas menunjukkan pola-pola seni bangunan tradisional yang telah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Bangunan masjid-masjid kuno diantaranya mengingatkan kepada seni bangunan Hindu. Ukiran-ukiran seperti mimbar, hiasan lingkungan pola *kala makara-mihrab*, bentuk beberapa *mastaka* atau *memolo* menunjukkan hubungan yang erat dengan perlambang *meru*, *kekayon gunung* atau gunung tempat kedewaan yang dikenal pada cerita-cerita keagamaan Hindu. Beberapa ukiran pada masjid kuno seperti di Mantingan, di

Sendang Duwur, menunjukkan pola-pola yang diambil dari dunia tumbuhan dan hewan yang diberi corak tertentu dan mengingatkan kepada pola-pola ukiran yang telah dikenal pada candi Panataran dan beberapa candi lainnya.

Kecuali itu juga pintu gerbang, baik di keraton-keraton maupun di makam, orang-orang yang dianggap keramat yang menunjukkan bentuk candi Bentar, Kori-Agung, jelas menunjukkan corak pintu gerbang yang telah dikenal sebelum Islam. Demikian pada nisan-nisan kubur di daerah Tralayan di Tuban, Madura, Demak, Kudus Cirebon, Banten, menunjukkan anasir-anasir seni ukir dan perlambang pra Islam. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatra terdapat beberapa nisan kubur yang lebih menunjukkan anasir seni Indonesia pra Hindu dan pra Islam.²² Akulturasi mengenai makam ini juga didukung oleh Hasan Muarif Ambury, Kepala pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas). Menurutnya dari bkti-bukti epigrafi makam kadang-kadang tampak fenomena penyandingan aksara Arab dan aksara-aksara lokal, seperti Jawa Kuno di kompleks Makam Troloyo dan aksara Lontara di Gowa Tallo, Binamu Jenepanto (Sulawesi Selatan). Dari kandungan ini, tampak juga kutipan-kutipan ayat suci *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits* yang sebadian besar behubungan dengan *sufisme*, *tauhid*, *basmalah*, *shalawat* atau tentang akhir kehidupan. Selain dapat disimak jenis-jenis aksara dan gaya tulisan Arab yang berkembang di Nusantara, di sana juga terlihat anasir-anasir budaya asing yang mempengaruhinya seperti pengaruh Gujarat pada makam *Fatimah binti Maemun* di Leran (Gresik) atau makam *Sultanah Nahrisyah* di Pasai (Aceh Utara).²³

²² Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 125.

²³ Ken, *Islam Bersosialisasi Dengan Kebudayaan Lokal Secara Damai*, Jumat 15 Januari 1999, artikel internet www.kompas.com/kompas-cetak. Jakarta, Kompas.(Lihat lampiran IV, hal. 112)

3. Bedug

Bedug adalah tanda panggilan bagi warga Islam untuk melakukan *Sholat* dimana menurut Gunawan Muhammad dan M. Muzzakir Kholil, ia mengatakan bahwa bedug berasal dari Cina. Informasi ini ia dapat dari seseorang guru besar etnomusikologi Amerika, Charles Copwel. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa di jaman Hindu Budha, instrumen itu tidak pernah disebut. Mungkin baru ketika Zheng He dan pasukannya datang sebagai utusan maharaja Ming ke Jawa dialah yang memperkenalkan bedug ketika ia memberi tanda panggilan berbaris pada tentara. Terlepas dari valid dan tidaknya sumber ini, pada intinya bedug adalah budaya lokal yang telah menjadi kebudayaan Islam. Di situlah terjadi akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik ini digambarkan dalam salah satu *kaidah kulliyah Fiqhiyah*: kebiasaan perkara yang ditetapkan oleh *Uruf* (adat/tradisi) sama seperti yang ditetapkan oleh *dalil syara (al tsabit bi al urfi ka al tsabit bi dalilin syar'iy)*. Menurut M. Kholil ada dua faktor kenapa bedug ditoleransi oleh para ulama terdahulu menjadi salah satu simbol Islam (di Indonesia). Pertama, bedug telah menjadi kebudayaan Hindu yang mengakar pada masyarakat sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Seandainya bedug dicabut dengan serta merta dari masyarakat, maka mereka akan sulit menerima Islam karena Islam akan terasa asing di tengah-tengah mereka. Kedua, bahwa bedug sebagaimana adzan hanyalah sebagai *washilah* (mediator) untuk melaksanakan ibadah *sholat*. Artinya menabuh bedug bukan bagian dari ibadah *mahdhah* (murni) yang merupakan salah satu syarat

syahnya uruf menjadi patokan hukum *syariat* (*Ushul fiqh*, Metodologi Hukum Islam).²⁴

4. Wayang Purwa

Penyebaran agama Islam selain nampak dalam hal di atas juga melalui wayang purwa. Dimana menurut Ibnu Djarir, Wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah, wayang Purwa yang ceritanya bersumber dari Kitab-kitab Hindu seperti cerita Mahabhrata dan Ramayana. Oleh para wali, bentuk wayang itu dimodifikasi. Bentuknya tidak persis manusia, tetapi diubah seperti bentuk yang dapat kita saksikan sekarang. Namun cerita tentang dewa-dewa masih lekat di dalamnya.²⁵ Fungsi utama wayang pada waktu itu adalah wayang digunakan sebagai sarana dakwah Islam, sesuai nilai Islam yang dianut, isi dan fungsi wayang telah bergeser dari ritual agama (Hindu) menjadi sarana pendidikan, dakwah, penerangan dan komunikasi massa, ternyata wayang yang telah diperbaharui kontekstual dengan perkembangan agama Islam dan masyarakat menjadi sangat efektif untuk komunikasi maka dalam memberikan hiburan serta pesan-pesan kepada khalayak.

5. Pesantren

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pesantren merupakan salah satu sarana pendidikan yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Pesantren ini juga merupakan hasil akulturasi dan inkulturasi antara kebudayaan Islam dan kebudayaan setempat/lokal (Hindu-Budha). Hal ini tampak

²⁴ M. Muzakki Kholil, *Bedug : Akulturasi Budaya Islam dan Lokal*, 3 April 2005, artikel internet. (Lihat lampiran V, hal. 114)

²⁵ Ibnu Djarir, *Muhammadiyah dan Dakwah Kultural*, Jumat 1 Maret 2002, artikel www. Suamerdeka.com. (Lihat lampiran V, hal. 116)

dalam sebelum tahun 60-an, pusat-pusat pesantren di Jawa dan Madura lebih dikenal dengan nama pondok. Santri yang disebut pondok atau tempat tinggal yang dibuat dari bambu atau barangkali berasal dari Arab, *fundug* yang berarti hotel atau asrama. Perkataan pesantren berasal dari kata santri yang dengan awalan pe- di depan dan akhiran -an berarti tempat tinggal para santri. Profesor Johns berpendapat bahwa istilah santri berasal dari bahasa Tamil, yang berarti guru mengaji, sedang C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari istilah *Shastri* yang dalam bahasa India berarti orang yang tahu buku-buku suci Agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab suci Agama Hindu. Kata *Shastri* berasal dari kata *Shastra* yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku tentang ilmu pengetahuan.²⁶

Pesantren merupakan adaptasi kebudayaan Hindu-Budha dimana dulu sistem pendidikannya menggunakan sistem asrama (guru kula) dimana para guru dan siswanya berdiam bersama-sama. Sedangkan Pondok Pesantren adalah kelanjutan dari sistem asrama tersebut yang mana pusat perhatiannya adalah agama Islam.

6. Dakwah

Dakwah biasanya dilakukan oleh para wali Songo dalam upayanya menyebarkan agama Islam. Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa dakwah ini dilakukan di depan Masjid Besar pada saat perayaan besar yaitu Sekaten (Grebeg). Dalam melakukan dakwah, para Wali juga menggunakan akulturasi dan inkulturasi agar dakwahnya dapat diterima oleh masyarakat. Misalnya sedekah

²⁶ Sutejo Bradjanagara, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Yogyakarta, 1956, hal. 24

laut dan sedekah bumi diubah menjadi slametan, sedekah. Selain itu juga dalam berdakwah para wali menggunakan baju Jawa dan bukan baju seperti Arab.²⁷

7. Seni Sastra

Sastra termasuk dalam pendidikan Islam sebab selain melalui dakwah digunakan juga sastra-sastra yang berbau mistik, kadang kala disesuaikan dengan kebudayaan setempat, seperti misalnya pada masa Sultan Agung, ia menulis buku yang bernama *Sastragending* yang berbau mistik.²⁸ Selain itu juga banyak terdapat wejangan-wejangan atau ajaran dari Wali Songo seperti ajaran Sunan Ampel mengenai *Tauhid*, ajaran Sunan Bonang kepada si Wujil, bekas budak raja Majapahit sebagaimana tersebut dalam *Kitab Suluk Wujil* yang mana ajaran-ajaran dan ucapannya tersebut berisikan soal-soal kebatinan atau mistik untuk memperteguh pribadi serta mendekatkan diri kepada Tuhan, wejangan dari Sunan Kalijaga kepada Sunan Bayat, sebagaimana tersebut di dalam *Tembang Dandang Gula*, ajaran Syekh Siti Jenar dan *Serat Sentini* yang berisikan pelajaran Tassawuf yang tinggi menggambarkan hubungan antara makhluk dengan Khaliknya. Wujudnya adalah dua tetapi karena dibalut oleh rasa cinta kasih yang mesra maka yang dua itu seakan-akan menjadi satu jua.²⁹

8. Tassawuf

Kata Tassawuf adalah bentuk masdar dari kata dasar *suf*, artinya wol, biasanya dipakai sebagai jubah (*labs al-suf*) orang-orang yang menjalankan kehidupan mistik atau yang disebut *sufi*. Kecuali itu Tassawuf sering dihubungkan dengan pengertian *suluk* yang juga berasal dari bahasa Arab yang berarti

²⁷ Ibnu Djarir, *Muhammadiyah dan Dakwah Kultural*, Jumat 1 Maret 2002, Artikel Internet www.suaramerdeka.com.

²⁸ Solichin Salam, *Sejarah Islam di Jawa*, Jakarta: Djajamurni, 1967, hal. 59.

²⁹ *Ibid.*, hal. 35-39.

perjalanan. Oleh ahli-ahli *sufi*, pengertian *suluk* dipergunakan untuk menggambarkan perjalanan mistik yaitu perjalanan-perjalanan menuju Tuhan yang dimulai dengan memasuki *Tarikat* atau jalan di bawah pimpinan seorang *Syaikh* dan akhirnya dengan usaha mencapai tingkat kejiwaan yang tertinggi menurut kemampuannya.³⁰ Ini sesuai dengan ajaran Hindu-Budha Gautama yang mana akhirnya mencapai moksa di bawah pohon Bodhisatwa yang mana sampai sekarang masih diperingati yaitu pada saat Waisak, para pengikut Buddha melakukan perjalanan dari Candi Pawon menuju Candi Mendut kemudian dilanjutkan ke Candi Borobudur.

Penyebaran agama Islam di Indonesia khususnya di Jawa oleh para Wali Songo dilakukan dengan cara akulturasi dan inkulturasi Islam, karena para wali beranggapan agama Islam dapat diterima oleh rakyat dengan menyesuaikan kebudayaan yang sudah ada pada saat itu. Hasyim Asy'ari memegang teguh dan mempertahankan ajaran Islam yang dibawa oleh para Wali Songo tersebut. Hasyim Asy'ari adalah seorang kiai (kelompok abangan) yang masih mempertahankan ajaran Islam tradisional dan menganggap bahwa ajaran Islam yang benar adalah ajaran Islam yang dibawa oleh para Wali Songo.

Seiring dengan perkembangan jaman unsur-unsur budaya lokal yang mempengaruhi Islam dianggap sudah melenceng dari Islam karena unsur-unsur budaya lokal dalam Islam dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah oleh karena itu terjadilah pembaharuan atau pemurnian ajaran Islam yang disebut juga dengan modernisme Islam.

³⁰ Sartono Kartodirdjo, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia III*, Jakarta: Balai Pustaka, 1977, hal. 136.

Setiap pemikiran agama yang berangkat dari keyakinan bahwa kemajuan-kemajuan sains dan kebudayaan modern menuntut adanya interpretasi terhadap ajaran-ajaran agama klasik sesuai pemikiran filsafat dan ilmiah yang berlaku. Jadi, modernisme adalah gerakan yang berusaha menundukkan prinsip-prinsip agama di bawah nilai-nilai dan konsep peradaban Barat dan pola berpikirnya dalam segala kehidupan.³¹

Modernisme pada mulanya adalah satu fungsi dari liberalisme Barat. Konsekuensinya dapat diduga, bahwa pengertian umum dari kaum modernis adalah untuk menafsirkan Islam dalam ketentuan-ketentuan dari cita-cita dan nilai-nilai kemanusiaan yang liberal. Pada tingkat pertama, mereka mengakui bahwa Islam tidak bertentangan dengan cita-cita yang demikian itu, akan tetapi selanjutnya mereka mengakui bahwa Islam adalah penjelmaan daripadanya dalam bentuknya yang paling tinggi dan paling sempurna.³²

Meskipun ide tentang modernisasi memancing banyak kecaman dan kritik konsep ini mempunyai manfaat karena mengambil pendekatan sistematis terhadap perubahan sosial, menekankan kesalingterikatan lembaga-lembaga. Modernisasi juga memusatkan perhatian pada fakta bahwa perubahan-perubahan yang mirip, sesungguhnya terjadi di seluruh dunia.³³

Guna keperluan pemahaman terhadap pergerakan Islam di Indonesia, kajian ini akan bertolak dari tinjauan terhadap pandangan yang memahami Islam

³¹ Busthami M. Said, *Perubahan Dan Pembaharuan Dalam Islam*, Pusat studi Ilmu Dan Amal, 1992, hal. 93.

³² H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern Dalam Islam*, Perdana: Djakarta, 1952, hal. 87.

³³ Riaz Hassan, *Islam Dari Konservatif sampai Fundamentalisme*, CV. Rajawali: Jakarta, 1985, hal. 107.

di Indonesia dari dua paradigma yaitu Islam tradisional dan Islam modern. Studi yang dilakukan oleh Deliar Noer mengenai gerakan modern sekurang-kurangnya dari tiga aspek, antara lain :

1. Semangat pemurnian ajaran agama

Semangat inilah yang telah menumbuhkan upaya-upaya yang tak kenal lelah dari Islam modernis untuk membersihkan ajaran Islam dari apa yang mereka lihat sebagai bid'ah, takhayul dan khurafat, yang menurut mereka masih dianut oleh kebanyakan masyarakat Islam di Indonesia. Upaya pemurnian ini mendapat reaksi balik dari komunitas-komunitas muslim yang dianggap sebagai pelaku bid'ah, takhayul dan khurafat itu yang mana kemudian memperoleh pijakan dalam gerakan-gerakan Islam tradisional.

2. Sikap terhadap tradisi bermazhab

Khususnya di bidang fiqh, yang kemudian menumbuhkan perselisihan di sekitar masalah khilafiah dan masalah taqlid. Islam modernis menggugat tradisi ini, sementara Islam tradisional mempertahankannya.

3. Sikap terhadap perubahan dan rasionalitas

Islam tradisional kurang menyukai perubahan dan cenderung mempertahankan kebiasaan yang telah dianut. Sebaliknya Islam modernis menghendaki pembaharuan-pembaharuan. Hal ini antara lain tercermin dalam lembaga pendidikan pesantren yang dipertahankan oleh Islam tradisional sebagai model. Sementara Islam modernis memilih sistem sekolah (klasikal) yang di Indonesia telah dirintis oleh pemerintah kolonial Belanda. Pesantren dipandang kaum modernis sebagai sistem pendidikan yang tidak efektif dan efisien dan lebih

dari itu tidak memberi kesempatan berkembangnya aspek rasionalitas di kalangan santri.³⁴

Dengan memperhatikan ketiga aspek di atas, maka pembicaraan mengenai paradigma dikhotomis tradisional-modernis akan sampai pada identifikasi mengenai gerakan-gerakannya. Di bidang sosial, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan gerakan Islam tradisional yang paling menonjol di samping Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) dan lain-lain, sedangkan Muhammadiyah paling menonjol dari kalangan Islam modernis, di samping Persatuan Islam (Persis), Al-Irsyad dan sebagainya. Di bidang politik, kaum Islam tradisional diwakili oleh NU, Perti dan lain-lain sesudah mereka memisahkan diri dari Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) dan menjadi partai politik tersendiri. Sedangkan kaum modernis diwakili oleh Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (sesudah meninggalkan Masyumi jauh sebelum NU) dan sejenisnya.³⁵

Masuknya ide pembaharuan yang dilancarkan oleh Muhammad Abduh membawa dampak yang besar bagi ajaran Islam di Indonesia khususnya di Jawa.

Adapun ide pembaharuan yang dilancarkan Muhammad Abduh antara lain :

1. Mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam.
2. Reformasi pendidikan Islam di tingkat Universitas.

³⁴ Abdul Azis, dkk, *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, Pustaka Firdaus: Jakarta, 1989, hal. 3.

³⁵ *Ibid.*, hal. 5.

3. Mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern, dimaksudkan agar Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan.

Dengan alasan inilah Muhammad Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterkaitan mereka kepada pola pikiran para mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tersebut.

Ahmad Dahlan seorang ulama modernis setuju dengan ide Muhammad Abduh yaitu pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta berupaya memberantas bid'ah serta adat-istiadat yang tidak selaras dengan syariah. Kemudian Ahmad Dahlan mulai mengenalkan gagasan-gagasan yang bercorak pembaharuan. Akhirnya gagasan-gagasan dikristalisasikan dalam bentuk formal dengan lahirnya Muhammadiyah.

Hasyim Asy'ari sebagai kelompok tradisional tidak setuju dengan ide-ide Muhammad Abduh tersebut. Hasyim Asy'ari tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dalam hal mazhab, tidak mungkin untuk memahami maksud dari ajaran-ajaran Qur'an dan Hadits tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang bergabung dalam sistem mazhab, karena hanya akan menghasilkan pemutar-balikkan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya. Hasyim Asy'ari berpendapat bahwa akar-akar ajaran Islam, khususnya Islam tradisional, telah tumbuh sejak masuk dan semakin meluasnya pemeluk Islam di pedalaman Jawa pada saat mana Islam mulai mengalami proses menyerap dan diserap oleh unsur-unsur

budaya lokal dimana pada saat itu aspek-aspek mistik dari ajaran Islam (tasawwuf) menunjukkan pengaruh yang kuat. Untuk mempertahankan ajaran Islam tradisional tersebut, Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan Nahdlatul Ulama.

Perbedaan-perbedaan paham antara keagamaan itu seringkali berkembang menjadi perselisihan tajam bukan hanya pada awal munculnya gerakan-gerakan tersebut, melainkan terus berkembang hingga Indonesia memperoleh kemerdekaan. Hal itu terutama karena sebagai gerakan yang mulai terorganisasikan, kedua pihak tersebut dapat menghindarkan diri dari proses “ideologisasi” alirannya masing-masing.³⁶

Nahdlatul Ulama (NU) adalah kebangkitan ulama yang merupakan organisasi masyarakat Islam tradisional. Jadi, organisasi Nahdlatul Ulama merupakan kristalisasi tekad para ulama yang telah bangkit dan menggalang persatuan. Oleh karena itu pembentukan Nahdlatul Ulama tak lain sebagai wadah pemersatu para ulama dan pengikutnya sebagai upaya untuk mempertahankan paham ahlussunnah waljamaah serta tercapainya cita-cita kejayaan umat Islam.³⁷

Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 16 rajab 1344 H, bertepatan dengan tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Penggunaan nama Nahdlatul Ulama atau disingkat NU ini menjelaskan bahwa organisasi ini ingin menghimpun dan membangkitkan para kiai/ulama serta kelompok-kelompok ini (umat NU) sebagai kekuatan raksasa

³⁶ *Ibid.*, hal. 7.

³⁷ Khoirul Fathoni, Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah. Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. iv.

Islam Indonesia dan kebangkitan ini dimulai dari kebangkitan para kiai/ulama, kemudian dikembangkan kepada para pengikutnya dan masyarakat Muslim.³⁸

Sebagaimana dirumuskan dalam Anggaran Dasar NU tahun 1926, organisasi ini bertujuan untuk memperkuat kesetiaan kaum Muslimin pada salah satu dari empat mazhab dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menguntungkan para anggotanya sesuai dengan ajaran Islam. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain : memperkuat persatuan antara sesama ulama yang masih setia kepada ajaran-ajaran mazhab, memberikan bimbingan tentang jenis-jenis kitab yang diajarkan pada lembaga-lembaga pendidikan Islam, penyebaran ajaran-ajaran Islam yang sesuai dengan tuntutan empat mazhab, memperluas jumlah madrasah dan memperbaiki organisasinya, membantu pembangunan masjid-masjid, langgar dan pondok pesantren, membantu anak-anak yatim piatu dan fakir miskin, dan mendirikan badan-badan usaha dagang untuk memajukan kehidupan ekonomi anggota NU.³⁹

Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) sering dianggap sebagai organisasi tradisional atau wadah pemersatu kelompok umat Islam. Organisasi Nahdlatul Ulama senantiasa mengapresiasi nilai-nilai atau tradisi yang ada di masyarakat sehingga tradisi tersebut tidak perlu dibongkar seluruhnya tapi perlu diubah dan diselaraskan dengan ajaran Islam. Dengan demikian organisasi NU ingin menyempurnakan dan membimbing nilai-nilai atau tradisi yang berkembang di masyarakat agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

³⁸ *Ibid.*, hal. v.

³⁹ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais ' Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. 15.

Di samping bertujuan menggalang kehidupan Islam secara makro, kebangkitan ulama ini juga sebagai upaya mengatasi pesatnya gerakan pembaharuan yang dikhawatirkan akan mengancam kelestarian paham Ahlussunnah Waljamaah sendiri yang berarti penganut tradisi Nabi Muhammad sebagaimana yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam.

G. Hipotesis

1. Jika Hasyim Asy'ari memiliki pemikiran tradisional maka dia seorang tokoh ulama.
2. Jika kondisi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh ide-ide reformasi Islam dan terjadinya disintegrasi dan keresahan sosial maka Hasyim Asy'ari mendirikan NU.
3. Jika Hasyim Asy'ari berperan penting dalam organisasi NU maka Hasyim Asy'ari memberikan sumbangan terhadap NU.

H. Metode Penelitian dan Pendekatan

Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitis. Metode penelitian sejarah mempunyai empat tahap yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

1. Tahap Heuristik

Pada tahap heuristik ini sumber diperoleh dari berbagai sumber. Untuk memperoleh sumber tertulis penulis melakukan studi literatur dan dokumen sejarah tentang peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947

secara lengkap dan menyeluruh, dan untuk melengkapi kekurangan itu penulis menggunakan berbagai macam buku dan majalah yang ada.

2. Kritik Sumber

Kritik sumber merupakan tahap penelitian sejarah setelah mengumpulkan data. Kritik sumber ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kredibilitas dan otensitas. Dalam penulisan sejarah, kritik sejarah merupakan hal yang sangat penting karena kritik sumber bertujuan untuk menghindari kepalsuan sumber yang mana sebagian besar sumber yang digunakan merupakan sumber sekunder. Dengan demikian peneliti akan mengadakan penelitian terhadap sumber secara maksimal supaya mendekati kebenaran.

Adapun cara yang ditempuh penulis adalah melakukan kritik terhadap sumber yang telah dikumpulkan agar sumber yang diperoleh dapat dipercaya. Kritik intern yaitu membandingkan antara sumber berupa buku-buku yang membahas tentang peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947, dari hasil-hasil studi pustaka di beberapa tempat antara lain di kantor NU D.I.Y di jalan Tompeyan, perpustakaan Daerah Yogyakarta, perpustakaan UIN Kalijaga Yogyakarta, perpustakaan UNY Yogyakarta, perpustakaan UII Yogyakarta, Perpustakaan Kolose Kota Baru, dan perpustakaan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Sedangkan untuk melakukan kritik ekstern dilakukan dengan cara meneliti bahan yang dipakai, jenis huruf, gaya bahasa, tahun dan tanggal. Setelah identirasnya terbukti asli, baru kemudian diteliti isinya apakah isi pernyataan, fakta-fakta dan ceritanya dapat dipercaya.

Sumber skripsi seperti majalah tidak memerlukan kritik sumber karena sumber itu memuat tentang apa, siapa, di mana dan bagaimana peneliti perlu menyelidiki hal mana yang sesuai dengan pokok penelitian kemudian menyediakannya lewat pengolahan sebagai faktor-faktor. Hasil dari kritik sumber ialah fakta yang merupakan unsur-unsur rekonstruksi.

3. Interpretasi

Tahap interpretasi adalah tahap menafsirkan fakta-fakta yang diperoleh agar hasil interpretasi tepat perlu lebih dahulu melakukan penganalisaan terhadap fakta, mengapa dan bagaimana terjadinya, apa saja yang mempengaruhi keberadaannya. Setelah fakta dianalisis kemudian dipadukan agar menjadi satu kesatuan yang utuh dan kemudian mencari arti keseluruhannya.

4. Historiografi

Tahap historiografi yaitu suatu proses penulisan kembali peristiwa masa lampau berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Penulis akan menyeleksi sumber-sumber yang relevan dengan topik penulisan ini, kemudian diolah dan disusun menjadi fakta-fakta sejarah. Hasil kritik sumber adalah fakta yang merupakan unsur-unsur bagi rekonstruksi sejarah atau penyusunan cerita sejarah.⁴⁰

Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosial-budaya. Pendekatan sosial digunakan untuk melihat atau menggambarkan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia, dan Hasyim Asy'ari berperan di dalamnya.

⁴⁰ Koentjoroningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1993, hal. 72.

Hasyim Asy'ari melihat bahwa keadaan sosial masyarakat Indonesia pada saat itu mengalami tumbuh dan berkembangnya *Islamic revivalism* yaitu adanya gerakan pembaharuan pemikiran Islam, kemudian sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam. Terjadinya disintegrasi dan keresahan sosial yang hampir merata di seluruh Indonesia, mengakibatkan munculnya gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan tarekat di seluruh Jawa dan luar Jawa. Pendekatan sosial ini juga digunakan untuk mengkaji segi-segi sosial organisasi NU atau kegiatan-kegiatan sosial umat NU di organisasi NU, baik di dalam maupun di luar organisasi NU tahun 1926-1947.

Pendekatan budaya digunakan untuk melihat struktur sosial yang mencakup unsur-unsur kebudayaan dan religius di organisasi Nahdlatul Ulama.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “Peranan Hasyim Asy'ari Dalam Organisasi Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1947” ini mempunyai sistematika sebagai berikut :

Bab I Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian dan pendekatan, sistematika penulisan.

Bab II. Berupa uraian tentang biografi Hasyim Asy'ari, yang diawali latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan riwayat Hasyim Asy'ari.

Bab III. Berupa uraian mengenai latar belakang dan berdirinya NU, yang diawali dari kondisi Islam sebelum tahun 1926, pertentangan antara golongan

tradisionalis dengan modernis, proses berdirinya NU dan perkembangan NU tahun 1926-1947.

Bab IV. Berupa uraian tentang sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947, yang diawali dari masa Kolonial Belanda (1926-1942), masa pendudukan Jepang (1942-1945) dan setelah Kemerdekaan Indonesia (1945-1947).

Bab V. Penutup yang isinya tentang kesimpulan dari permasalahan yang telah diuraikan pada bab II, III, dan IV.

Demikianlah sistematika penulisan skripsi ini, dari uraian di atas dapat dicermati bahwa penulis ingin menguraikan tentang biografi Hasyim Asy'ari, latar belakang dan berdirinya NU dan sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.

BAB II

HASYIM ASY'ARI

A. Latar belakang Keluarga

Muhammad Hasyim⁴¹ adalah nama yang diberi oleh orang tuanya, lahir dari keluarga elite kiai Jawa pada 24 Dzul Qa'dah 1287 / 14 Februari 1871 di desa Gedang sekitar dua kilometer sebelah timur Jombang.⁴² Ayahnya bernama Kiai Asy'ari adalah pendiri Pesantren Keras yang berada di sebelah selatan Jombang sedangkan kakeknya Kiai Usman terkenal sebagai pemimpin Pesantren Gedang, yang didirikan pada akhir abad ke-19. Moyangnya, Kiai Sihah adalah pendiri Pesantren Tambakberas, Jombang. K. H. Hasyim Asy'ari menyerap lingkungan agama dari lingkungan pesantren keluarganya sehingga ia mendapatkan ilmu pengetahuan agama Islam. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Kiai Hasyim Asy'ari merupakan keturunan Raja Brawijaya VI yang juga dikenal dengan Lembu Peteng, ayah Jaka Tingkir yang menjadi Raja Pajang (keturunan kedelapan dari Jaka Tingkir).⁴³

K. H. Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara yaitu Nafi'ah, Ahmad Saleh, Muhammad Hasyim, Radiah, Hassan, Anis, Fatanah, Maimunah, Maksun, Nahrowi dan Adnan.⁴⁴ Sampai umur lima tahun, Hasyim

⁴¹ Lihat lampiran I, hal. 95.

⁴² Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K.H. Hasyim Asy'ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. 14.

⁴³ *Ibid.*, hal. 14.

⁴⁴ Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup Dan Pengabdiannya*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional: Jakarta, 1985, hal. 28.

Asy'ari dalam asuhan orang tua dan kakeknya di Pesantren Gedang. Di pesantren ini para santri mengamalkan ajaran agama Islam dan belajar berbagai cabang ilmu agama Islam. Hal ini sangat mempengaruhi karakter K. H. Hasyim Asy'ari yang sederhana dan rajin belajar. Pada tahun 1876 ketika K. H. Hasyim Asy'ari berumur enam tahun, ayahnya mendirikan Pesantren Keras sebelah selatan Jombang, sehingga pengalaman ini mempengaruhi beliau untuk kemudian mendirikan pesantren sendiri. Kehidupan masa kecilnya di lingkungan pesantren berperan besar dalam pembentukan wataknya yang haus ilmu pengetahuan dan kepedulian pada pelaksanaan ajaran-ajaran agama yang baik.⁴⁵

K. H. Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan orang tuanya sampai berumur 13 tahun. Ketika itu beliau telah mampu mengajar para santri yang tak jarang lebih tua dari umur beliau sendiri, dengan menjadi guru pengganti (badal) di pesantren orang tuanya.⁴⁶ Tak puas dengan ilmu yang diterimanya, pada usia 15 tahun K. H. Hasyim Asy'ari mulai mengembara ke berbagai pesantren di Jawa untuk mencari ilmu pengetahuan keagamaan.⁴⁷ Mulai menjadi santri di Pesantren Wonokoyo (Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis (Semarang), dan Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). Ia tinggal di Pesantren Siwalan selama lima tahun dan belajar pada Kiai Jakub yang kemudian mengambilnya sebagai menantu. Sebagaimana dikemukakan di atas, permintaan seperti ini merupakan tradisi pesantren.⁴⁸

⁴⁵ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 15.

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais ' Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. 2.

⁴⁷ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 16.

⁴⁸ Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup Dan Pengabdiannya*., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional: Jakarta, 1985, hal. 32.

Akhirnya dengan nasehat dan persetujuan kedua orang tuanya, K. H. Hasyim Asy'ari menikah dengan Khadijah pada tahun 1891, ketika ia berumur 21 tahun. Setelah menikah K. H. Hasyim Asy'ari bersama istrinya menunaikan ibadah haji ke Mekkah atas biaya mertuanya dan tinggal di Mekkah selama tujuh bulan. K. H. Hasyim Asy'ari kembali ke tanah air seorang diri karena istrinya meninggal setelah melahirkan anaknya bernama Abdullah. Pada tahun 1892, Kiai Hasyim Asy'ari kembali ke Mekkah ditemani Anis saudaranya, yang kemudian meninggal di sana. Ia tinggal di Mekkah selama tujuh tahun, menunaikan ibadah haji, belajar ilmu agama Islam dan bahkan bertapa di Gua Hira. Di sana ia berguru pada Syekh Ahmad Khatib dan Syekh Mahfudh at-Tarmisi, gurunya di bidang hadits. K. H. Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia tahun 1899 dan mendirikan pesantren di Tebuireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke-20. Ia pertama mengajar di pesantren ayah dan kakeknya kemudian antara 1903-1906 mengajar di kediaman mertuanya, Kemiring (Kediri). Sejak tahun 1900, Kiai Hasyim Asy'ari memosisikan Pesantren Tebuireng menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional.⁴⁹

K. H. Hasyim Asy'ari mengajar anak-anak beliau dasar-dasar ilmu agama Islam dan kemudian mengirimkan mereka ke pesantren lain dengan harapan mendapat pengalaman pesantren seperti beliau ini. K. H. Hasyim Asy'ari mendorong anak-anak putrinya untuk menikah dengan para kiai yang mengajar di Tebuireng dan anak-anak lelaki menikah dengan putri-putri kiai sehingga ikut melestarikan tradisi moyang mereka. K. H. Hasyim Asy'ari meninggal dunia pada 7 Ramadan 1326/25 Juli 1947.

⁴⁹ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 17.

B. Latar belakang Pendidikan

Pada masa muda K. H. Hasyim Asy'ari, ada dua sistem pendidikan bagi penduduk pribumi Indonesia. Pertama adalah sistem pendidikan yang disediakan untuk para santri Muslim di pesantren yang fokus pengajarannya adalah ilmu agama. Kedua adalah sistem pendidikan Barat yang dikenal pemerintah kolonial Belanda dengan tujuan menyiapkan para siswa untuk menempati posisi-posisi administrasi pemerintahan baik tingkat rendah maupun tingkat menengah. Sekolah Belanda untuk Pribumi (Holland Inlandsche Schoolen) didirikan pada awal 1914 dan terbatas bagi masyarakat pribumi, hanya anak-anak keluarga priyayi tinggi yang dapat mendaftarkan diri. Masa belajar dibatasi hanya tujuh tahun. Orang-orang Eropa dan Timur Asing (Cina dan Arab) mendapat kesempatan lebih baik untuk belajar di sekolah model Barat yang berkualitas, sehingga mayoritas penduduk pribumi yang sebagian besar Muslim, tidak mendapat kesempatan pendidikan Belanda. Kebanyakan Muslim menganggap haram sekolah Belanda karena karakter sekularnya. Karena adanya pembatasan pemerintah dan keyakinan kaum muslim, maka institusi pendidikan yang tersedia bagi mayoritas penduduk pribumi hanyalah pesantren.⁵⁰

Pendidikan K. H. Hasyim Asy'ari sama dengan yang dialami oleh kebanyakan santri Muslim seusianya. Pendidikan awal beliau sampai berumur 15 tahun, diperoleh dengan bimbingan ayahnya. Ia mendapat pelajaran dasar-dasar tauhid, fiqh, tafsir dan hadist. K. H. Hasyim Asy'ari kemudian meneruskan studi ke beberapa pesantren di Jawa dan Madura, yaitu Pesantren Wonokoyo

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 22.

(Probolinggo), Pesantren Langitan (Tuban), Pesantren Trenggilis (Semarang), Pesantren Kademangan (Bangkalan, Madura) dan Pesantren Siwalan Panji (Sidoarjo). Para santri menerima pengajaran dari berbagai ahli agama dengan jalan berkelana ke pesantren-pesantren. Tradisi pesantren dalam mencari ilmu ini memberi kesempatan pada K. H. Hasyim Asy'ari untuk belajar tata bahasa dan bahasa Arab, fiqh dan sufisme dari Kiai Khalil dari Bangkalan selama 3 tahun. Sebelumnya, selama dua tahun memfokuskan diri dalam bidang fiqh di bawah bimbingan Kiai Ya'qub di pesantren Siwalan Panji. Pada akhir perjalanannya mencari ilmunya, K. H. Hasyim Asy'ari telah mahir dalam tauhid, fiqh, bahasa Arab, tafsir dan hadits. K. H. Hasyim Asy'ari pernah belajar bersama-sama Ahmad Dahlan.

K. H. Hasyim Asy'ari kemudian pergi ke Hijaz untuk melanjutkan pelajarannya selama tiga tahun dengan ditemani oleh saudara iparnya yaitu Kiai Alwi. Di Mekkah, mula-mula K. H. Hasyim Asy'ari belajar di bawah bimbingan Syaikh Mahfudz dari Termas (w. 1920), ulama Indonesia yang pertama mengajar sahih Bukhari di Mekkah. Syaikh Mahfudz adalah ahli dalam ilmu hadits. K. H. Hasyim Asy'ari juga mendapat ijazah untuk mengajar sahih Bukhari dari Syaikh Mahfudz, pewaris terakhir dari pertalian penerima (isnad) hadits dari 23 generasi penerima karya ini. Di bawah bimbingannya, K. H. Hasyim Asy'ari juga belajar tariqat Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah (ilmu yang diterima oleh Syaikh Mahfudz dari Syaikh Nawawi).

Walaupun K. H. Hasyim Asy'ari mengikuti satu tarekat, ia melarang santrinya menjalankan praktek Sufi di pesantrennya agar mereka tidak terganggu dalam belajar, ia juga menolak tarekat yang dianggap menyimpang dari ajaran

Islam. K. H. Hasyim Asy'ari tidak menolak segala bentuk praktek Sufi. Ia hanya melarang praktek-praktek Sufi yang dianggapnya tidak murni Islam.⁵¹

K. H. Hasyim Asy'ari juga belajar fiqh mazhab Syafi'i di bawah bimbingan Ahmad Khatib yang juga merupakan ahli dalam bidang astronomi ('ilm falak), matematika ('ilm hisab) dan Aljabar (al-jabr). Ahmad Khatib juga seorang ulama liberal yang mendorong kemajuan dan pembaharuan. Namun dia tidak setuju dengan pembaharuan yang dilontarkan oleh Muhammad Abduh. Di satu sisi Ahmad Khatib setuju pendapat Abduh mengenai tarekat, tetapi disisi lain dia tidak setuju dengan pendapatnya mengenai pembentukan mazhab fiqh baru. Walaupun demikian, Khatib memperbolehkan para muridnya untuk belajar kepada Muhammad Abduh di Mesir. K. H. Hasyim Asy'ari setuju dengan dorongan Abduh untuk meningkatkan semangat muslim, tetapi dia tidak setuju dengan pendapat Abduh untuk membebaskan umat dari mazhab karena K. H. Hasyim Asy'ari percaya bahwa tidak mungkin memahami Al-Qur'an dan Hadits tanpa memahami perbedaan pendapat pemikiran hukum dan penolakan terhadap mazhab menurut beliau akan memutarakan ajaran Islam.

Guru-guru K. H. Hasyim Asy'ari yang lain adalah termasuk ulama terkenal Syaikh Nawawi dari Banten dan guru-guru "non-jawi" (bukan dari Nusantara) seperti Syaikh Shata dan Syaikh Dagistani yang merupakan ulama-ulama terkenal pada masa itu. Oleh karena itu, bahwa perkembangan intelektual K. H. Hasyim Asy'ari juga didorong oleh intelektual Muslim Internasional, sehingga tidak heran bila banyak murid beliau kemudian menjadi ulama yang disegani.

⁵¹ *Ibid.*, hal. 25.

Di Hijaz, K. H. Hasyim Asy'ari juga mendapat pengaruh dari perkembangan politik lokal seperti sentimen anti-kolonial, kemunculan Nasionalisme Arab dan Pan-Islamisme. Jadi tidak mengherankan, seruan persatuan umat ini membekas dalam benak K. H. Hasyim Asy'ari dan mengilhaminya untuk mewujudkan persatuan umat Islam dalam membebaskan tanah air dari kecaman kolonialisme. Beliau merealisasikan harapan ini dengan jalan bergabung dengan gerakan anti-kolonial.⁵²

C. Riwayat Hasyim Asy'ari

Kehidupan K. H. Hasyim Asy'ari mungkin dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana, "Dari pesantren kembali ke pesantren". Ia dibesarkan di lingkungan pesantren. Kemudian setelah tujuh tahun di Mekkah melakukan ibadah haji dan belajar di lingkungan seperti pesantren yaitu Masjid al-Haram dan Masjid al-Nabawi (masing-masing di Mekkah dan Madinah), dia kembali ke Nusantara untuk mendirikan pesantren sendiri dan menghabiskan sebagian besar waktunya mengajar para santri di pesantren. Ia bahkan mengatur "kegiatan-kegiatan politik" dari pesantren.⁵³

Menilai jasa perjuangan K. H. M. Hasyim Asy'ari, tidaklah mudah, sebab apa yang dikerjakan sewaktu hidupnya banyak yang dilakukan secara diam-diam, kurang atau tidak dipublikasikan. Di antara jasanya yang pokok seperti diuraikan terdahulu ialah berdirinya Jam'iyah Islamiyah Nahdlatul Ulama.

⁵² *Ibid.*, hal. 28.

⁵³ *Ibid.*, hal. 13.

Dengan Nahdlatul Ulama, ia berjuang mempertahankan kepentingan umat. Disatukannya potensi umat Islam menjadi kekuatan kokoh dan kuat, tidak mudah menjadi korban oleh kepentingan politik yang hanya mencari kedudukan dengan mengatasnamakan Islam.

Beliau beranggapan bahwa berjuang adalah beramal dan berjihad, sedangkan beramal adalah suatu keharusan. Dengan pandangan itu, ia menjadi Kiai yang berdiri di atas kaki sendiri (mandiri), mampu membiayai dan membangun proyek tempat dia berjuang. Ia telah berkorban untuk kepentingan umat, bahkan jauh sebelum Nahdlatul Ulama berdiri. Di hadapan para santri, ia mengobarkan semangat berjuang menentang imperialisme dan cita-cita membangun kesadaran nasional untuk memperoleh kemerdekaan yang akan membawa nikmat dan kebahagiaan bersama.⁵⁴

Hasil perjuangannya yang kongkret dan dapat kita lihat sekarang ialah berdirinya pondok-pondok pesantren dan Nahdlatul Ulama yang dibangunnya untuk mempersatukan seluruh ulama menjadi suatu kekuatan untuk mempertahankan kepentingan umat Islam.

Di zaman penjajahan Belanda, ia acapkali mengeluarkan fatwa-fatwa yang sering menggemparkan pemerintah Hindia Belanda. Misalnya, ia mengharamkan donor darah orang Islam dalam membantu peperangan Belanda dengan Jepang. Selain itu ia juga memfatwakan bahwa peperangan mempertahankan Indonesia di bawah pimpinan Belanda tidak dapat dinamakan perang sabil atau jihad. Ia juga

⁵⁴ Thalhas, *Alam Pikiran K.H. Ahmad Dahlan Dan K.H. M. Hasyim Asy'ari (Asal-usul Dua Kutub Gerakan Islam Di Indonesia)*, Galura Pasaé: Jakarta, 2002, hal. 128.

turut membantu perjuangan rakyat menuntut Indonesia berparlemen dan menentang milisi.

Pada masa pendudukan Jepang, K. H. M. Hasyim Asy'ari memimpin MIAI (Majlis Islam A`la Indonesia). Demikian pula dalam gerakan pemuda dan kelaskaran, seperti Hizbullah, Sabilillah dan semacamnya, beliau menjadi penasehat dan pemimpin umum. Jam'iyah Nahdlatul Ulama meraih kemajuan dan berkembang menjadi organisasi massa seperti terlihat sekarang, tidak lain karena perjuangan dan jasa K. H. M. Hasyim Asy'ari.⁵⁵

K. H. M. Hasyim Asy'ari telah memberikan darma baktinya untuk kepentingan umat Islam khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Ia sanggup membangun kesadaran kaum ulama Indonesia, sehingga melahirkan daya juang dari kalangan mereka untuk secara bersama-sama mengusir penjajah Belanda dan Jepang dengan usaha dan memperbaiki kehidupan umat Islam.

Munculnya berbagai organisasi semacam Tashwir al-Afkar, Nahdlatul Wathan dan Nahdlatul Ulama merupakan jasa-jasa positif K. H. M. Hasyim Asy'ari yang tidak kecil artinya dalam perjuangan Islam pada masa itu dan juga masa sekarang.

Di samping itu, usaha-usahanya di bidang pendidikan dan pembibitan kader ulama, dengan didirikannya Pesantren Tebuireng juga mempunyai pengaruh yang besar bagi syiar Islam. Beliau membina dan menyiapkan kader-kader ulama yang kelak menjadi pemimpin-pemimpin umat dan melanjutkan usaha-usaha meningkatkan syiar Islam ke seluruh pelosok tanah air. Beliau seorang tokoh

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 129.

ulama besar yang telah mengabdikan sebagian banyak usianya untuk kepentingan dan kemajuan Islam, dan beliau adalah pelopor persatuan umat⁵⁶.

Demikianlah uraian mengenai latar belakang keluarga, pendidikan dan riwayat Hasyim Asy'ari, maka dalam bab berikutnya akan diuraikan mengenai sejarah NU.



⁵⁶ *Ibid.*, hal. 131-132.

BAB III

LATAR BELAKANG DAN BERDIRINYA NU

A. Kondisi Islam Sebelum Tahun 1926

Islamic revivalism yang tumbuh dan berkembang pada akhir abad ke-19 dan pertengahan abad ke-20 tidaklah homogen. Pertama, yang terlepas dari ikatan pola pikiran empat mazhab dan pengikut berikutnya. Kedua, mereka yang meningkatkan peranan dan pemikiran Islam tanpa harus meninggalkan keterikatan mereka dengan pola pikiran empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nama-nama Mazhab tersebut berdasarkan nama-nama pendirinya yaitu Muhammad Ibn as-Syafi'i (lahir 150 H/767 M, wafat 204 H atau 830 M), Abu Hanafiah (wafat 150 H/767 M) Malik Ibn Annas (wafat 179 H/795 M) dan Ahmad Ibn Hambal (wafat 241 H/855 M).⁵⁷

K. H. Hasyim Asy'ari belajar di Mekkah di saat Syaikh Muhammad Abduh sedang giat-giatnya melancarkan gerakan pembaharuan pemikiran Islam. Buah pikiran Muhammad Abduh sangat mempengaruhi proses perjalanan umat Islam selanjutnya. Menurut Deliar Noer, ide-ide reformasi Islam yang dianjurkan oleh Muhammad Abduh di Mesir telah menarik perhatian mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di Mekkah. Pada waktu itu salah seorang yang menjadi imam Masjidil Haram untuk para penganut mazhab Syafi'i ialah Syaikh Ahmad Khatib dari Minangkabau sebagai seorang guru besar yang terkenal di Mekkah dan juga mengajar mahasiswa-mahasiswa dari Indonesia. Adapun murid-

⁵⁷ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. 6.

murid Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang kemudian menjadi ulama terkenal antara lain: Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan lain-lainnya. Pada masa gerakan reformasi Islam banyak murid-murid Syaikh Ahmad Khatib Minangkabau yang tertarik dengan pikiran-pikiran Muhammad Abduh. Syaikh Ahmad Khatib sendiri seorang tokoh yang kontroversial, tidak menyetujui buah pemikiran Muhammad Abduh yang menganjurkan umat Islam melepaskan diri dari anutan-anutan empat mazhab. Tetapi disisi lain ia menyetujui gerakan untuk melenyapkan segala bentuk praktek tarekat. Banyak murid Syaikh Ahmad Khatib yang tertarik dengan pikiran Muhammad Abduh pergi ke Mesir untuk melanjutkan pelajaran mereka di Universitas Al-Azhar dan universitas-universitas lain. Dan kembalinya ke Indonesia, mereka mengembangkan ide-ide reformasi Muhammad Abduh itu. Adapun ide-ide reformasi Muhammad Abduh antara lain :

1. Mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam.
2. Reformasi pendidikan Islam di tingkat Universitas.
3. Mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern, dimaksudkan agar Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lapangan sosial, politik, dan pendidikan.

Dengan alasan inilah Muhammad Abduh melancarkan ide agar umat Islam melepaskan diri dari keterkaitan mereka kepada pola pikiran para mazhab dan agar umat Islam meninggalkan segala bentuk praktek tersebut.

Beberapa murid Syaikh Ahmad Khatib yang mendukung beberapa aspek pikiran Muhammad Abduh, sekembalinya ke Indonesia menyebarkan ide-ide reformasi melalui berbagai organisasi. Sedangkan beberapa murid lainnya tetap mempertahankan pegangan mereka kepada Mazhab. Guru Besar yang sangat mempengaruhi jalan pikiran Kiai Hasyim Asy'ari ialah Syaikh Mahfudh at-Tarmizi, yang mengikuti tradisi Syaikh Nawawi dan Syaikh Sambas. Ketegangan Kiai Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan ajaran-ajaran Mazhab dan pentingnya praktek-praktek tarekat sejalan dengan pandangan guru-gurunya sewaktu berada di Mekkah. Sebenarnya Kiai Hasyim Asy'ari juga menerima ide-ide Muhammad Abduh agar umat Islam melepaskan diri dari keterikatannya dengan para Mazhib. Kiai Hasyim Asy'ari tidak menganggap bahwa semua bentuk praktek keagamaan waktu itu salah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Dan dalam hal mazhab, tidak mungkin untuk memahami maksud dari ajaran-ajaran Qur'an dan Hadits tanpa mempelajari pendapat-pendapat para ulama besar yang bergabung dalam sistem mazhab, karena hanya akan menghasilkan pemutar-balikkan dari ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya.⁵⁸

Selama abad ke-19 Indonesia mengalami efek pengaruh Barat yang membawa akibat ganda sekaligus yaitu alienasi politik dan kemerosotan ekonomi yang semakin buruk. Pemerintah kolonial Belanda dalam usaha menunjang kebutuhan dalam negerinya menerapkan politik kerja paksa untuk menanamkan tanaman ekspor kepada para petani di Indonesia yang dikenal dengan tanam paksa (1830-1870) dan disusul para pemodal besar mengembangkan usahanya

⁵⁸ *Ibid.*, hal. 7-9.

memasukkan barang-barang hasil produksi industri Belanda ke Indonesia sekaligus menanamkan modal mereka dengan membuka perkebunan besar untuk diekspor hasilnya ke luar negeri.⁵⁹

Situasi ini membawa akibat disintegrasi dan keresahan sosial yang hampir merata di seluruh Indonesia. Perang Diponegoro (1825-1830), Perang Aceh (1873-1912), Perang Paderi (1821-1838), serta pemberontakan petani Banten merupakan sebagian fenomena di atas. Walaupun pada umumnya pemberontakan-pemberontakan itu dapat dipadamkan melalui operasi militer pemerintah kolonial, namun para petani tidak puas. Akibatnya rasa ketidakpuasan itu berubah menjadi sikap anti pemerintah asing yang “kafir” setelah mereka memperoleh legitimasi kepemimpinan para ulama. Seiring dengan gerakan perlawanan yang menyertai keresahan sosial di banyak tempat itu bermunculan pula gerakan kebangkitan kembali agama yang menampakkan diri dalam bentuk sekolah-sekolah dan perkumpulan tarekat di banyak tempat di seluruh Jawa dan luar Jawa.⁶⁰

Menghadapi situasi ini, Belanda kemudian mengubah kebijaksanaan politik dengan menerapkan politik etis antara lain menyediakan pendidikan Belanda kepada penduduk pribumi. Tetapi, akses ke sekolah ini hanyalah untuk anak-anak pegawai tinggi (priyayi), sementara sebagian rakyat tertinggal dan elite santri di pihak lain. Akibatnya, peran para pemimpin pribumi merosot tajam sehingga memperlebar jarak antara masyarakat biasa dengan penguasa lokal. Perpecahan ini tampak sekali pada paruh pertama abad ke-20.

⁵⁹ M. Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama Dan Islam Di Indonesia Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1994, hal. 38.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 39.

B. Pertentangan antara Kaum Tradisionalis dan Modernis

Masuknya faham pembaharuan di Jawa khususnya, dan di Indonesia umumnya diawali oleh semakin banyaknya umat Islam Indonesia yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci sejak dibukanya Terusan Suez pada tahun 1869. Bersamaan dengan itu di Timur Tengah sedang merebak ajaran pembaharuan yang diilhami oleh gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad Abduh Wahab (1703-1787) pada akhir abad XVIII.⁶¹ Kebangkitan Gerakan Wahabi di abad XX tidak bisa dilepaskan dari Muhammad Abduh dan Pan Islamisme-nya Al-Afghani. Gerakan Abduh yang bersemboyan kembali pada Qur'an dan Sunnah ini cepat berkembang di Timur Tengah, tidak kecuali di tanah Hijaz (Arabia). Karenanya terjadi kontak antara jamaah haji Indonesia dengan gerakan pembaharuan tersebut. Sekembalinya dari tanah suci sebagian mereka ada yang menyebarkan gagasan tersebut di daerah masing-masing. Oleh karena itu mulailah berkembang faham kembali kepada Qur'an dan Sunnah di Nusantara pada permulaan abad XX.

Ide pembaharuan Muhammad Abduh dan faham Wahabi pada prinsipnya menghendaki reformasi dan pemurnian ajaran Islam dengan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah serta berupaya memberantas bid'ah serta adat-istiadat yang tidak selaras dengan syariah Islam.⁶² Prinsip itu pulalah yang dipegang oleh kaum pembaharu di Indonesia.

⁶¹ Slamet Effendy Yusuf, dkk, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal*, CV. Rajawali: Jakarta, 1983, hal. 12.

⁶² Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah Dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 3.

Gerakan pembaharuan di Indonesia yang paling kelihatan adalah di daerah Minangkabau dan di Jawa. Sedangkan yang berhubungan erat dengan kelahiran NU adalah di Jawa. Di Jawa gerakan pembaharuan melahirkan dua organisasi yang berbeda visinya yakni Sarekat Islam (SI) dan Muhammadiyah. SI bervisi politik dan Muhammadiyah bervisi agama dengan sarana sosio kultural.⁶³

Muhammadiyah didirikan oleh K. H. Ahmad Dahlan, merupakan seorang alim yang tinggal di Yogyakarta yang pada tahun 1902 melaksanakan ibadah haji dan mendalami ajaran Islam. Di Mekkah Ahmad Dahlan mendapat pengaruh pemikiran Abduh dan Ibnu Taimiyah yang dipublikasikan lewat majalah *Al-Urwatul Wutsqa* tafsir *Al-Manar*. K. H. Ahmad Dahlan tertarik dengan pemikiran Abduh untuk memajukan umat Islam melalui jalur pendidikan.

Pada tahun 1905 K. H. Ahmad Dahlan mulai mengenalkan gagasan-gagasan yang bercorak pembaharuan. Akhirnya gagasan-gagasan tersebut pada tahun 1912 dikristalisasikan dalam bentuk formal dengan lahirnya Muhammadiyah. Di samping Muhammadiyah sebenarnya masih ada organisasi pembaharu lainnya yang sama-sama dipengaruhi oleh ide Abduh dan Wahabi yakni *Al-Irsyad* yang didirikan oleh Ahmad Soorkati pada tahun 1913 dan *Persatuan Islam (Persis)* yang didirikan oleh A. Hasan.⁶⁴

Kehadiran Muhammadiyah ini mendapat dukungan yang luas. Beberapa organisasi Islam banyak yang meleburkan diri dalam Muhammadiyah, misalnya

⁶³ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Erlangga: Jakarta, 1992, hal. 7-8. Lihat juga Einar Martahan Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, Pustaka Sinar Harapan: Jakarta, 1989, hal. 27.

⁶⁴ Slamet Effendy Yusuf, dkk, *Dinamika Kaum Santri: Menelusuri Jejak dan Pergolakan Internal*, CV. Rajawali: Jakarta, 1983, hal. 13.

Al-Hidayah Garut, Nurul Islam Pekalongan serta masih banyak lagi. Pesatnya perkembangan gerakan pembaharuan ternyata kurang dapat diterima oleh para ulama pesantren pada waktu itu, sebab dengan makin gencarnya gerakan pembaharuan dengan semboyan kembali pada Qur'an dan Sunnah bisa menjadi ancaman terhadap kelangsungan tradisi Ahlusunnah waljamaah, faham yang dipegang kiai pesantren. Kendatipun perbedaan sesungguhnya hanyalah pada masalah furu saja.⁶⁵ Martin van Bruinessen menggambarkan kritik-kritik kaum pembaharu terhadap praktek-praktek keagamaan kaum tradisional itu antara lain tentang amalan dan kepercayaan yang dinyatakan sebagai "bid'ah", bukan ajaran asli Islam.⁶⁶

Lebih jauh lagi golongan modernis juga mengkritik pengetahuan tekstual kiai terutama fiqh. Menurut kaum pembaharu, fiqh banyak mengandung bid'ah dan menuntut sikap taqlid karenanya mereka menolak taqlid dan menganjurkan kembali kepada sumber asli yakni Al-Qur'an dan Hadits yang harus diinterpretasikan melalui penalaran bebas (ijtihad) oleh ulama yang memenuhi syarat.⁶⁷

Untuk menghadapi itu salah seorang ulama pesantren Kyai Haji Abdul Wahab Hasbullah membentuk forum diskusi yang diberi nama Taswirul afkar (potret pemikiran) pada tahun 1924 di Surabaya.⁶⁸ Lahirnya Taswirul Afkar sebenarnya merupakan respon langsung terhadap Faqih Hasyim pedagang dan

⁶⁵ Khoiril Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 4.

⁶⁶ Martin van Bruinassen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Usaha Pencarian Wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 24-25.

⁶⁷ *Ibid.*, hal. 25.

⁶⁸ Khoiril Fathoni, *op.cit.*, hal. 4.

penyebar aktif faham reformis asal Minangkabau.⁶⁹ Taswirul Afkar umumnya dianggap sebagai cikal bakal NU karena memang dalam organisasi inilah para kiai sefaham berkomunikasi dan terbentuk ikatan solidaritas yang kuat antar mereka.

Untuk menyelesaikan pertentangan antara kaum pembaharu dan kaum tradisional, SI di bawah Cokroaminoto memprakarsai diadakannya kongres umat Islam. Kongres dimaksudkan untuk mencari titik temu agar bisa berdamai dan tidak mengganggu perjuangan melawan penjajah. Kongres ini berlangsung di Cirebon pada tanggal 31 Oktober-2 Nopember 1922 dengan nama Mukhtamar Alam Islami Hindi As Syarqiyah,⁷⁰ atau sering disebut Kongres Ali Islam I. Kongres ini nampaknya kurang berhasil untuk mempersatukan aliran dalam Islam dan mengurangi perselisihan akibat persoalan khilafiah (furu).⁷¹ Suasana kongres dikabarkan berlangsung tegang bahkan dari mereka saling kafir-mengkafirkan dan musrik-musrikkan.⁷² Sungguhpun begitu satu catatan penting dapat ditarik yaitu mereka berhasil membentuk Central Comitee Al Islam (CCI) suatu panitia khusus untuk menangani masalah perbedaan pendapat dalam hal khilafiah.⁷³ Kongres kedua berlangsung di Garut tetapi kelompok tradisional tidak hadir. Pada kongres ketiga yang dimulai dari tanggal 24-26 Desember mencapai kesepakatan bahwa masalah ijtihad (keharusan untuk mencari penyelesaian hukum-hukum agama)

⁶⁹ Martin van Bruinassen, *op.cit.*, hal. 27.

⁷⁰ Deliar Noer, *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta, 1996, hal. 247.

⁷¹ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia: Jakarta, 1994, hal. 47.

⁷² M. Mansyur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Al Amin Press: Yogyakarta, 1996, hal. 43.

⁷³ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 7.

masih tetap terbuka asalkan mengetahui dan memahami ijma serta asbabun nujul Al Qur'an.⁷⁴

C. Proses Berdirinya NU

Setelah Perang Dunia I kekuasaan Daulah Utsmani yang dipandang sebagai khalifah mengalami kegoncangan di mana kekuasaan Sultan Turki direbut oleh kaum nasionalis yang dipimpin Mustafa Kemal. Pada tahun 1922 kekuasaan Sultan Turki digantikan oleh Abdul Majid yang diangkat oleh kaum nasionalis. Abdul Majid menjadi khalifah tetapi tidak diberi kewenangan dan kekuasaan politik. Akhirnya dua tahun kemudian kekuasaan khalifah dihapuskan dan Turki menjadi negara sekuler.⁷⁵

Penghapusan kekuasaan khalifah itu menyebabkan banyak masyarakat Muslim, terutama di dalam jajahan Inggris dan Belanda merasa terpukul dan kehilangan orientasi. Namun akhirnya umat Islam di Indonesia dan di dunia terbuka pikirannya untuk memikirkan masalah khilafah. Syeikh Azhar di Mesir misalnya, menanggapi hal itu dengan kaum Muslimin di Indonesia berkeinginan untuk hadir dalam kongres itu. Karena itu pada tanggal 4 Agustus 1924 diselenggarakan pertemuan di Surabaya yang dihadiri oleh SI, Muhammadiyah, Al Irsyad dan perhimpunan lainnya. Pertemuan ini memutuskan membentuk komite khilafah dan akan menyelenggarakan persidangan luar biasa Kongres Al

⁷⁴ *Ibid.*, hal. 7.

⁷⁵ Deliar Noer, *Gerakan Modernis Islam di Indonesia 1900-1942*, LP3ES: Jakarta, 1996, hal. 242.

Islam untuk mengirim delegasi ke Kairo.⁷⁶ Komite Khilafah ini diketuai Wondo Amiseno (SI) dan sebagai wakilnya Abdul Wahab Hasbullah.⁷⁷

Selanjutnya pada Kongres Al Islam ketiga di Surabaya pada bulan Desember 1924 diputuskan untuk mengirim delegasi ke Kongres Kairo yang terdiri dari Surjopranoto (SI), H. Fakhruddin (Muhammadiyah) dan Abdul Wahab Hasbullah (mewakili golongan tradisional). Delegasi ini gagal berangkat karena bersamaan dengan itu di Hijaz terjadi perebutan kekuasaan antara Syarif Husen dengan Abdul Azis Ibnu Sa'ud. Perebutan kekuasaan itu dimenangkan oleh Abdul Azis. Abdul Azis yang juga menginginkan jabatan khalifah memandang Kongres Kairo sebagai ancaman atas posisi barunya di Hijaz. Karena itu dia bermaksud menyelenggarakan kongres tandingan di Mekkah yang direncanakan pada bulan Juni-Juli 1926.⁷⁸

Dengan berkuasanya Ibnu Sa'ud maka terjadi polarisasi pandangan umat Islam di Indonesia khususnya di Jawa. Sebab bagaimanapun juga Ibnu Sa'ud dan pengikutnya adalah penganut ajaran Wahabi. Kelompok Wahabi terkenal dengan sikap kerasnya terhadap segala sesuatu yang berbau pemujaan kepada wali dan orang yang sudah meninggal. Mereka juga mengadakan penghancuran terhadap makam-makam keramat dan menghilangkan praktek-praktek keagamaan yang dianggap bid'ah.⁷⁹ Perilaku kaum Wahabi itu tentu saja membuat cemas golongan

⁷⁶ M. Ali Haidar, *Nahdatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik*, Gramedia: Jakarta, 1994, hal. 55.

⁷⁷ M. Mansyur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Al Amin Press: Yogyakarta, 1996, hal. 45.

⁷⁸ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Usaha Pencarian wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 30.

⁷⁹ *Ibid.*, hal. 32.

tradisional di Indonesia di pihak lain membawa angin segar bagi gerakan kaum pembaharu.

Sebelum Kongres Al Islam ke empat dilakukan, datang undangan dari Ibnu Sa'ud untuk menghadiri Kongres Mekkah (Hijaz). Masalah ini akhirnya dibahas dalam Kongres Al Islam ke empat pada bulan Agustus 1925. Dalam kongres ini ternyata didominasi oleh kelompok modern (pembaharu) sehingga tidak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan Islam tradisional. Yang terjadi dalam kongres itu justru perselisihan tentang kongres mana yang harus dihadiri namun tanpa membawa keputusan yang jelas.

Abdul Wahab Hasbullah sebagai wakil dari kelompok Islam tradisional menghendaki agar delegasi yang dikirim ke Mekkah meminta jaminan dari Ibnu Sa'ud untuk menghormati mazhab-mazhab fiqh ortodoks dan memperbolehkan praktek-praktek keagamaan tradisional dan tidak melarang praktek tarekat dan ziarah ke makam orang-orang suci di dalam dan sekitar Mekkah.

Keinginan seperti itu tidak disetujui oleh kaum pembaharu, mereka tidak bersedia meminta kepada Ibnu Sa'ud agar melindungi praktek-praktek tradisional tersebut. Hal ini memperburuk hubungan antara kaum Muslimin tradisional dengan pembaharu di Indonesia.

Selanjutnya sebelum kongres Al Islam I yang direncanakan diadakan di Bandung pada tanggal 6 Februari 1926, kaum pembaharu mengadakan kongres sendiri di Cianjur untuk mengirimkan delegasi ke kongres Mekkah. Delegasi

terdiri dari Tjokroaminoto (SI) dan Mas Mansur (Muhammadiyah)⁸⁰ sebagai kelompok modernis.

Karena kelompok tradisional tidak mendapat kesempatan maka atas inisiatif Wahab Hasbullah mereka mengadakan pertemuan sendiri. Pertemuan dengan beberapa ulama itu bertujuan membahas pengiriman delegasi ke Kongres Mekkah. Pada tanggal 31 Januari 1926 di rumah Abdul Wahab Hasbullah dibentuk suatu komite yang disebut Komite Hijaz.⁸¹

Dibentuknya komite Hijaz merupakan reaksi atas sikap kaum pembaharu yang tidak mau meminta jaminan kepada Ibnu Sa'ud agar melindungi praktek-praktek keagamaan tradisional. Pembentukannya diprakarsai oleh Abdul Wahab Hasbullah. Tujuan komite ini ialah mengirim delegasi ke Kongres Mekkah dan dalam pertemuan para ulama terkemuka.⁸²

Tujuan itu dapat terlaksana pada tanggal 31 Januari 1926, para ulama terkemuka dipimpin K. H. Hasyim Asy'ari datang ke Kertopaten Surabaya dan sepakat menunjuk K. H. Raden Asnawi (Kudus) sebagai delegasi Komite Hijaz. Setelah itu timbul pertanyaan siapa yang berhak mengirim delegasi itu. Maka atas inisiatif K. H. Mas Alwi diusulkan nama Nahdlatul Ulama sebagai ganti bagi Komite Hijaz, sehingga secara resmi Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau 16 Rojab 1344 H.⁸³

Adapun materi yang disampaikan Komite Hijaz kepada Ibnu Sa'ud adalah:

⁸⁰ Mansyur Amin, *op.cit.*, hal. 48.

⁸¹ *Ibid.*, hal. 49.

⁸² Choirul Annam, *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 54.

⁸³ *Ibid.*, hal. 54. Lihat juga Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Al Maarif: Bandung, 1981, hal. 609-610.

1. Meminta kepada Raja Ibnu Sa'ud agar tetap memperbolehkan kebebasan bermazhab.
2. Memohon tetap diramaikannya tempat-tempat bersejarah karena tempat tersebut telah diwakafkan untuk masjid seperti: tempat kelahiran Siti Fatimah, bangunan Khaizuran dan lain-lain.
3. Mohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia setiap tahun sebelum jatuhnya musim haji mengenai hal ikhwal haji, baik ongkos haji, perjalanan keliling Mekkah maupun tentang syekh.
4. Mohon hendaknya semua hukum di negeri Hijaz ditulis sebagai undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hanya karena belum ditulisnya undang-undang tersebut.
5. Mohon jawaban tertulis yang menjelaskan bahwa utusan telah menghadap Raja Ibnu Sa'ud dan sudah menyampaikan usul tersebut.⁸⁴

Sebenarnya keinginan mendirikan organisasi yang mewadahi para ulama tradisional ini telah ada sejak tahun 1924. Waktu itu K. H. Wahab Hasbullah telah menyampaikan kepada K. H. Hasyim Asy'ari, namun beliau belum menyetujui. Beliau baru meyetujui setelah ada desakan-desakan perlunya organisasi itu dan setelah mendapat restu dari K. H. Kholil dari Madura.⁸⁵

Menurut Statuten Perkoempoelan NU 1926 pasal 1 NU mengandung arti “kebangkitan ulama” sebagai gerakan serentak para ulama dalam suatu arahan

⁸⁴ *Ibid.*, hal. 609-610.

⁸⁵ Kacung Marijan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*, Erlangga: Jakarta, 1992, hal. 17.

yang terorganisasi.⁸⁶ NU mendapat pengakuan dari Gubernur Jendral Hindia Belanda pada tanggal 6 Februari 1930.⁸⁷

D. Perkembangan NU pada Masa Hasyim Asy'ari

Memperjuangkan hak hidup suatu perhimpunan (Jam'iyah) pada jaman penjajahan memerlukan syarat kepemimpinan yang berwibawa, bijaksana dan kesabaran. Bersikap keras terhadap penguasa kolonial tanpa memperhitungkan kekuatan sendiri dan kesiapan pengikut hanya akan membawa kepunahan serta bencana, apalagi dengan mengorbankan prinsip pastilah akan dijauhi massa (santri) dan tak akan mendapat pengikut setia.

Sebelum Nahdlatul Ulama didirikan sebagai suatu organisasi, para alim ulama telah lama berperan sebagai pembimbing umat menuju tercapainya izzul Islam wal muslimin.⁸⁸ Nahdlatul Ulama adalah suatu Jamiyah (perhimpunan, organisasi) yang lahir di tengah-tengah kemegahan orang-orang yang sedang berkuasa dan bukan di tengah-tengah berkecamuknya konflik politik. Jami'yah ini lahir ditengah-tengah kebangkitan aspirasi pondok pesantren di antara kiai dan santri-santrinya yang terpencil dan jauh dari jangkauan penguasa dan pemimpin politik.

Hadratus Syeh K. H. Hasyim Asy'ari, pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng (Jombang) yang pada waktu itu telah menjabat rois (akbar) adalah seorang ulama besar yang mempunyai wibawa dan pengaruh terhadap pondok-

⁸⁶ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Usaha Pencarian wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 41.

⁸⁷ van Hoeven, *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*, PT. Ikhtiar Baru: Jakarta, 1993, hal. 352.

⁸⁸ Martin van Bruinessen, *op.cit.*, hal. 25.

pondok pesantren sehingga Rois Akbar Hadratus Syeh K.H. Hasyim Asy'ari merupakan daya tarik mereka untuk memasuki Jami'yah Nahdlatul Ulama.

Komposisi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama terdiri dari Badan Syariah dan Badan Tanfidziyah. Meskipun tokoh-tokoh dari Badan Tandfidziyah secara resmi organisator memimpin perjuangan ke dalam dan keluar, tetapi yang melakukan suatu kebijaksanaan adalah dari tokoh-tokoh Badan Syariah yang dipimpin oleh Rois Akbar Haldratus Syeh K. H. Hasyim Asy'ari. Nahdlatul Ulama harus bersumber pada aqidah dan himmah Islam, yang disebut juga dengan Ahlussunnah Wa-Jama'ah. Yang paling kompeten untuk menetapkan hukum Islam dalam Nahdlatul Ulama adalah Badan Syariah. Di dalam badan ini K. H. Hasyim Asy'ari mempunyai peranan yang menentukan.⁸⁹

Dari mulai berdirinya sampai tahun limapuluhan Nahdlatul Ulama bergerak sepenuhnya sebagai suatu Jam'iyah, suatu organisasi sosial Islam yang lebih menitikberatkan pada aspek-aspek pendidikan, da'wah dan sosial kemasyarakatan, meskipun tidak pernah ketinggalan dalam kegiatan-kegiatan sosial politik yang dialami oleh bangsa Indonesia dalam tahap-tahap perjuangannya, baik dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, dalam batas-batas yang sesuai dengan bentuk Jam'iyah sebagai organisasi massa non politik (praktis).⁹⁰

Di bawah kepemimpinan K. H. Hasyim Asy'ari, dalam waktu yang relatif singkat NU berkembang sangat pesat dan spektakuler. Berbagai kemajuan telah

⁸⁹ Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup dan Pengabdiannya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumen Sejarah Nasional: Jakarta, 1985, hal. 78-80.

⁹⁰ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah: Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 98.

berhasil dicapai organisasi ini. Sementara pertumbuhan jumlah anggota dan simpatisan NU, juga berkembang luar biasa. Perkembangan NU pada masa penjajahan dimulai dengan dilaksanakannya berbagai muktamar. Tujuannya adalah tidak lain untuk mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaan program kerja organisasi yang telah disepakati. Seperti membicarakan masalah keagamaan, masalah sosial kemasyarakatan, sampai kepada masalah perjuangan politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Muktamar NU pertama kalinya diadakan di Surabaya pada tanggal 21-23 September 1926. Pada muktamar itu dibahas mengenai masalah mazhab, keputusannya adalah mengharuskan bagi umat Islam untuk mengikuti salah satu dari empat mazhab dalam menjalankan ajaran Islam.⁹¹ Muktamar pertama juga berhasil menciptakan lambang NU,⁹² yang berbentuk bola dunia dengan dilingkari seutas tampar dan sembilan bintang.⁹³

Muktamar NU kedua diadakan di Surabaya pada tanggal 9-11 Oktober 1927 dengan dihadiri 146 ulama dan 242 orang pengusaha, petani dan buruh. Dalam muktamar itu NU menuntut agar pemerintah melakukan pengawasan terhadap perkawinan di bawah umur dan yang dijadikan penghulu hendaknya memperoleh persetujuan dari ulama.⁹⁴

Muktamar NU ketiga dilaksanakan tanggal 28-30 September 1928 yang dihadiri oleh 35 cabang NU se-Jawa dan Madura. Dari jumlah pesertanya kelihatan bahwa mulai muktamar itu perkembangan NU semakin pesat. Dalam

⁹¹ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Al-Amin Press: Yogyakarta, 1996, hal. 62.

⁹² Lihat lampiran II, hal. 96.

⁹³ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *op.cit.*, hal. 26.

⁹⁴ M. Masyhur Amin, *op.cit.*, hal.63.

muktamar berhasil membentuk Lajnah An-Nashihin untuk mengembangkan NU ke berbagai daerah.⁹⁵

Muktamar NU keempat di Semarang tanggal 17-20 September 1929 dengan dihadiri oleh 63 cabangnya se-Jawa dan Madura.⁹⁶ Mulai muktamar itulah NU berkembang di luar Jawa Timur dan cabangnya di daerah Jawa Tengah dan Jawa Barat sudah mulai mengalami kenaikan.

NU pada muktamar-muktamar berikutnya sudah mendapatkan tempat berpijak di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan.⁹⁷ Hal itu menunjukkan keinginannya untuk menjadi organisasi berskala nasional dan menyelenggarakan muktamarnya di berbagai wilayah di Indonesia mulai kelihatan. Terbukti pada muktamarnya V diadakan di Pekalongan (1930), Muktamarnya NU VI di Cirebon (1931), Muktamar NU VII di Bandung (1932), dan Muktamar NU VIII di Jakarta (1933). Salah satu hasil dari muktamar tersebut adalah banyaknya dukungan dari para ulama dan berdirinya cabang-cabang NU di berbagai daerah.⁹⁸

Muktamar NU IX di Banyuwangi tanggal 21-26 April 1934 adalah muktamar yang merupakan titik awal sejarah perkembangan NU. Hal itu karena pertama, mulai diperkenalkan mekanisme kerja baru yaitu pemisahan antara Syuriyah dengan Tanfidiyah. Keduanya mengadakan sidang sendiri-sendiri dengan permasalahan masing-masing.⁹⁹ Kedua, sejak muktamar itu tata cara

⁹⁵ *Ibid.*, hal. 64.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 65.

⁹⁷ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Usaha Pencarian Wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 49.

⁹⁸ M. Masyhur Amin, *op.cit.*, hal. 65.

⁹⁹ Choirul Anam, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan NU*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 89.

persidangan mulai diperbaharui. Ketiga, mulai nampak peran tokoh muda NU yang berpandangan luas seperti Mahfudz Siddiq, wahid Hasyim, Thohir Bakri, Abdullah Ubaid, dan lain-lain. Sejak itulah titik berat aktivitas NU mulai tertuju pada usaha untuk melibatkan diri pada perjuangan bangsa Indonesia. NU juga mulai memperhatikan kaum mudanya, oleh karena itu berbagai organisasi pemuda yang seaspirasi dengan NU digabungkan dalam satu wadah yang dikenal dengan Anshor Nahdlatul Ulama (ANO) yang dipimpin Thorir Bakri.¹⁰⁰

Muktamar NU X di Solo tahun 1935 mencatat bahwa anggota NU yang sudah terdaftar sebanyak 67.000 orang dari cabangnya di seluruh Indonesia. Pada muktamar itulah secara terang-terangan NU menentang kebijaksanaan Pemerintah Belanda. Hal itu membuat pemerintah Belanda semakin ketakutan. Bahkan pada muktamarnya XI tahun 1935 sebuah organisasi lokal di Kalimantan yaitu Hidayatul Islamiyah bergabung dalam NU.¹⁰¹ Pada muktamarnya XII (1937) di Malang jumlah cabang NU semakin melonjak menjadi 84 buah dan tiga cabang baru di Sumbawa Besar dan Palembang.¹⁰²

Semakin hari perjalanan NU semakin menunjukkan kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang. Semua itu tentunya tidak bisa dipisahkan dari pengaruh pribadi K. H. Hasyim Asy'ari yang karismatik. Kehadiran K. H. Hasyim Asy'ari dalam berbagai aktivitas NU, memberikan dorongan dan kebanggaan tersendiri bagi anggota NU. Semua itu membuat kecintaan para anggota NU semakin besar terhadap organisasinya. Tak pelak lagi, seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, cabang-cabang NU makin banyak bermunculan di

¹⁰⁰ *Ibid.*, hal. 90-91.

¹⁰¹ M. Masyhur Amin, *op.cit.*, hal. 66.

¹⁰² Choirul Anam, *op.cit.*, hal. 93.

berbagai tempat. Dan di tahun 1942, ketika pemerintah penjajahan Belanda bertekuk lutut kepada Jepang, sayap NU semakin lebih lebar lagi dengan memiliki 120 cabang yang bertebaran di berbagai kawasan di tanah air.¹⁰³

Berdasarkan pasal 8 Anggaran Dasar NU, kepengurusan NU terdiri dari 3 komponen pokok yaitu Mutasyar, Syuriyah dan Tanfidziyah. Mutasyar memiliki fungsi sebagai pembina, penasehat dan pembimbing kegiatan NU. Namun lembaga Mutasyar ini dibentuk hanya pada tingkat pengurus besar, wilayah dan cabang. Dengan demikian dalam kepengurusan NU tingkat ranting tidak diketemukan lembaga Mutasyar.

Sedangkan Syuriyah merupakan pimpinan tertinggi NU yang berfungsi sebagai pengelola, pengendali, pengawas dan penentu segala kebijaksanaan Jamiah NU. Selain itu Syuriyah juga mengemban kewenangan untuk membina, membimbing, mengarahkan, serta mengawasi seluruh kegiatan organisasi. Dalam Anggaran Rumah Tangga NU dirumuskan tugas dan kewenangan Syuriyah antara lain:

- a. Setiap awal tahun Hijriah memberikan pengarahan pada rapat pleno untuk menggambarkan program tahunan.
- b. Setiap akhir tahun Hijriah menerima dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dijalankan Tanfidziyah.
- c. Berhak membatalkan segala keputusan yang dinilai bertentangan dengan Islam.

¹⁰³ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah II Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala: Yogyakarta, 1992, hal. 28.

Di bawah Syuriah adalah Tanfidziyah yang berfungsi sebagai pelaksana sehari-hari. Oleh karena itu Tanfidziyah harus menjalankan petunjuk dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Syuriah. Tanfidziyah bisa juga disebut sebagai lembaga eksekutif.¹⁰⁴

Pada awal berdirinya NU, telah terbentuk susunan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama pertama,¹⁰⁵ yaitu : ketua K. H. Muhammad Hasyim Asy'ari, wakil K. H. Dachlan Achyad dan anggota-anggotanya.¹⁰⁶

Di dalam sistem kepengurusan NU, terdapat tingkatan yang sesuai dengan ruang lingkup wilayahnya. Struktur hierarki ini bertujuan agar lebih mudah di dalam menggerakkan kiprah NU di masyarakat pada lapisan yang paling bawah sekalipun. Adapun struktur kepengurusan NU ini meliputi :

1. Pengurus Besar untuk tingkat pusat.
2. Pengurus Wilayah untuk tingkat propinsi.
3. Pengurus Cabang untuk tingkat kabupaten atau kotamadya.
4. Pengurus Majelis Wakil Cabang untuk tingkat kecamatan.
5. Pengurus Ranting untuk tingkat desa atau kelurahan.

Dalam organisasi NU, dikenal adanya berbagai tingkatan jenis keanggotaan. Adapun tingkatan jenis keanggotaan NU terdiri dari :

- a. Anggota biasa yaitu setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam, yang berhaluan Ahlussunnah Wal Jamaah dengan mengikuti salah satu dari *al-*

¹⁰⁴ *Ibid.*, hal. 14.

¹⁰⁵ Lihat lampiran III, hal. 97.

¹⁰⁶ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Usaha Pencarian Wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 49301-302..

madzabul arba'ah (empat mazhab), serta menyetujui asas, aqidah dan sanggup melaksanakan semua keputusan NU.

- b. Anggota kehormatan, yaitu setiap orang yang dinilai telah berjasa kepada NU. Untuk menjadi anggota kehormatan NU, penetapannya harus disetujui oleh rapat pengurus Besar NU.

Sumber keuangan NU, berasal dari dua sektor yaitu dari iuran anggota dan donatur. Setiap anggota NU diwajibkan membayar iuran bulanan atau iuran tahunan. Di samping dari iuran anggota, sumber keuangan NU juga berasal dari donatur, sumbangan yang sifatnya tidak mengikat dan berbagai usaha lain yang halal serta tidak bertentangan dengan Islam.¹⁰⁷

Dalam sistem organisasi NU, terdapat berbagai macam bentuk permusyawaratan. Permusyawaratan ini merupakan wahana atau ajang pengambilan keputusan, yang menyangkut berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan arah program organisasi. Bentuk permusyawaratan di dalam NU, memiliki peringkat yang hierarkis dan kekuatan hukum yang dihasilkannya juga menyesuaikan peringkatnya. Artinya semakin tinggi tingkatan permusyawaratan, maka semakin tinggi pula kekuatan hukum yang dihasilkannya.

Peringkat permusyawaratan di dalam NU sebagai berikut :¹⁰⁸

- a. Mukhtamar

Mukhtamar adalah lembaga permusyawaratan yang tingkatnya paling tinggi di dalam NU. Mukhtamar ini diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan hanya Pengurus Besar yang berhak menyelenggarakannya. Dalam mukhtamar ini

¹⁰⁷ Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *op.cit.*, hal. 15.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hal. 16-18.

Pengurus Besar mengadakan evaluasi pelaksanaan program selama 5 tahun mendatang. Di samping itu muktamar juga membahas tentang masalah hukum fiqih, program dasar NU untuk jangka waktu 5 tahun berikutnya, dan membahas berbagai masalah yang berhubungan dengan agama serta kemaslahatan umat.

Selain bentuk muktamar yang lazimnya dilaksanakan 5 tahun sekali, NU mengenal pula adanya muktamar “luar biasa”. Muktamar ini bisa dilakukan, jika dianggap ada masalah yang penting sementara jadwal muktamar yang definitif jangka waktunya masih lama.

b. Konferensi Besar

Konferensi Besar merupakan lembaga permusyawaratan yang peringkatnya berada di bawah muktamar. Konferensi ini diadakan oleh Pengurus Besar paling sedikit 1 (satu) kali di antara dua muktamar. Dalam konferensi, materi yang dibicarakan meliputi pelaksanaan keputusan muktamar, dan berbagai macam hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan program jamiah NU.

c. Konferensi Wilayah

Konferensi wilayah merupakan lembaga permusyawaratan tertinggi untuk tingkat wilayah (propinsi). Konferensi wilayah diadakan sekali dalam empat tahun, dengan agenda pembahasan mamilih kepengurusan baru periode berikutnya, mengevaluasi pelaksanaan program kepengurusan, dan membahas berbagai masalah keagamaan kemasyarakatan yang sedang dihadapi. Di samping itu dalam konferensi wilayah juga dibicarakan tentang program kerja bagi pengurus periode berikutnya, yang sejalan dan selaras dengan keputusan muktamar NU.

d. Konferensi Cabang

Konferensi cabang adalah bentuk permusyawaratan tertinggi pada tingkat cabang (kabupaten atau kotamadya) yang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Dalam konferensi ini dibahas mengenai evaluasi program kerja pengurus lama, memilih pengurus baru untuk periode berikutnya, dan membahas masalah program kerja kepengurusan berikutnya terutama masalah sosial dan keagamaan yang dihadapi di tingkat cabang.

e. Konferensi Majelis Wakil Cabang

Konferensi Majelis Wakil Cabang merupakan bentuk permusyawaratan tertinggi di tingkat kecamatan. Diadakan minimal 1 (satu) kali dalam dua tahun, dengan acara mengevaluasi berbagai program yang telah dijalankan oleh pengurus, memilih pengurus baru untuk periode berikutnya, dan merencanakan program yang akan datang.

f. Rapat Anggota

Rapat anggota yakni lembaga permusyawaratan tertinggi untuk tingkat Ranting (desa atau kelurahan). Rapat anggota ini dilangsungkan minimal dua tahun sekali, dengan acara laporan pertanggungjawaban pengurus lama dan pemilihan pengurus baru. Selain itu dibahas pula berbagai masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang muncul, serta bagaimana strategi yang tepat untuk mengantisipasi.

g. Musyawarah Nasional Alim Ulama

Musyawarah Nasional Alim Ulama diselenggarakan oleh Pengurus Besar NU, sedikitnya 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan. Materi yang

dibahas di dalam musyawarah nasional alim ulama berkaitan dengan berbagai macam masalah keagamaan, hukum fiqih, dan sosial kemasyarakatan.

Agar pelaksanaan berbagai program kerja yang telah dicanangkan dapat berhasil efektif, dalam struktur organisasi NU dibentuk berbagai macam badan otonom. Badan otonom ini berhak menyelenggarakan macam-macam aktivitas yang sesuai dengan bidang garapannya masing-masing. Adapun badan-badan otonom tersebut meliputi : Ma'arif (mengelola pendidikan di lingkungan NU), Mabarro (mengurus permasalahan sosial), serta Dakwah dan Ekonomi.

Di samping semua itu, NU juga memiliki berbagai macam organisasi yang kesemuanya berinduk kepada NU. Macam-macam organisasi tersebut meliputi :¹⁰⁹

a. Muslimat NU

Muslimat NU merupakan organisasi bagi ibu-ibu. Organisasi ini di dalam kegiatannya lebih menitik beratkan pada hal-hal kewanitaan, selain masalah sosial dan pendidikan. Organisasi muslimat NU mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri, serta berhak menyelenggarakan Konferensi Muslimat dengan tingkatan-tingkatan kepengurusan yang sama seperti dalam NU.

b. Fatayat NU

Fatayat NU yaitu organisasi otonom bagi wanita muda atau pemudi NU. Fatayat NU memiliki aktivitas di bidang kewanitaan, serta aktivitas sosial kemasyarakatan yang mendukung tujuan dan cita-cita NU. Organisasi ini mempunyai aturan tersendiri, dan lebih banyak berfungsi sebagai kaderisasi bagi kelangsungan NU.

¹⁰⁹ *Ibid.*, hal. 18-19.

c. Gerakan Pemuda Ansor

Gerakan Pemuda Ansor yakni gerakan pemuda NU yang mempunyai kegiatan sebagai kaderisasi, dengan program pengembangan masalah kepemudaan. Organisasi ini memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri, serta memiliki tingkat-tingkat kepengurusan mulai dari Pusat hingga ke Ranting.

d. Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU)

IPNU merupakan organisasi bagi pelajar putra NU yang bersifat otonom. Organisasi ini memiliki kegiatan di bidang pendidikan dan latihan pengkaderan seperti *Basic Training*, *Intermediate Training*, dan latihan ketrampilan lainnya. NU juga mempunyai tingkatan kepengurusan yang sama seperti NU, serta mempunyai aturan organisasi tersendiri.

e. Ikatan Pelajar Puteri Nahdlatul Ulama (IPPNU)

IPPNU yaitu organisasi bagi pelajar puteri NU. Organisasi ini memiliki kegiatan yang hampir serupa dengan IPNU, namun lebih banyak menitikberatkan pada masalah keputrian, pendidikan dan latihan ketrampilan. Sama dengan organisasi otonom lain di dalam NU, IPPNU juga mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sendiri. Selain itu IPPNU memiliki pula peringkat kepengurusan yang sama seperti NU, mulai dari tingkat Pusat sampai ketinggian Ranting.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkembangan Nahdlatul Ulama makin hari makin mengalami kemajuan. Kesemuanya itu tidak terlepas dari kewibawaan,

kebijaksanaan, keuletan dan kesabaran pengurus besarnya, di mana K. H. Hasyim Asy'ari duduk sebagai rois akbarnya.¹¹⁰

Setelah mengetahui sosok NU tentang pertumbuhan dan perkembangannya kemudian akan dibicarakan permasalahan mengenai sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU yang mana akan dibahas dalam bab selanjutnya.



¹¹⁰ Heru Sukadri, *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat dan Pengabdiannya*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Inventarisasi Dan Dokumentasi Nasional: Jakarta, 1985, hal. 83.

BAB IV
SUMBANGAN HASYIM ASY'ARI
DALAM ORGANISASI NU TAHUN 1926-1947

A. Masa Kolonial Belanda (1926-1942)

Peran K. H. Hasyim Asy'ari dalam pengembangan Nahdlatul Ulama sangatlah penting. Pada kenyataannya, beliau bisa dipandang sebagai arsiteknya. Beliau menulis aturan-aturan dasar organisasi ini (Qanun al-Asasi al-Nahdlatul Ulama) yang masih terus dipakai sebagai dasar ideologi Nahdlatul Ulama sampai kini. K. H. Hasyim Asy'ari tidak saja berperan utama dalam mengeluarkan fatwa-fatwa hukum mengenai berbagai masalah keagamaan yang diperdebatkan oleh banyak ulama, tetapi juga berperan dalam mempromosikan NU sebagai organisasi Nasional. Dalam kenyataannya, berkat karisma dan pengaruh beliau banyak kiai pesantren, para murid dan masyarakat mereka bergabung dan mendukung NU.¹¹¹ Faktor-faktor lain yang mendorong orang masuk NU adalah hubungan kekerabatan para pemimpin NU atau hubungan guru-murid dan kiai-masyarakat. Ikatan kekeluargaan di antara pesantren sangat mendukung perkembangan NU. Banyak juga orang tertarik dengan Nahdlatul Ulama karena ideologi tradisionalnya, misi sosialnya dan orientasi politiknya. Sebagaimana yang tercantum dalam prinsip-prinsip dasarnya, NU didirikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu, yaitu :

“untuk menghimpun ulama’ yang mengikuti ajaran-ajaran Mazhab; untuk meneliti kitab-kitab sebelum diajarkan di pesantren apakah ditulis oleh kalangan Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah atau Ahl al-Bid’ah; untuk mempromosikan agama

¹¹¹ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy'ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. 80.

Islam menurut empat mazhab Sunni dengan segala cara yang halal; berusaha memperbanyak jumlah madrasah Islam; memelihara hal-hal yang berhubungan dengan masjid, yatim dan miskin; dan membentuk badan-badan untuk meningkatkan pertanian (dan) perdagangan sesuai dengan hukum Islam.”¹¹²

K. H. Hasyim Asy'ari dalam berbagai kesempatan mengajak seluruh umat Islam untuk bergabung dengan NU : *‘Hai, orang-orang yang memalingkan diri dari Nahdlatul Ulama! Cepatlah bergabung dalam Nahdlatul Ulama; atau jika kalian merasa tertinggal, segeralah bergabung (dalam organisasi ini).’*¹¹³

K. H. Hasyim Asy'ari, seperti juga ulama tradisional lain di Indonesia, mendasarkan keputusan-keputusan beliau pada hukum Islam (fiqh) yang khususnya telah diinterpretasikan oleh seorang hakim dari mazhab Syafi'i, yaitu Syaikh Hasan Al-Hadrami, yang menulis *Bughyat al-Mustarshidin* (Keinginan Orang-orang yang mendapat Petunjuk). K. H. Hasyim Asy'ari menerima pendapat mazhab ini bahwa ada tiga macam negara: negara Islam (dar al-Islam), negara perang (dar al-harb) dan negara sanggah (dar al-sulh). Ciri utama negara Islam adalah ditegakkannya hukum dan nilai-nilai Islam (Syari'ah) sebagai hukum negara. Karena itu, negara Islam harus dipertahankan dari ancaman luar. Sebaliknya, negara perang atau negara anti-Islam adalah negara yang membahayakan negara Islam atau menghambat pelaksanaan ajaran Islam. Karena itu, negara ini harus diperangi. Jenis negara ketiga adalah negara damai atau negara sanggah yang merupakan tengah-tengah antara kedua tipe negara di atas. Dalam negara ini, hukum dan nilai-nilai Islam meski tidak menjadi hukum negara, dapat dilaksanakan oleh umat Islam dengan bebas. Menurut K. H. Hasyim

¹¹² *Ibid.*, hal. 81.

¹¹³ *Ibid.*, hal. 82.

Asy'ari, umat Islam harus juga mempertahankan negara jenis terakhir ini karena ia membiarkan umat Islam melaksanakan ajaran agamanya. Dalam kenyataannya, K. H. Hasyim Asy'ari menganggap Indonesia sebagai negara damai, meskipun ketika di bawah penjajahan Belanda karena negara ini “dulunya pernah diperintah oleh Kerajaan Islam, sebagian besar penduduknya juga masih memeluk Islam, dan Islam juga tidak diganggu atau diserang”.

Pendapat K. H. Hasyim Asy'ari yang menganggap Belanda dapat dipatuhi sepanjang mereka membiarkan umat Islam melaksanakan ajaran agamanya ini dipandang oleh sementara orang sebagai sikap yang oportunis. Pandangan ini diperkuat dengan kenyataan bahwa banyak kiai NU mengikuti doktrin politik. Sebagian aktivitas politik NU di masa lalu didasarkan pada keputusan Majelis Syuriah yang sering merujuk pada kitab kuning (kitab berbahasa Arab yang digunakan di pesantren) yang secara teoritis sangat kaku tapi dalam prakteknya sangat fleksibel.

Namun, perlu juga diketahui bahwa K. H. Hasyim Asy'ari dan NU juga beberapa kali berseberangan dengan pemerintah kolonial. Misalnya, beliau menolak sumbangan finansial dari pemerintah Belanda kepada Pesantren Tebuireng. Sikap oposisi juga terlihat ketika NU menolak duduk dalam lembaga perwakilan semu *Volksraad*, berdasarkan keputusan yang diambil pada muktamar ke-13 di Menes (Banten) pada 1938. Setahun kemudian, NU bersama organisasi Islam lain menolak pembatasan pelaksanaan pendidikan (Ordonansi Guru), dan menolak pelimpahan wewenang urusan harta warisan dari peradilan agama ke peradilan umum (*Landraad*), dan menolak berpartisipasi dalam milisia buatan

Belanda untuk mempertahankan Nusantara dari ancaman Jepang. NU juga menolak subsidi pemerintah kepada madrasah-madrasah dan meminta pemerintah kolonial untuk mempertahankan hukum, Artikel 177 dan 178 yang mengatur misi Kristen dan dakwah Islam.¹¹⁴

Ordonansi guru pertama dikeluarkan tahun 1905 yang mewajibkan setiap guru agama Islam meminta dan memperoleh ijin dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Kemudian ordonansi kedua diberlakukan pada tahun 1925 yang hanya mewajibkan guru untuk melaporkan diri.¹¹⁵ Ordonansi itu diberlakukan terhadap sekolah-sekolah pemerintah dan diperluas lagi pada sekolah-sekolah swasta tahun 1932 termasuk di dalamnya madrasah dan pesantren. Ternyata ordonansi tersebut tidak hanya berlaku untuk tugas guru agama atau mubaligh, tetapi juga pada penempatan bupati serta para bawahannya.¹¹⁶ Oleh karena itu dengan gigih NU memperjuangkan dicabutnya ordonansi guru karena hal itu banyak mengandung kekangan-kekangan dan pembatasan-pembatasan yang tidak jujur. Hal itu dibuktikan pada muktamarnya X tanggal 13-18 April 1935 di Solo tentang pengangkatan pejabat yang berwenang mengurus agama Islam. Terhadap pejabat yang akan memegang urusan agama maka NU akan membentuk badan sendiri untuk masalah tersebut. Melihat hal-hal yang akan dilakukan NU, maka semakin jelas bahwa NU sebagai organisasi sosial keagamaan menentang keras politik pemerintah Belanda yang akan menerapkan ordonansi guru dan menuntut untuk mencabut ordonansi itu.

¹¹⁴ *Ibid.*, hal. 84-86.

¹¹⁵ Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES: Jakarta, 1985, hal. 51.

¹¹⁶ Choirul Anam, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan NU*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 92.

Terhadap masalah pelimpahan wewenang urusan harta warisan dari peradilan agama ke peradilan umum (*Landraad*), NU tetap menolak. Terbukti pada muktamarnya keduabelas di Malang NU tetap mempersoalkan masalah penyerahan kekuasaan urusan waris dari raad agama kepada pengadilan negeri. Hal itu berarti perselisihan urusan waris tidak lagi diselesaikan berdasarkan hukum agama, tetapi justru hukum adat yang menjadi pegangannya.¹¹⁷ Melihat keadaan itu maka dalam muktamarnya tersebut NU tetap menolak, karena sebagai organisasi Islam NU tetap memperhatikan persoalan-persoalan yang menyangkut agama Islam dan harus berusaha membela kebenaran Islam.

Selain itu untuk menghadapi Perang Asia Timur Raya Pemerintah Kolonial Belanda ingin membentuk *Inheemse Militie* atau Milisi Bumiputera yaitu suatu undang-undang tentang kewajiban menjadi milisi. Maksud dari undang-undang itu adalah “bahwa setiap pemuda Indonesia yang berusia 18-25 tahun dikenakan wajib bela menjadi serdadu Sukarela.” Kewajiban bela diri ini terdiri dari dua badan yaitu badan *Stadswachter* (Pengawal Kota) dan Badan *Landswachter* (Pengawal Negeri).¹¹⁸ Adanya kewajiban menjadi milisi, NU dengan tegas menolak jika umat Islam dimasukkan ke dalamnya. Hal itu ditunjukkan dengan keputusan HBNU yang mengeluarkan siaran untuk ditujukan kepada semua pimpinan NU mengenai Milisi Bumiputera. Pokok-pokok isi siaran itu antara lain :

1. Warga NU terutama Ansor tidak perlu gelisah berlebihan agar tidak mematikan semangat bekerja dalam organisasi maupun bekerja untuk kepentingan pribadi.

¹¹⁷ *Ibid.*, hal. 93.

¹¹⁸ Saifuddin Zuhri, *Berangkat Dari Pesantren*, Gunung Agung: Jakarta, 1987, hal. 72.

2. Diingatkan bahwa untuk ditunjuk menjadi Milisi Bumiputera melalui saingan-saingan dengan syarat-syarat tertentu yang berlaku dalam kemiliteran.
3. Tidak semua pemuda Indonesia bisa dijadikan Milisi Bumiputera karena hal tersebut menyangkut konsekuensi Anggaran Belanja Hindia Belanda yang sedang mengalami berbagai kesulitan berhubung hubungannya dengan pemerintah agung di negeri Belanda terputus.
4. HBNU tidak mengajukan permohonan kepada Pemerintah Hindia Belanda agar pemuda-pemuda yang sedang menuntut pendidikan agama di pedesaan, madrasah dan pengajian-pengajian umum (baik selaku pelajar/guru) dibebaskan dari kewajiban Milisi Bumiputera.
5. Dimohon supaya Pangreh Praja di daerah-daerah (bupati, wedana, asisten wedana) bertindak bijaksana dalam melaksanakan UU Milisi Bumiputera terutama yang menyangkut poin empat di atas.
6. Kepada konsul NU dan Komisaris Daerah Ansor diwajibkan berjuang lebih gigih dengan kesabaran yang semaksimal mungkin agar pendirian HBNU tentang Milisi Bumiputera itu terlaksana dengan sebaik-baiknya.¹¹⁹

HBNU amat keberatan dijadikannya pemuda NU sebagai milisi. Keberatan itu dengan alasan jika pengorbanan nyawa (menjadi milisi), maupun darah (menjadi donor) merupakan pengorbanan yang tidak jelas apalagi tidak sesuai dengan syarat Islam. Pendirian HBNU berlandaskan hukum syara' bahwa penjajah adalah maksiat, padahal kita dilarang bantu membantu dengan menjalankan perbuatan maksiat seperti dalam Al-qur'an Surat Al-Maidah ayat 2. Membantu Belanda dalam perang melawan Jepang adalah perbuatan mungkar.¹²⁰

NU juga menolak Artikel 177 dan Artikel 178 *Indische Staatsregeling*. Golongan Kristen Indonesia yang dipimpin oleh Dr. Schapper dan Dr. H. Kraemer berusaha menuntut kepada Pemerintah Kolonial Belanda agar pasal atau artikel 177 dari *Indische Staatsregeling* (Kitab Undang-undang Ketata Pemerintahan Hindia Belanda) dicabut. Pasal tersebut menetapkan suatu ketentuan bagi para pendeta dan pastur yang akan melaksanakan propaganda Kristen di luar daerah

¹¹⁹ *Ibid.*, hal. 173.

¹²⁰ *Ibid.*, hal. 174.

harus minta izin kepada pemerintah.¹²¹ Hal itu bersamaan dengan Mukatamar NU XVI di Magelang 1939, yang memutuskan untuk menolak dicabutnya artikel 177 dan menuntut supaya artikel 178 dicabut. Dalam artikel 178 menetapkan bahwa setiap guru bukan agama Kristen harus meminta izin dahulu sebelum melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu apabila artikel 177 dicabut sedang artikel 178 tidak dicabut berarti Pemerintah Belanda telah berlaku tidak adil dan umat Islam merasa sangat dirugikan. Karena dengan dicabutnya artikel 177 berarti Pemerintah Belanda telah memberi kesempatan bagi golongan Kristen untuk menyebarluaskan misinya sementara gerak umat Islam dibatasi dengan adanya artikel 178 itu. Jika artikel 177 itu jadi dicabut berarti Pemerintah Hindia Belanda menganaktirikan umat Islam atau boleh dikatakan telah membeda-bedakan agama dan golongan (diskriminasi agama dan golongan).

Tuntutan NU seperti yang telah dikemukakan oleh Saifuddin Zuhri dalam bukunya *Berangkat Dari Pesantren* menyatakan :

“Jika misalnya pemerintah, mudah-mudahan jangan sampai terjadi, mengabulkan permintaan tersebut, lalu pasal 177 itu dicabut, maka dengan sendirinya propaganda gerakan kaum nasrani dari segi hukum dan undang-undang, memperoleh kekuasaan dan kemerdekaan yang paling sempurna. Menjadi sempurna pulalah ketentraman umat Kristen karena daerah pengaruhnya semakin luas dengan cara paling aman. Sebab itu menjadi kewajiban kita menyatakan sikap kita dengan suara paling tinggi ditujukan kepada pemerintah bahwa kita tidak rela mengabulkan tuntutan golongan masehi.”

Dalam muktamarnya itu NU memutuskan beberapa keputusan yang intinya menolak dicabutnya artikel 177 dan menuntut supaya artikel 178 dicabut.

Keputusan NU itu antara lain :

1. Mengajukan mosi kepada pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar artikel 177 Indische Staatsregeling tetap tidak dicabut.

¹²¹ *Ibid.*, hal. 145.

2. Mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar guru ordonansi tahun 1925 yang membatasi tugas guru agama Islam sebagai pelaksanaan artikel 178 Indische Staatsregeling dicabut.
3. Mengajukan mosi kepada Pemerintah Hindia Belanda di Batavia agar subsidi kepada semua agama di Indonesia dihapus saja. Mengingat bahwa dalam prakteknya subsidi agama Kristen jauh lebih besar. Sedangkan kepada Islam selain jumlahnya kecil juga tidak mengenal sasaran keagamaan.¹²²

Walaupun penolakan-penolakan di atas dilakukan secara resmi oleh NU, namun peranan K. H. Hasyim Asy'ari dalam mengeluarkan keputusan-keputusan ini tidak dapat diragukan lagi. Selain itu, K. H. Hasyim Asy'ari menolak medali penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Jenderal Belanda van Der Plas, yang mengunjungi berbagai pesantren untuk menarik simpati para kiai.¹²³

K. H. Hasyim Asy'ari dapat juga dianggap sebagai pendamai di dalam NU dan umat Islam secara umum. Misalnya, nasehat beliau berhasil menyatukan para pengurus NU dalam perselisihan pada muktamar NU ke 12. Perselisihan ini terjadi antara generasi tua dan muda menanggapi beberapa masalah. K. H. Hasyim Asy'ari berusaha menjembatani kelompok di antara keduanya dengan mengatakan bahwa generasi tua seharusnya mencintai yang muda dan yang muda harus menghormati yang tua. Setelah itu, muktamar memutuskan untuk membentuk badan otonom bagi para pemuda NU. Pada muktamar ini, K. H. Hasyim Asy'ari juga berjasa menjembatani kelompok antara santri dan abangan dengan mengajak umat Islam untuk berdakwah pada mereka dengan penuh kedamaian dan kelembutan. Hal ini berarti bahwa beliau juga mempersempit kelompok di antara masyarakat Islam abangan yang sempat terganggu karena kritik pedas dari

¹²² *Ibid.*, hal. 148.

¹²³ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy'ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. 86.

kalangan modernis terhadap praktek-praktek keagamaan mereka. K. H. Hasyim Asy'ari juga berhasil menyelesaikan permasalahan mengenai penggunaan alat-alat musik oleh anak-anak muda NU. Masalah ini diselesaikan pada muktamar ke-16 di Surabaya pada 1940 dengan keputusan suara mayoritas menyetujui penggunaan alat-alat musik tersebut.¹²⁴

NU sebagai organisasi Islam yang berkembang pesat pada waktu itu merupakan suatu potensi dalam pengembangan Islam dan menenyapkan kaum penjajah dari Indonesia. Meskipun pada waktu itu organisasi itu dikatakan sebagai organisasi yang bersifat tradisional yang hanya merupakan penghalang kemajuan, tetapi ternyata tokoh-tokohnya telah berhasil menggalang persatuan di kalangan umat Islam dari berbagai golongan. Usaha untuk menyatukan ukhuwah Islamiyah dan sekaligus menyingkirkan perselisihan di kalangan umat Islam adalah berkat seruan dari K. H. Hasyim Asy'ari dalam muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935. Beliau mengeluarkan sirkulasi yang menyerukan agar semua ulama peserta muktamar supaya mengesampingkan semua pertikaian, membuang perasaan *ta'assub* (fanatik) dalam berpendapat, melupakan segala cacian dan celaan terhadap semua muslim. Beliau menyatakan :

“Sampailah kepadaku suatu berita, bahwa di antara kaum semuanya sampai kepada masa ini, berkobarlah api fitnah dan pertentangan-pertentangan, semuanya telah bermusuhan-musuhan. Wahai ulama-ulama yang telah ta'assub kepada setengah mazhab atau setengah gaul! (ranting) itu! Yang ulama sendiri dalam demikian mempunyai dua pendapat ... dan belalah agama Islam, berjihadlah menolak orang-orang yang menghina Al-Qur'an dan sifat-sifat Tuhan ... Adapun ta'assub kaum pada ranting-ranting agama dan mendorong orang supaya memegang satu mazhab atau gaul, tidaklah disukai Allah Ta'ala. Dan tidak diridhoi oleh Rosululloh saw apalah lagi jika yang mendorongmu

¹²⁴ *Ibid.*, hal. 87.

berlaku demikian hanyalah semata-mata ta'assub dan berebut-rebutan dan berdengki-dengkian.”

Sedangkan kepada kaum modernis/pembaharu, beliau mengatakan :

“Wahai ulama-ulama! Kalau ada kamu lihat orang berbuat suatu malam berdasarkan kepada gaul (kata atau pendapat) iman-iman yang boleh ditaglidi, meskipun gaul itu merujuk (tidak kuat alasannya), maka jika kamu tidak setuju, janganlah kamu cerca mereka, tapi beri petunjuk dengan halus! Dan jika mereka tidak sudi mengikut kamu, janganlah mereka dimusuhi. Kalau kamu berbuat demikian, samalah kamu dengan orang yang membangun sebuah istana, dengan menghancurkan terlebih dahulu sebuah kota.” Lanjutnya lagi : “ Janganlah kamu jadikan semuanya itu menjadi sebab buat bercerai berai, berpecah belah, bertengkar-tengkar dan bermusuhan-musuhan ... Atau akan kita lanjutkan jagalah perpecahan ini, hina menghinakan, pecah memecahkan, munafik ... padahal agama kita hanya satu belaka : Islam!”¹²⁵

Ternyata seruan K. H. Hasyim Asy'ari mendapat tanggapan positif dari berbagai tokoh muslimin. Kemudian atas kesepakatan tokoh-tokoh muslimin yaitu K. H. Mas Mansur (Muhammadiyah), K. H. Ahmad Dahlan (Muhammadiyah), K. H. Abdul Wahab Hasbullah (NU) dan W. Wondoamiseno (PSII) dalam rapatnya di Pondok Pesantren Kebondalem 18-21 September 1937 didirikan sebuah federasi Islam dengan nama *Majelis Islam A'la Indonesia* atau MIAI.¹²⁶

Organisasi Islam yang menyatakan masuk dalam MIAI adalah SI, Muhammadiyah, Al-Islam, PU Majalengka, Al-Irsyad Surabaya, Hidayatul Islamiyah Banyuwangi, dan Al Khoiriyah Surabaya. Sedangkan NU secara resmi menyatakan menjadi anggota MIAI baru pada tahun 1939. Hal itu karena saat berdirinya MIAI, NU masih menunggu keputusan muktamar ketiga belas di Banten. Tetapi meskipun belum masuk anggota, NU tetap mengirim utusannya pada kongres MIAI tanggal 26 Februari-1 Maret 1939 di Surabaya yaitu K. H.

¹²⁵ Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1994, hal. 93-94.

¹²⁶ Lathiful Khuluq. *op.cit.*, hal. 89.

Abdul Faqih dan Abdullah Ubaid. Dalam kongres itu NU mulai melihat tanda-tanda yang kurang beres, karena pihak SI dan Muhammadiyah menghendaki kongres itu sebagai lanjutan 'kongres Al-Islam'. Oleh karena itu NU mengajukan protes terhadap masalah tersebut. Hal itu karena NU ingin melihat MIAI sebagai permulaan yang baru dan ia sendiri yang mengusulkan dibentuknya organisasi itu. Selain itu NU tidak ingin melihat MIAI berantakan di tengah jalan hanya karena perbedaan persepsi politik dan perbedaan dasar aqidah. Usul NU akhirnya diterima kongres sehingga kongres pertama MIAI tidak lagi dianggap kelanjutan kongres pertama MIAI tidak lagi dianggap kelanjutan kongres Al-Islam.¹²⁷

Di dalam MIAI, otoritas ulama sepertinya diakui oleh Muslim modernis juga. Dalam kenyataannya, K. H. Hasyim Asy'ari yang mewakili NU dipilih sebagai ketua badan legislatif, sedangkan para pemimpin SI dan Muhammadiyah mendominasi badan eksekutif. Dipilihnya K. H. Hasyim Asy'ari sebagai ketua tampaknya bertujuan untuk menarik massa Islam dari kalangan desa. Namun, kedudukan tersebut tampaknya hanyalah simbolik karena beliau mendelegasikan segala tugas sehari-hari kepada putra beliau, K. H. Abdul Wahid Hasyim. Hal ini dilakukan agar beliau bisa langsung menangani pesantren beliau dan menyiapkan para santrinya agar menjadi pemimpin di masa depan. Namun, pendelegasian tugas kepada putra beliau ini tidak berarti bahwa beliau sama sekali tidak mengurus aktivitas MIAI. Beliau menangani banyak tugas MIAI terutama masalah krusial dan penting. Selain itu, nasehat-nasehal beliau seringkali diminta oleh para anggota MIAI termasuk para pemimpin Muslim modernis. Karena itu,

¹²⁷ Choirul Anam, *Sejarah Perkembangan dan Pertumbuhan NU*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 99.

tidak diragukan lagi pengaruh K. H. Hasyim Asy'ari jauh melampaui kedudukan beliau sebagai ketua badan legislatif.¹²⁸

Peranan NU dalam MIAI semakin terlihat ketika diadakan konferensi MIAI tanggal 14-15 September 1940 di Surabaya, karena K. H. Wahid Hasyim (Wakil Ketua HBNU) banyak mengajukan pembahasan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga MIAI serta struktur organisasinya. Perubahan penting pada AD/ART-nya yaitu perubahan susunan pengurus MIAI yang dinamakan Dewan MIAI terdiri dari lima orang wakil dari perhimpunan-perhimpunan anggota MIAI dengan dibantu oleh sekretaris terdiri dari tiga orang yang diangkat Dewan MIAI.¹²⁹

Dengan adanya perubahan itu maka susunan Dewan MIAI yang pertama adalah sebagai ketua K. H. A. Wahid Hasyim (NU), wakil ketua K. H. Mas Mansur (Muhammadiyah), dan W. Wondoamiseno (PSII), bendahara Dr. Sukiman (PII), sekretaris Husein Sastradiwirja (Persis). Sedangkan anggota-anggotanya adalah K. H. Mahfuds Siddiq (NU), Syahbuddin Latief (PSII), K. H. Faqih Utsman (Muhammadiyah), Mr. Kasman (PII), dan Umar Hebeisy (Al-Irsyad).¹³⁰

Selain perubahan susunan Dewan MIAI, ternyata anggaran dasar MIAI juga mengalami perubahan. Anggaran dasar itu antara lain :

- a) Menggabungkan segala perhimpunan umat Islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama.

¹²⁸ Lathiful Khuluq, *op.cit.*, hal. 91.

¹²⁹ *Ibid.*, hal. 100.

¹³⁰ Hasil Diskusi NU Cabang Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, NU cabang Surabaya: Surabaya, 1980, hal. 125.

- b) Berusaha mengadakan perdamaian, apabila ada timbul pertikaian di antara golongan umat Islam Indonesia, baik yang telah bergabung dalam MIAI maupun yang belum.
- c) Merapatkan perhubungan di antara umat Islam Indonesia dengan umat Islam di luar Indonesia.
- d) Berdaya upaya untuk keselamatan agama Islam dan umatnya.
- e) Membangun Kongres Muslimin Indonesia.¹³¹

Lahirnya MIAI sebagai satu badan federasi yang menghimpun semua potensi kaum muslimin merupakan suatu kekuatan politik baru umat Islam Indonesia. Oleh karena itu perjuangan MIAI tidak hanya untuk perjuangan Islam dan keIslaman tetapi memperjuangkan umat Islam dan bangsa Indonesia dari tekanan penjajah. Perjuangan itu dilakukan di berbagai bidang, seperti bidang agama yaitu dengan membentuk Komisi Pemberantasan Penghinaan Islam. Komisi itu diketuai oleh tokoh NU yaitu Zainul Arifin. Bidang sosial dengan berusaha memulangkan ribuan umat Islam yang terlantar di Mekkah. Bidang perhubungan berhasil mengirim delegasi ke Jepang untuk menghadiri perkumpulan Nippon guna mengunjungi “The Islamic Exhibition” di Tokyo dan Osaka. Delegasi yang dikirim salah satunya adalah Mahfudz Siddiq dari NU.¹³² Sedangkan di bidang politik, pada tahun 1941 MIAI di bawah pimpinan K. H. A. Wahid Hasyim mendukung cita-cita Indonesia berparlemen. Bersama GAPPI (Gabungan Partai Politik Indonesia) menyelenggarakan proyek politik untuk meningkatkan hak-hak politik rakyat dalam rangka menuju cita-cita Indonesia merdeka. Proyek tersebut diberi nama KORINDO (Kongres Rakyat Indonesia).¹³³

¹³¹ Aboebakar, *Sejarah Hidup K. H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Panitia Buku Peringatan k. H. A. Wahid Hasyim: Jakarta, 1957, hal.312.

¹³² Choirul Anam, *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 101-102.

¹³³ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Puataka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. 38.

Adapun yang duduk dalam kepengurusan KORINDO kebanyakan dari NU seperti K. H. Wahid Hasyim, Mahfudz Siddiq, dan K. H. Muhammad Ilyas.¹³⁴

Dari semua yang telah dijelaskan di atas membuktikan bahwa sumbangan K. H. Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU pada masa kolonial Belanda sangatlah besar, tidak hanya dalam organisasi NU tetapi di dalam aktivitas MIAI beliau juga mempunyai peranan yang besar. Hal ini dibuktikan bahwa peranan NU dalam MIAI tidak dapat kita pisahkan, karena organisasi itu sangat mewarnai dan menentukan gerak langkah MIAI sehingga tidak ada alasan untuk memisahkan peranan NU dari kerangka sejarah MIAI begitu sebaliknya. Sebab dari sudut historis maupun semangat yang membentuk diri MIAI menjadi besar, tidak lepas dari peranan NU, sebagai contoh pada menjelang berdirinya MIAI, K. H. Hasyim Asy'ari terlebih dahulu menyerukan persatuan di kalangan umat Islam. Juga K. H. Ahmad Dahlan bersama K. H. Abdul Wahab Habullah ikut memelopori berdirinya MIAI. Ini berarti ide mendirikan MIAI tidak bisa lepas dari kerangka usaha pengembangan NU dalam perjuangan bangsa Indonesia sebelum merdeka.

B. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Sejarah bangsa Indonesia mencatat perkembangan baru setelah bala tentara Jepang pada tanggal 1 Maret 1942 di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di pantai Banten. Mereka datang untuk menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia, karena tanggal 9 Maret 1942 Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. Tjarda van Stakenborg Stachouwer menyerah tanpa syarat

¹³⁴ Hasil Diskusi NU Cabang Surabaya, *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*, NU Cabang Surabaya: Surabaya, 1980, hal. 125.

kepada Jepang di Kalijati Jawa Barat.¹³⁵ Semula kedatangan Jepang itu disambut dengan senang hati oleh bangsa Indonesia, tetapi setelah mengetahui bahwa mereka tidak jauh berbeda dengan Belanda, rasa senang tersebut berubah menjadi rasa benci. Karena Jepang justru lebih kejam, brutal, dan tidak segan-segan menghukum orang Indonesia. Hal itulah yang mengubah sikap bangsa Indonesia tersebut terhadap kedatangan Jepang.

Jepang di Indonesia lebih menunjukkan minat untuk mendekati para pemimpin Islam. Mereka beranggapan bahwa para pemimpin Islam terutama para kiai dan ulama pesantren diharapkan dapat dijadikan sebagai alat propaganda yang paling efektif baginya. Hal ini karena ulama dan kiai pesantren pada masa itu mempunyai kharisma yang cukup tinggi di kalangan masyarakat terutama umat Islam Indonesia. Sehingga hubungannya dengan pemimpin Islam terjalin baik, terbukti KUA (Kantor Urusan Agama) yang dikepalai Jepang (Shumubu) melalui pengurus MIAI membentuk jaringan dengan kiai pedesaan untuk menyelenggarakan pendidikan latihan bagi kiai, mengajar sejarah, olah raga, bahasa Jepang, dan lain-lain.¹³⁶ Hal itu membuktikan bahwa para penguasa militer jelas menyadari akan pentingnya Islam sebagai suatu unsur kekuatan dari desa Indonesia. Jepang ingin menggalang kekuatan Islam tersebut sehingga sikapnya terhadap umat Islam seakan-akan kelihatan menjamin kehendak Islam. Yang diutamakan kepada masalah Islam adalah ketika Batavia jatuh ke tangan Jepang,

¹³⁵ Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*, PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1994, hal.97.

¹³⁶ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LKiS dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1994, hal. 52.

maka setelah kejatuhannya ini kaum muslimin melihat banyak tentara Jepang beribadah di masjid-masjid di Jakarta.¹³⁷

Sejak jatuhnya Batavia, Kolonel Horis berpidato dan menyatakan dirinya diangkat oleh Jepang menjadi kepala KUA (Shumubu). Tindakan yang dilakukannya dengan mengurus tempat-tempat ibadah, mempelajari masalah Islam baik dari segi hukum, budaya, maupun aktivitas keagamaannya. Dikatakan pula bahwa Shumubu berada di bawah pemerintah Jepang karena itu harus setia dan menuruti kemauan Pemerintah Jepang.¹³⁸

Sejalan dengan kontak agama yang dilakukan Kolonel Horie tersebut, maka Jenderal Imamura, seorang Panglima tentara Jepang di Jawa mengeluarkan dekrit yang isinya melarang semua aktivitas politik di Indonesia.¹³⁹ Tindakan itu dilakukan dengan dalih negara dalam keadaan darurat perang. Pertempuran antara Jepang melawan Belanda berkecamuk di mana-mana seperti di Surabaya, Semarang, Balikpapan, Tarakan, dan lain-lain. Oleh karena itu kegiatan politik untuk sementara waktu dihentikan guna memusatkan perhatiannya dalam perang melawan Belanda.¹⁴⁰

Jepang membentuk suatu organisasi massa untuk menghimpun semua organisasi politik, kultural, dan agama yang disebut dengan nama *Gerakan Tiga A*.¹⁴¹ Gerakan Tiga A itu dipimpin oleh golongan nasionalis-sekuler (Soekarno-

¹³⁷ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam di Indonesia pada masa Pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya: Jakarta, 1955, hal. 141-142.

¹³⁸ Choirul Anam, *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*, Al-Amin Press: Yogyakarta, 1996, hal. 113.

¹³⁹ Harry J. Benda, *op.cit.*, hal. 142.

¹⁴⁰ Choirul Anam, *op.cit.*, hal. 113.

¹⁴¹ Harry J. Benda, *op.cit.*, hal. 143.

Hatta). Untuk merangkul kaum muslimin, maka Gerakan Tiga A itu membentuk *Persatuan Umat Islam*. PUI itu dimaksudkan untuk menyingkirkan MIAI yang ada sejak masa kolonial Belanda.¹⁴² Organisasi itu diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso,¹⁴³ berusaha mengundang 30 orang ulama dari tokoh Islam pada tanggal 5 September 1942 dan bertempat di Hotel des Indes Jakarta. Dalam diskusi tersebut ternyata tidak berhasil membentuk organisasi baru. Karena dalam konferensi itu tetap memutuskan untuk mempertahankan MIAI dan memindahkan markas besarnya dari Surabaya ke Batavia.¹⁴⁴

Sejak kedatangannya di Indonesia Jepang mula-mula disambut dengan senang hati oleh rakyat Indonesia. Pada saat itu Jepang berusaha mendekati orang Islam dengan berbagai alasan seperti dengan keinginannya membebaskan dari pemerintahan kristen, menekankan persamaan antara Shinto dengan Islam, melukiskan suatu gambar tentang dunia kekuasaan Islam yang berpusat di keliling Kaisar Khalifah Jepang Raya.¹⁴⁵ Dengan berbagai alasan tersebut maka menjadikan orang Islam menerima kedatangannya dengan senang hati. Jepang menyadari akan arti pentingnya dukungan kekuatan Islam yang merupakan unsur kekuatan di desa Indonesia. Oleh karena itu Jepang berusaha membuat suatu rencana kebijakan yang ditujukan untuk memenangkan dukungan Islam. Kebijakan itu terutama ditujukan kepada masalah-masalah Islam di tingkat pedesaan.

¹⁴² Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. PT. Bina Ilmu: Surabaya, 1994, hal. 98.

¹⁴³ Harry J. Benda, *op.cit.*, hal. 145.

¹⁴⁴ *Ibid.*, hal. 146.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hal. 135.

Pada tanggal 7 Maret 1942 Jepang membentuk *Gunseikanbu* pemerintahan militer dan menyebarkan maklumat nomor satu yang berbunyi:

Karena bala tentara Dai Nippon berkehendak memperbaiki nasib rakyat Indonesia yang sebangsa dan seketurunan dengan bangsa Nippon dan juga hendak mendirikan ketentraman yang tangguh untuk hidup dan makmur bersama-sama dengan rakyat Indonesia atas dasar mempertahankan Asia Raya bersama-sama maka dari itu bala tentara Dai Nippon melangsungkan pemerintahan militer bagi sementara waktu di daerah yang telah ditempatinya, agar supaya mendatangkan keamanan yang senantiasa dengan segera.¹⁴⁶

Dikeluarkannya Maklumat No. I tersebut membuat NU untuk bersikap hati-hati, karena ulama-ulama NU senantiasa berpegang teguh pada *Al-Harbu Khid'ah*, perang itu hanya tipu muslihat. Buktinya janji-janji yang disampaikan Jepang terhadap rakyat Indonesia hanya kebohongan. Jepang yang ingin menciptakan ketentraman atas dasar mempertahankan Asia Raya justru menjadikan bangsa Indonesia sebagai tanah jajahan. Semboyan “Prajurit Ekonomi” yang digembar-gemborkan Jepang tidak lain hanya kuli paksa, kerja paksa yang berupa *Romusha*. Tenaga kerja wanita yang dijanjikan bekerja sebagai palang merah ternyata dijadikan pemuas nafsu serdadu Jepang. Selain itu rakyat Indonesia diwajibkan setiap pagi untuk menghadap ke arah istana Kaisar Jepang untuk melakukan *seikeirei*, menyembah Kaisar Jepang yaitu Tenno Haika.¹⁴⁷ Upacara ritual dengan membungkukkan badan ke arah kaisar ini dinilai oleh kebanyakan muslim menyerupai *ruku'* dalam shalat, oleh karena itu tidak dibenarkan dalam tauhid.¹⁴⁸ Tetapi yang jelas upacara itu betul-betul berbeda

¹⁴⁶ Choirul Anam, *Gerak langkah Pemuda Ansor : Sebuah Percikan Sejarah Kelahiran*, Majalah AULA: Surabaya, 1990, hal. 92.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hal. 92.

¹⁴⁸ Martin Van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LKiS: Yogyakarta, 1994, hal. 52.

dengan *ruku'* dalam shalat. Seperti yang telah dikemukakan oleh Haji Abdul

Hamid Ono sebagai berikut :

Saya pikir banyak orang (Islam) seperti enggan mengikuti (upacara) pemberian hormat. Mereka yakin bahwa hal itu identik dengan *ruku'*, yang merupakan sebagian dari Sembahyang (Islam). Pemikiran dan keraguan semacam ini sama sekali keliru. Penghormatan pada (kaisar) sama sekali berbeda dengan *ruku'* dan dalam kenyataannya hampir tak ada satupun yang sama. Melakukan penghormatan bukanlah sembahyang.¹⁴⁹

Adanya kebijakan *seikeirei*, NU langsung menyatakan penolakannya. K. H. Hasyim Asy'ari memandang bahwa tindakan itu berarti pendewaan kepada selain Allah yang merupakan suatu perbuatan syirik. K. H. Hasyim Asy'ari secara terbuka menolak hal itu. Dengan adanya penolakan yang dilakukan oleh K. H. Hasyim Asy'ari maka Jepang berusaha menghambatnya dengan menjebloskan K. H. Hasyim Asy'ari rais Akbar NU ke dalam penjara pada bulan April 1942 dengan alasan yang tidak jelas. Beberapa ulama dan santrinya minta diikutsertakan dalam tahanan.¹⁵⁰

Kejadian tersebut menimbulkan kegoncangan di kalangan NU, dan seluruh warganya di seluruh Indonesia. Kemudian menyusullah kegoncangan kedua yaitu K. H. Mahfudz Siddiq ketua PBNU ditangkap Jepang dengan tuduhan melakukan gerakan anti Jepang. Hal itu terus diikuti penangkapan beberapa ulama tokoh NU di Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan tuduhan lain-lain.¹⁵¹ Choirul Anam dalam bukunya menyatakan bahwa penangkapan kedua tokoh NU itu karena dituduh mendalangi aksi perusakan di Pabrik Gula Jombang dekat Pesantren Tebuireng.

Tentu saja itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Jepang. Yang jelas kedua tokoh

¹⁴⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1980, hal. 156.

¹⁵⁰ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. Hasyim Asy'ari*, LkiS: Yogyakarta, 2000, hal. 96.

¹⁵¹ Abdurrahman Wahid, dkk, *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*, LTN dan Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 1995, hal. 41.

tersebut ditangkap karena menolak melakukan *seikeirei*. Bahkan K. H. Hasyim Asy'ari menyerukan kepada seluruh umat Islam khususnya warga NU untuk tidak melakukan *seikeirei* karena hukumnya haram.¹⁵²

Peristiwa ditangkapnya tokoh-tokoh NU cukup menggemparkan dunia pesantren dan menggelisahkan warga NU. Mereka berusaha mengupayakan penyelesaian masalah tersebut, dan pada tanggal 1 September 1942 para konsul NU mengadakan pertemuan di Jakarta untuk membahas pembelaan terhadap pimpinannya yang ditangkap Jepang. Selain itu juga disepakati bersama bagaimana tata cara untuk menghadapi Jepang secara diplomatis dan lunak. Hal itu menurut pandangan NU, kemerdekaan Indonesia hanya tinggal soal waktu sehingga perlu dimanfaatkan kolaborasi dengan Jepang dalam membentuk bangsa Indonesia yaitu kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.¹⁵³

Pertemuan antara tokoh NU itu berhasil mengadakan perubahan struktur dan personalia organisasi. Perubahan itu atas dasar peristiwa ditangkapnya pemegang kendali NU dan pembatasan-pembatasan ketat oleh Jepang terhadap organisasi keagamaan. Bentuk perubahan seperti di bawah ini:

Ketua Besar	: K. H. Abdul Wahab Hasbullah
Rois Akbar	: K. H. Hasyim Asy'ari (ketika itu masih dalam penjara)
Ketua Tanfidiyah	: K. H. Nahrawi Thahar
Wakil Ketua	: K. H. Mochammad Noer
Sekretaris	: K. H. Abdul Wahid Hasyim (berhubung kemudian masuk PETA diganti oleh Saifuddin Zuhri, karena kemudian ia tugas di Jakarta maka diganti A. Azis Diyar) Kemudian Bendahara dan beberapa anggota lain. ¹⁵⁴

¹⁵² Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*, Jatayu: Jakarta, 1985, hal. 114.

¹⁵³ *Ibid.*, hal. 114.

¹⁵⁴ *Ibid.*, hal. 115.

Tampilnya K. H. A. Wahab Hasbullah menggantikan Mahfudz Siddiq bersama K. H. A. Wahid Hasyim dalam memimpin NU itu, segera memusatkan perhatian lahir batin untuk membebaskan K. H. Hasyim Asy'ari dari tahanan, beserta kiai-kiai yang lain yang ditangkap Jepang. Tindakan yang dilakukannya dengan mengunjungi berulang-ulang *Saiko Sikikan* (Panglima Tertinggi Bala Tentara Jepang di Jawa), *Guiseikan* (Kepala Pemerintahan Militer Jepang di Jakarta) dan *Shuutyokan* (Residen Jepang di Surabaya) dan pembesar Jepang untuk membebaskan tokoh NU tersebut. Selama hampir lima bulan seluruh waktunya dihabiskan untuk membebaskan Rois Akbarnya dari tahanan. Setelah melampaui perjuangan cukup berat akhirnya dengan pertolongan dan petunjuk Allah SWT bebaslah K. H. Hasyim Asy'ari dari tahanan.¹⁵⁵ Dibebaskannya K. H. Hasyim Asy'ari, karena Jepang khawatir akan kehilangan simpati umat Islam, khususnya warga pendukung NU, hanya karena memenjarakan tokoh mereka. Jepang sadar meskipun tokoh-tokoh mereka ditangkap tetapi semangat perjuangannya tidak mengendor.¹⁵⁶

Setelah pembebasan para tokoh NU berhasil, tidak lama kemudian budaya *Shinto* yang diterapkan di Indonesia itu dihapuskan. Hal itu karena Jepang terus-menerus mendapat perlawanan keras dari umat Islam Indonesia. Perlawanan itu tidak hanya dari Tebuireng atau pesantren Jawa saja tetapi di mana-mana di seluruh Indonesia.¹⁵⁷ Maksud Jepang menghapus budaya itu karena ingin

¹⁵⁵ Saifuddin Zuhri, *Almaghfurlah K. H. Abdul Wahab Chasbullah : Bapak dan Pendiri NU*, Yamunu: Jakarta, 1972, hal. 46-47.

¹⁵⁶ *Ibid.*, hal. 47.

¹⁵⁷ Slamet Effendy Yusuf, dkk, *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*, Rajawali: Jakarta, 1982, hal. 37.

mendapatkan dukungan aktif dari rakyat Indonesia.¹⁵⁸ Jepang memang tidak memberi kebebasan bagi organisasi keagamaan, karena selama pendudukannya di Indonesia semua organisasi politik dan keagamaan dibubarkan tidak terkecuali organisasi NU di Jawa dan Madura. NU melihat Jepang akan menggunakan setiap organisasi untuk kepentingan alat propagandanya, oleh karena itu NU melakukan gerakan terbatas di bidang tertentu, misalnya menghidupkan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan pengajian-pengajian.¹⁵⁹

Dengan memberikan kedudukan politik dan sosial kepada para ulama yang selama itu telah diperlakukan kurang baik olehnya, maka Jepang berusaha untuk memperbaiki kesalahannya. Ternyata usaha tersebut berhasil karena September 1942 secara resmi Jepang mengizinkan kedua organisasi tersebut untuk aktif kembali.¹⁶⁰ Hal itu menunjukkan bahwa sikap NU terhadap Jepang memang tidak sekeras terhadap kolonial Belanda. Sikap diplomatis itu diambil mengingat jika mereka bekerja sama dengan Jepang maka fasilitas yang mereka dapatkan akan dipergunakan untuk melancarkan tugasnya yaitu memperbaiki umat dan dalam rangka memperjuangkan hak-haknya sebagai bangsa yang merdeka bebas dari penjajahan.

Dalam kerja sama dengan Jepang, umat Islam Indonesia baik dari NU maupun Muhammadiyah berhasil mengadakan kontak untuk membangun organisasi baru. Hal itu dilakukan setelah MIAI gagal dipertahankan. Pada waktu Jepang meresmikan pembentukan PETA atau Pembela Tanah Air adalah tentara

¹⁵⁸ Choirul Anam, *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*, Jatayu: Surakarta, 1985, hal. 116.

¹⁵⁹ Aboebakar, *Sejarah Hidup Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*, Panitia Buku Peringatan K. H. A. Wahid Hasyim: Jakarta, 1957, hal. 477.

¹⁶⁰ Choirul Anam, *op.cit.*, hal. 116.

dari badan pembentukan Jepang yaitu “Java Hokokai” yang sebelumnya dikenal dengan PUTERA dan Gerakan Tiga A¹⁶¹, dengan corak keIslaman untuk menghadapi perang melawan Sekutu atau dalam rangka memenangkan Perang Asia Timur Raya, MIAI tetap tidak mau ditarik ke dalamnya. Akhirnya pada tanggal 24 Oktober 1943 organisasi itu dibubarkan.¹⁶² Sebagai gantinya pada akhir Oktober 1943 dibentuklah wadah baru atas prakarsa NU dan Muhammadiyah yang diberi nama *Majlis Syuro Muslimin Indonesia* atau disingkat dengan Masyumi. Masyumi mendapat status hukum baru pada November 1943. Tujuan didirikannya adalah untuk memperkuat persatuan semua organisasi umat Islam dan membantu Dai Nippon demi kepentingan Asia Timur Raya.¹⁶³ Keanggotaan dalam Masyumi hanya terbuka pada organisasi yang mempunyai status hukum yaitu NU dan Muhammadiyah. MIAI dan Masyumi mempunyai tujuan yang sama yaitu mempersatukan umat Islam. Perbedaan di antara keduanya hanyalah dalam hal pendekatan terhadap penguasa. Kalau MIAI bersikap non-kooperatif dengan Belanda, Masyumi sebaliknya bekerjasama dengan Jepang.¹⁶⁴

Masuknya kedua organisasi ini ke dalam Masyumi sesuai dengan keinginan Jepang untuk menarik dukungan massa. K. H. Hasyim Asy’ari diangkat oleh pemerintahan pusat Jepang sebagai kepala Kementerian Urusan Agama

¹⁶¹ *Ibid.*, hal. 118-119.

¹⁶² Abdul Qodir Djaelani, *Peran Ulama dan Santri Dalam Perjalanan Politik Islam di Indonesia*, Al-Ikhlhas: Surabaya, 1994, hal. 101.

¹⁶³ Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LKiS: Jakarta, 1994, hal. 55.

¹⁶⁴ Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy’ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. 101.

untuk menggantikan Prof. Hussein Djajadiningrat. Penunjukan beliau sebagai kepala kementerian ini juga simbolik, sedangkan tugas sehari-hari dilaksanakan oleh putra beliau, K. H. Abdul Wahid Hasyim yang menangani seluruh kegiatan administratif kementerian ini. Aktivitas kementerian ini meliputi menjadikan Masyumi sebagai institusi semi-pemerintah, membuka Sekolah Tinggi Islam di Jakarta, mendirikan Balai Muslimin Indonesia sebagai tempat pertemuan umat Islam. Kementerian ini juga mendukung program Masyumi seperti menghapuskan biaya inspeksi dan penyembelihan hewan untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Umat Islam juga diperbolehkan istirahat dari kerja untuk melakukan sholat jumat. Perlakuan yang istimewa dari pemerintah Jepang kepada umat Islam ini mendorong K. H. Hasyim Asy'ari untuk mengajak umat Islam mendukung pemerintah Jepang. Beliau membandingkan perlakuan Belanda yang tidak adil dengan umat Islam dan perlakuan baik hati Jepang terhadap umat Islam.

Organisasi kementerian ini dibagi menjadi dua : Syumuka, mengurus kegiatan keagamaan dan ibadah, terutama hukum dan budaya Islam; dan Kantokuka yang mengawasi tempat-tempat ibadah dan menjaga hubungan dengan para pemimpin agama. Tidak dapat dipungkiri bahwa kementerian ini telah menjadi tempat latihan yang sangat berharga bagi pemimpin Islam dalam bidang administrasi. K. H. Hasyim Asy'ari jelas memainkan peran yang besar dalam kementerian ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Benda :

Ketua baru kementerian Urusan Agama memang benar hanya meminjam namanya (ketua Masyumi Hasyim Asy'ari) yang dalam kenyataannya (*de facto*) tidak beliau duduki. Namun, kedudukannya sebagai simbol adalah sepenting kenyataan bahwa anaknya, wakil Ketua Masyumi Wahid Hasyim, bersama Abdul

Kahar Muzakkar, seorang pemimpin utama Muhammadiyah, menduduki kepemimpinan puncak Syumubu.¹⁶⁵

Sebagai pemimpin kementerian ini, K. H. Hasyim Asy'ari memperingatkan akibat buruk perpecahan umat. Ia berkata : “Jika tidak ada lagi persatuan dalam suatu organisasi, hal itu disebabkan oleh keinginan individu-individu melampaui kepentingan bersama. Jika hal ini terjadi, tidaklah dikatakan suatu umat yang semula bersatu tetapi sekarang terpecah-pecah menjadi individu-individu. Menurutnya, “Perpecahan adalah sebab utama kelumpuhan, kemunduran dan kegagalan dalam setiap zaman, sebab kerusakan, kehancuran aib yang besar”. K. H. Hasyim Asy'ari mengajak para ulama untuk melaksanakan perintah Allah untuk kejayaan Islam. Dan dia berkata :

Sebab kesulitan dan kekurangan kita adalah terputusnya hubungan antara daerah kita, Jawa, dan daerah lain. Namun, jika seseorang melihat lebih dalam lagi kesulitan dan kekurangan ini disebabkan juga merajalelanya perbuatan maksiat yang dilakukan umat terhadap Allah. Kesulitan dan kekurangan merupakan peringatan Allah kepada kita, umat Islam, agar selalu ingat pada-Nya, harus melaksanakan perintah-perintah-Nya, dan menjauhi larangan-larangan-Nya.¹⁶⁶

Sementara itu di tengah kekalahan dari Jepang di medan peperangan, Perdana Menteri Jepang Kunaiki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dalam pidatonya pada 7 September 1944. Janji ini merebut perhatian dari banyak pemimpin Indonesia dan menandai adanya kebijakan baru Jepang yang sejak saat itu lebih memperhatikan kaum nasionalis sekular. Sebulan kemudian, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Jepang yang disetujui oleh Komandan Tentara Terauchi pada 7 Agustus 1945.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hal. 103-104.

¹⁶⁶ *Ibid.*, hal 105.

Soekarno dan Hatta dipilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia ini. Pada tanggal 17 Agustus, mereka memproklamkan kemerdekaan Indonesia di depan khalayak ramai. Dominasi pemimpin sekular dalam Komite Persiapan Kemerdekaan ini menunjukkan beralihnya kebijakan Jepang untuk keuntungan mereka.¹⁶⁷

Dapat disimpulkan bahwa di bawah pemerintahan pendudukan Jepang, K. H. Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU sangat aktif dalam kegiatan politik meskipun organisasi ini masih tetap sebagai organisasi sosial-keagamaan, bukan partai politik. Namun, tujuan NU dalam berpolitik masih sama dengan ketika baru didirikan yaitu untuk memajukan kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi umat Islam. Dengan masuk ke dalam kegiatan politik, K. H. Hasyim Asy'ari memberikan sumbangan kedalam organisasi NU berupa kemajuan di bidang sosial-keagamaan misalnya menghidupkan pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, dan pengajian-pengajian.

C. Setelah Kemerdekaan Indonesia (1945-1947)

Pengalaman selama masa pendudukan Jepang telah banyak melibatkan umat Islam Indonesia dalam kegiatan politik dan telah mempersiapkan mereka untuk melakukan perjuangan bersenjata. Karena pada masa itulah anggota Masyumi yang merupakan federasi organisasi Islam, boleh dikatakan lebih siap dalam melakukan perjuangan itu. Pada masa itu NU dan para pendukungnya yang tergabung dalam Masyumi telah memainkan peranan aktif. Perjuangan Nu dalam

¹⁶⁷ *Ibid.*, hal. 107-109.

mencapai kemerdekaan Indonesia sudah menjadi ijthid NU sejak masa penjajahan Belanda. Ijthid NU yang menyangkut masalah kenegaraan terjadi pada muktamarnya di Banjarmasin pada tahun 1936. Dalam muktamar itu NU menetapkan bahwa Negara dan Tanah Air Indonesia wajib melestarikan ajaran Islam menurut fiqh.¹⁶⁸

Adanya keputusan muktamar itu NU memberikan membenaran akan munculnya tokoh-tokoh NU dalam memperjuangkan kemerdekaan dan tidak hanya “murni” keagamaan. Keputusan itu dibuat mengingat dahulu penduduk Indonesia mayoritas menganut agama Islam meskipun sekarang diperintah bangsa asing tetapi sifatnya hanya sementara. Maka umat Islam diwajibkan untuk melakukan perjuangan guna mewujudkan kemerdekaan bangsa dan negara.

Keputusan muktamar itu menjadikan para tokoh NU dan warga NU ikut terlibat dalam perjuangan. Hal itu terbukti ketika Jepang mengeluarkan keputusan untuk membentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang dikenal dengan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* pada tanggal 1 maret 1945.¹⁶⁹ sebagai ketuanya ditunjuk Dr. Radjiman Wardodiningrat dan wakilnya Ichibangase Yoshio seorang Jepang dan Suroso. BPUPKI bertugas untuk mengumpulkan usul-usul guna dijadikan bahan dalam memasuki Indonesia medeka.¹⁷⁰ Dalam BPUPKI ternyata terdapat tokoh NU seperti K. H. Hasyim

¹⁶⁸ M. Masyhur Amin, *NU dan Ijthid Politik Kenegaraannya*, Al-Amin Press: Yogyakarta, 1996, hal. 94.

¹⁶⁹ Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam di Indonesia Pada masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya: Jakarta, 1980, hal. 221.

¹⁷⁰ George Mc. Turman Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia*, PT. Gramedia: Jakarta, 1992, hal. 153.

Asy'ari, K. H. A. Wahid Hasyim dan K. H. Masjkur.¹⁷¹ Hal itu membuktikan bahwa NU melalui para tokohnya ternyata juga langsung ikut terlibat dalam perjuangan kemerdekaan.

Pada tanggal 22 oktober 1945, delapan minggu setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, terjadi peperangan di Surabaya. Untuk memobilisir dukungan umat Islam, K. H. Hasyim Asy'ari mengeluarkan Fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Fatwa tersebut sebagai berikut :

1. Kemerdekaan Indonesia yang diproklamkan tanggal 17 agustus 1945 wajib untuk dipertahankan.
2. Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah wajib dibela dan dipertahankan.
3. Musuh Negara republik Indonesia terutama Belanda yang datang kembali dengan membonceng tentara Sekutu (Inggris), dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politis dan militer untuk kembali menjajah Indonesia.
4. Umat Islam Indonesia terutama warga Nahdlatul Ulama wajib mengangkat senjata melawan penjajah Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia.
5. Kewajiban itu adalah suatu jihad yang menjadi kewajiban orang Islam (Fardlu 'Ain) yang berada pada radius 94 km (jarak di mana umat Islam diperkenankan untuk melakukan sembahyang jama' dan gashar). Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km tersebut.¹⁷²

Fatwa ini kemudian dibutuhkan oleh segenap ulama yang mengadakan pertemuan di Surabaya pada November 1945 yang menyatakan kembali pendapat mereka bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan dan Republik Indonesia adalah satu-satunya pemerintahan yang sah yang harus dilindungi meskipun dengan mengorbankan harta dan nyawa. Para ulama juga memutuskan bahwa pergi berhaji dengan menggunakan kapal Belanda adalah terlarang. Fatwa

¹⁷¹ Soebagijo IN, *K. H. Masjkur : Sebuah Biografi*, Gunung Agung: Jakarta, 1982, hal. 49.

¹⁷² Lathiful Khuluq, *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy'ari*, LKiS: Yogyakarta, 2000, hal. 110.

tersebut juga dikuatkan dengan karisma K. H. Hasyim Asy'ari dan perlunya berperang melawan orang-orang kafir. Jadi, perang kemerdekaan dipandang sebagai perang suci di jalan Allah (*jihad fi sabilillah*) dan barang siapa yang mati dalam perang ini dijamin akan masuk surga. Sampai sekarang, perang ini masih dipandang sebagai perang terbesar dalam sejarah Indonesia modern sehingga 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Akhirnya dapat dilihat bahwa fatwa ini merupakan contoh yang paling jelas mengenai usaha para ulama sebagai pemimpin umat untuk mempertahankan kemerdekaan.

Ideologi jihad memainkan peran yang sangat penting dalam gerakan anti-kolonial. Ideologi ini telah mendorong Muslim santri untuk bergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah yang dibentuk semasa pendudukan Jepang. Reid mengungkapkan fenomena ini :

Pesantren merupakan salah satu sumber kepemimpinan (revolusi kemerdekaan). Para santri tinggal di pesantren, seringkali jauh dari tempat tinggal mereka dan membentuk ikatan loyalitas yang kuat terhadap guru mereka. Dalam pesantren ini, mereka juga belajar ilmu beladiri, pencak silat, dengan disiplin fisik dan spiritual. Mungkin hanya guru mereka sendiri yang mengerti misteri ilmu kekebalan. Ulama baik dari kalangan modernis maupun tradisional mempercayai adanya kewajiban perang suci dan mati syaid di dalamnya. Sebagai pusat daerah santri pesisir utara Jawa, Surabaya sangat dipengaruhi oleh pemikiran ini. Pada bulan November, ulama dari daerah ini menyatakan bahwa mempertahankan republik adalah wajib dilaksanakan berdasarkan perang suci.¹⁷³

Pertempuran Surabaya ini memperkuat kekuatan moral bangsa Indonesia di daerah-daerah lain dan memicu gerakan serupa melawan Belanda dan Sekutunya di seluruh Indonesia, sebagaimana yang digambarkan oleh Reid :

Untuk ide perjuangan, Surabaya adalah sebagai monumen dan model. Generasi selanjutnya terus menganggap 10 November sebagai Hari Pahlawan tidak hanya karena peristiwa ini salah satu di antara sedikit gerakan massa yang seluruh segmen masyarakat terpenting bersatu : politisi, pemuda, Muslim, dan petani... Pertempuran Surabaya sangat menambah tekanan pada Inggris dan

¹⁷³ *Ibid.*, hal. 112.

Belanda untuk mengakhiri penggunaan kekerasan menuju perundingan dengan pihak Republik.¹⁷⁴

Fatwa jihad K. H. Hasyim Asy'ari dapat dipandang sebagai pengakuan terhadap pemerintah baru Indonesia dan perlawanan terhadap Belanda. Sikap ini disebabkan loyalitas para anggota NU kepada pemerintah yang sah. Sebelum masa pendudukan Jepang, NU mengakui pemerintah kolonial Belanda sebagai pemerintahan *de facto* yang mempunyai hak untuk dipatuhi meskipun mereka bukan pemerintahan Islam asalkan umat Islam diperbolehkan melaksanakan ajaran agamanya. Namun, setelah kedatangan Jepang, Belanda telah kalah sehingga pemerintah yang sah ketika itu adalah Jepang. Setelah yang terakhir ini terkalahkan dan kemudian pemerintahan baru Republik Indonesia terbentuk, para anggota NU memandang pemerintahan ini sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah dan wajib dipatuhi. Karena itu, ketika Belanda berusaha kembali merebut hegemoni di Indonesia, para anggota NU menolaknya dengan mengadakan perang suci terhadap mereka. Hal ini dinyatakan dalam muktamar NU pertama setelah kemerdekaan pada bulan Maret 1946 yang menyatakan kembali adanya kewajiban jihad bagi umat Islam yang memenuhi syarat untuk mempertahankan pemerintahan Republik.

Sementara itu, kondisi politik tumbuh sangat dinamis. Hal ini disebabkan terbentuknya berbagai partai politik setelah dikeluarkan Maklumat No X yang membolehkan dibentuknya partai politik sebelum diadakannya pemilu “agar masyarakat dapat memilih wakil mereka di Dewan Perwakilan Rakyat yang akan dibentuk pada Januari 1946”. Menanggapi hal ini, umat Islam mengaktifkan

¹⁷⁴ *Ibid.*, hal. 113.

kembali Masyumi yang pernah berdiri pada masa Jepang. Namun, Masyumi kali ini lain dengan yang dulu karena bukan organisasi federasi lagi. Masyumi setelah kemerdekaan adalah sebuah partai politik yang mempunyai anggota secara individu dan wakil dari organisasi-organisasi Islam. Struktur keanggotaan ini meskipun dapat menambah anggota, tetapi pada akhirnya menjadi penyebab kemunduran dan perpecahan organisasi ini dua tahun kemudian. Perpecahan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Di antara yang paling menonjol adalah perselisihan mengenai siapa saja yang bisa mewakili partai ini untuk duduk di kursi pemerintah. Kalangan yang mewakili organisasi dengan massa besar tidak rela diberi jatah kursi yang sama bahkan lebih kecil dari pada pemimpin yang tidak mempunyai massa. Padahal kursi pemerintahan ditentukan oleh suara massa pemilih.

Struktur kepemimpinan Partai Masyumi sama seperti struktur kepemimpinan pada Syarekat Islam dan NU yaitu terdiri atas dua badan : Majelis Syuro dan Tanfidziyah. Majelis syuro disediakan untuk para intelektual didikan Barat dan sangat berpengalaman dalam kegiatan politik. Karena itu, Majelis Syuro diketuai oleh K. H. Hasyim Asy'ari dan putra beliau, K. H. A. Wahid Hayim bertindak sebagai wakil ketua. Dualisme kepemimpinan dalam Partai Masyumi ini kemudian menjadi sumber kericuhan. Hal ini dikarenakan para anggota Dewan Legislatif merasa tersingkir dari proses pembuatan keputusan. Karena itu, para pemimpin NU mulai mempertanyakan peran mereka dalam Masyumi dan manfaat yang diperoleh darinya. Pada Muktamarnya Ke-17 di Madiun 25 Mei 1947, K. H. Abdul Wahid Hasyim mendirikan Biro Politik NU untuk bernegosiasi dengan

kalangan modernis Muslim yang mendominasi kepemimpinan Partai Masyumi dan untuk memperkuat kekuatan tawar-menawar NU dalam organisasi ini. Dua bulan setelah pembentukan biro ini, tepatnya pada tanggal 25 Juli 1947 K. H. Hasyim Asy'ari meninggal dunia sehingga NU kehilangan figur yang disegani tidak hanya oleh kalangan tradisionalis tetapi juga modernis dan figur yang selalu menyerukan persatuan dan kesatuan umat.¹⁷⁵ Beliau kemudian diakui sebagai Pahlawan Nasional dengan keputusan Presiden No. 294/1964.¹⁷⁶

Jadi dengan demikian K. H. Hasyim Asy'ari sebagai Ra'is Akbar NU benar-benar ikut terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Indonesia merdeka baik secara fisik maupun intelektual, beliau mendorong Muslim santri untuk bergabung dalam jihad, dan beliau menyerukan segenap umat Islam untuk bersatu. K. H. Hasyim Asy'ari telah berbakti kepada bangsa dan negara serta umat Islam. Dia seorang ulama yang tekun, sabar dan rela berkorban. Dia membangun dan turut mendirikan Nahdlatul Ulama, itu berarti ia telah menyediakan suatu wadah tempat berjuang para ulama untuk memimpin umat.¹⁷⁷

¹⁷⁵ *Ibid.*, hal. 114-117.

¹⁷⁶ *Ibid.*, hal. 118.

¹⁷⁷ Thalhas, *Alam Pikiran K. H. Ahmad Dahlan dan K. H. M. Hasyim Asy'ari Asal-usul Dua Kutub Gerakan Islam di Indonesia*, Galura Pasé: Jakarta, 2002, hal. 142-143.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan :

1. Hasyim Asy'ari adalah seorang tokoh ulama tradisional. Beliau lahir dari keluarga elit kiai Jawa pada 24 Dzul Qa'dah 1287 / 14 Februari 1871 di desa Gedang, Jawa Timur. Hasyim Asy'ari adalah anak ketiga dari sebelas bersaudara. Kehidupan masa kecil Hasyim Asy'ari di lingkungan pesantren sangat berperan besar dalam pembentukan wataknya untuk menyerap ilmu pengetahuan dan kepedulian pada pelaksanaan ajaran-ajaran agama. Pendidikan awal Hasyim Asy'ari sampai beumur 15 tahun, diperoleh lewat bimbingan ayahnya. Hasyim Asy'ari kemudian meneruskan studi ke beberapa pesantren di Jawa, Madura dan terakhir ke Hijaz. Setelah tujuh tahun di Mekkah melakukan ibadah haji dan belajar di lingkungan pesantren, Hasyim Asy'ari kembali Jawa Timur (Surabaya) untuk mendirikan pesantren sendiri bernama Pesantren Tebuireng dan selanjutnya berpengaruh sangat besar bagi syiar Islam.
2. Hasyim Asy'ari menolak ide-ide reformasi Muhammad Abduh, yang mengajak umat Islam untuk kembali memurnikan Islam dari pengaruh dan praktek keagamaan yang sebenarnya bukan berasal dari Islam, reformasi pendidikan Islam di tingkat Universitas, mengkaji dan merumuskan kembali doktrin Islam untuk memenuhi kebutuhan kehidupan modern agar Islam dapat memainkan kembali tanggung jawab yang lebih besar dalam lingkungan

sosial, politik, dan pendidikan. Sebenarnya Hasyim Asy'ari juga menerima ide-ide Muhammad Abduh untuk meningkatkan semangat muslim tetapi dia tidak setuju dengan pendapat Abduh untuk membebaskan umat dari mazhab, karena menurut beliau akan menghasilkan pemutarbalikkan ajaran Islam. Ketegangan Hasyim Asy'ari untuk mempertahankan ajaran-ajaran mazhab dan kepentingan praktek-praktek tarekat sejalan dengan pandangan guru-gurunya sewaktu di Mekkah. Untuk menyelesaikan pertentangan antara kaum pembaharu dan kaum tradisional, SI di bawah Cokroaminoto memprakarsai diadakannya kongres Ali Islam I. Karena kelompok tradisional tidak mendapat kesempatan mengikuti pertemuan kongres tersebut maka atas inisiatif Wahab Hasbullah mereka mengadakan pertemuan sendiri untuk membahas pengiriman delegasi ke kongres Mekkah. Dan pada tanggal 31 Januari 1926 dibentuklah suatu komite yang disebut Komite Hijaz. Atas inisiatif K. H. Mas Alwi diusulkan nama Nahdlatul Ulama sebagai ganti bagi Komite Hijaz, sehingga secara resmi Nahdlatul Ulama lahir pada tanggal 31 Januari 1926 atau Rojab 1344 H. Semakin hari perjalanan NU semakin menunjukkan kemajuan yang begitu pesat dalam berbagai bidang. Seiring dengan bertambahnya jumlah anggota, cabang-cabang NU berkembang di berbagai tempat. Dan di tahun 1942, NU memiliki 120 cabang di berbagai kawasan di tanah air.

3. Pada masa kolonial Belanda, Hasyim Asy'ari menulis aturan-aturan dasar organisasi yaitu Qanun al-asasi al-Nahdlatul Ulama sebagai dasar ideologi Nahdlatul Ulama. Pada masa pendudukan Jepang, Hasyim Asy'ari mendirikan

institusi pendidikan antara lain : pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, pengajian-pengajian, Sekolah Tinggi Islam dan Balai Muslimin Indonesia sebagai tempat pertemuan umat Islam. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hasyim Asy'ari sebagai Ra'is Akbar NU ikut terlibat dalam mempersiapkan lahirnya Indonesia merdeka baik secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik, beliau dan Muslim santri ikut bergabung dalam Hizbullah dan Sabilillah. Sedangkan secara nonfisik, beliau menyerukan fatwa kepada segenap Muslim santri untuk ikut dalam perang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian tentang Peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947 yang diajukan dapat terbukti menurut hasil penelitian yang dilakukan. Hasyim Asy'ari mempertahankan paham ahlussunnah wal jamaah, meningkatkan peranan dan pemikiran Islam tanpa harus meninggalkan keterikatan mereka dengan pola pikiran empat mazhab, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mengikuti faham Sunni dan praktek tarekat Sufi Islam murni sehingga Hasyim Asy'ari mendirikan Organisasi NU, sebuah organisasi ulama tradisional sebagai organisasi sosial-keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Aboebakar. 1957. *Sejarah Hidup K. H. A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar*. Panitia Buku Peringatan K. H. A. Wahid Hasyim : Jakarta.
- Abdurrahman Wahid, dkk. 1995. *Biografi 5 Rais 'Am Nahdlatul Ulama*. LTN dan Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Abdul Azis, dkk. 1989. *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*. Pustaka Firdaus : Jakarta.
- Abdul Qodir Djaelani. 1994. *Peran Ulama dan Santri : Dalam Perjalanan Politik Islam di Indonesia*. Al-Ikhlas : Surabaya.
- Aqib Suminto. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. LP3ES : Jakarta.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit : Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Pustaka Jaya : Jakarta.
- Busthami M. Said. 1992. *Perubahan Dan Pembaharuan Dalam Islam*. Pusat Studi Ilmu Dan Amal.
- Bradjanagara, Sutejo. 1956. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*. LkiS dan Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Choirul Anam. 1985. *Perkembangan dan Pertumbuhan Nahdlatul Ulama*. Jatayu : Surakarta.
- Deliar Noer. 1982. *Gerakan Modern Islam di IndonesiaI 1900-1942*. LP3ES : Jakarta.
- Gibb, H. A. R. 1990. *Aliran Modern Islam*. Rajawali Press : Jakarta.
- Heru Sukadri. 1985. *Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup Dan Pengabdiannya*. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Sejarah Dan Nilai tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumentasi Sejarah Nasional : Jakarta.
- Hasil Diskusi NU Cabang Surabaya. 1980. *Kebangkitan Umat Islam dan Peranan NU di Indonesia*. NU Cabang Surabaya : Surabaya.

- Hoeven, van. 1993. *Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam*. PT. Ikhtiar Baru : Jakarta.
- Kacung Marijan. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Erlangga : Jakarta.
- Kahin, George Mc. Turman. 1992. *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia*. Gramedia : Jakarta.
- Koentjoroningrat. 1993. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia : Jakarta.
- Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen. 1992. *NU Pasca Kahittah Prospek Ukhuwah Dengan Muhammadiyah*. Media Widya Mandala : Yogyakarta.
- Lathiful Khuluq. 2000. *Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy'ari*. LkiS : Yogyakarta.
- Haidar, M. Ali. 1994. *NU dan Islam di Indonesia : Pendekatan Fikih dan Politik*. Gramedia : Jakarta.
- Amin, M. Masykur. 1996. *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*. Al-Amin Press : Yogyakarta.
- Riaz Hassan. 1985. *Islam Dari Konservatif Sampai Fundamentalisme*. CV. Rajawali : Jakarta.
- Roeslan Abdoelgani.. 1963. *Penggunaan Ilmu Sejarah*. Prapanca : Jakarta.
- Salam, Solichin. 1964. *Sejarah Islam di Jawa*. Jakarta : Djajamurni.
- Slamet Yusuf Effendy. 1982. *Dinamika Kaum Santri : Menelusuri Jejak Pergolakan Internal NU*. Rajawali : Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Soebagijo IN.1982. *K. H. Masjkur : Sebuah Biografi*. Gunung Agung : Jakarta.
- Soelarto B. 1996. *Garebeg Di Kesultanan Yogyakarta*. Yogyakarta : Kanisius.
- Suyono, Ariyono. 1985. *Kamus Antropologi*. Akademika Pressindo : Jakarta.
- Thalhas. 2002. *Alam Pikiran K. H. Ahmad dahlan dan K. H. M. Hasyim Asy'ari (Asal-usul Dua Kutub Gerakan Islam di Indonesia)*. Galura Pasaé : Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Saifuddin Zuhri. 1972. *Almaghfurlah K. H. Abdul Wahab Chasbullah : Bapak dan Pendiri NU*. Yamunu : Jakarta.

_____. 1987. *Berangkat Dari Pesantren*. Gunung Agung : Jakarta.

_____. 1981. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. PT. Al Maarif : Bandung.

Sumber Internet

Djarir, Ibnu. *Muhammadiyah dan Dakwah Kultural*. Jumat 1 Maret 2002. Artikel www.suaramerdeka.com.

Ken. *Islam Bersosialisasi Dengan Kebudayaan Lokal Secara Damai*. Jumat 15 Januari 1999. Artikel internet www.kompas.com/kompas-cetak. Jakarta : Kompas.

Kholil, M. Muzakki. *Bedug: Akulturasi Budaya Islam dan Lokal*. 3 April 2005. artikel internet.

Lampiran : 1



Sumber : Taufik Abdullah, dkk, *Agama dan Upacara*, Buku Antar Bangsa untuk
Grolier International, Inc : Jakarta, 2002, hal. 24.

Lampiran : 2**LAMBANG ORGANISASI NU**

Lambang NU ciptaan K. H. Ridwan, memiliki arti yang sangat mendalam dan penuh nuansa filsafat. Lambang bola dunia mengingatkan bahwa manusia berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Tampar yang melingkar menandakan gelora Ukhuwah Islamiyah. Sedangkan untaian tampar yang bertuliskan Arab berarti asmaul husna. Sebuah bintang memandakan kebesaran dan keagungan Nabi Muhammad SAW, serta dua buah bintang di samping kiri dan dua bintang di samping kanan berarti kesetiaan sahabat Nabi yang empat yakni Abu Bakar, Umar, Ustman dan Ali. Empat bintang di bawahnya melambangkan empat Mazhab : Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Keseluruhan bintang yang menghiasi bola dunia itu berjumlah 9 buah bintang, melambangkan wali songo atau wali sembilan yang merupakan pionir penyebut Islam di tanah air.

Sumber : Khoirul Fathoni dan Muhammad Zen, *NU Pasca Khittah Prospek Ukhuwah dengan Muhammadiyah*, Media Widya Mandala : Yogyakarta, 1992, hal. 26-27.

Lampiran : 3**PARA PENDIRI NAHDLATUL ULAMA**

Susunan Pengurus Nahdlatul Ulama yang disusun pada bulan Januari 1926 di Surabaya, terdiri dari :

A. SYURIYAH

Rois Akbar	: K. H. Hasyim Asy'ari
Wakil Rois	: K. H. M. Dachlan
Katib Awal (Sekretaris I)	: K. H. A. Wahab Hasbullah
Katib Tsani (Sekretaris II)	: K. H. Abdul Halim
A'wan (anggota)	: K. H. Mas Alwi Abdul Azis
	K. H. Ridwan Abdullah
	K. H. Said
	K. H. Bisri Sjamsuri
	K. H. Abdullah Ubaid
	K. H. Nahrawi Thahir
	K. H. Amin Abdus Syukur
	K. H. Masjhuri
	K. H. Nahrawi
	K. H. Amin (Praban)
	K. H. Hasbullah
	K. H. Syarif
	K. H. Yasin
	K. H. Nawawi Amin
	K. H. Dahlan Abdul Kahar
	K. H. Abdul Majid

Mutasyar (Penasehat) : K. H. Rd. Asnawi
K. H. Ridwan Mujahid
K. H. Mas Nawawi
K. H. Doro Munthaha
K. H. Rd. Hanbali
Syekh Ahmad Ghana'im

B. TANFIDIYAH

Ketua : H. Hasan Gipo
Penulis : M. Sodiq Sugeng Judowirjo
Bendahara : M. Mohammad Burhan
Pembantu : H. Saleh Sjamil
H. Ihsan
H. Ja'far Alwan
H. Usman
H. Achzab
H. Nawawi
H. Dahlan
H. Muhammad Mangun
H. Abdul Hakim
H. K. Zein
H. Sidiq
H. Ghazali
Penasehat : Abdul Kahar
H. Ibrahim

Sumber : Martin van Bruinessen, *NU Tradisi Relasi-relasi Kuasa Pencarian Wacana Baru*, LkiS dan Pustaka Pelajar : Yogyakarta, hal. 301-302.

Jumat, 15 Januari 1999

Islam Bersosialisasi dengan Budaya Lokal Secara Damai

Jakarta, Kompas

Masuk dan tersosialisasinya Islam di Nusantara berlangsung dengan cara-cara damai. Ketika itu para penyebar Islam bahkan memilih berbagai anasir lokal sebagai media komunikasi dakwahnya. Dengan toleransi semacam itulah kemudian seni budaya bernapaskan keislaman bisa menjadi basis kebudayaan nasional.

Demikian dikemukakan pakar arkeologi Islam Prof Dr Hasan Muarif Ambary dalam perbincangan dengan *Kompas* seputar dinamika budaya Nusantara sejak masuknya pengaruh Islam di kawasan ini. Sebagai arkeolog pandangan Hasan Muarif Ambary tentunya didukung bukti-bukti arkeologis (seperti epigrafi pada makam kuno), sehingga terlihat dalam kajiannya bahwa proses akulturasi Islam dengan budaya lokal tidaklah sekadar bersifat "pendatang" dan "penerima".

"Dilihat dari segi *tamadun* (peradaban -Red) Islam, Islam di Indonesia telah memberikan sumbangsih dalam memperkaya anasir-anasir budaya asli Indonesia," kata Hasan Muarif Ambary yang juga Kepala Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas) ini.

Berbagai alur

Menurut Ambary, perkembangan budaya di Nusantara mengalami kemajuan besar setelah bersentuhan dan berdifusi dengan tiga tradisi besar. Ketiga tradisi yang berpengaruh besar dalam memperkaya budaya Nusantara itu adalah anasir-budaya Hindu-Buddha, Islam, serta Barat (Eropa) dan Cina.

Khusus pengaruh Islam beserta muatan anasir-anasir budaya yang menyertainya, demikian Ambary, sejak awal kehadirannya ia telah bertransformasi melalui berbagai alur, berikut bentang waktu serta rangkaian sosialisasinya. Fenomena tersebut dapat dilihat dari sebaran bukti-bukti tertua kehadiran orang atau komunitas Islam di Nusantara. Bukti-bukti itu terpahat dalam berbagai peninggalan sejarah, seperti makam-makam kuno dan benda arkeologis lainnya.

Berdasarkan bukti arkeologis tadi, proses sosialisasi Islam di Nusantara terjadi melalui suatu rangkaian peristiwa yang tidak sama antara tempat yang satu dengan tempat lainnya. Kendati begitu, garis besar proses tersebut dapat digambarkan secara kronologis, yakni sejak kontak antara komunitas Nusantara dengan para pedagang atau musafir nonmuslim, kemudian mereka berhubungan dengan pedagang atau musafir muslim, lalu tumbuhnya komunitas muslim di Nusantara.

Dalam perkembangan berikutnya, komunitas-komunitas itu tumbuh dan berkembang menjadi kekuasaan politik berbentuk daulah atau kesultanan Islam. Pada puncak perkembangannya, kemudian masuk dan berkuasalah kekuatan ekonomi-militer bangsa Eropa, sehingga kharisma dan kekuasaan kesultanan Islam ikut surut dari panggung sejarah.

"Local genius"

Meski secara politis Islam surut dan digantikan oleh kekuasaan kolonial, namun dalam proses akulturasi budaya Islam telah tersosialisasi dan membawa banyak perubahan di Nusantara. Dengan toleransinya-di luar masalah aqidah dan *ubudiyah* (ibadah)-yang tinggi, para penyebar Islam bahkan acapkali menggunakan anasir budaya lokal sebagai media komunikasi dakwah, seperti lewat wayang, gamelan, tembang dan seni ukir.

Rangkaian proses akulturasi itu berlangsung damai. Tidak aneh bila kemudian tiga jenis seni Islam utama dari dunia Islam (mozaik, kaligrafi, dan araberque), sesampai di Nusantara tampil sebagai unsur seni baru. Bahkan hasil persinggungannya dengan budaya asli telah melahirkan apa yang dikenal dengan *local genius* sebagai basis utama kebudayaan nasional

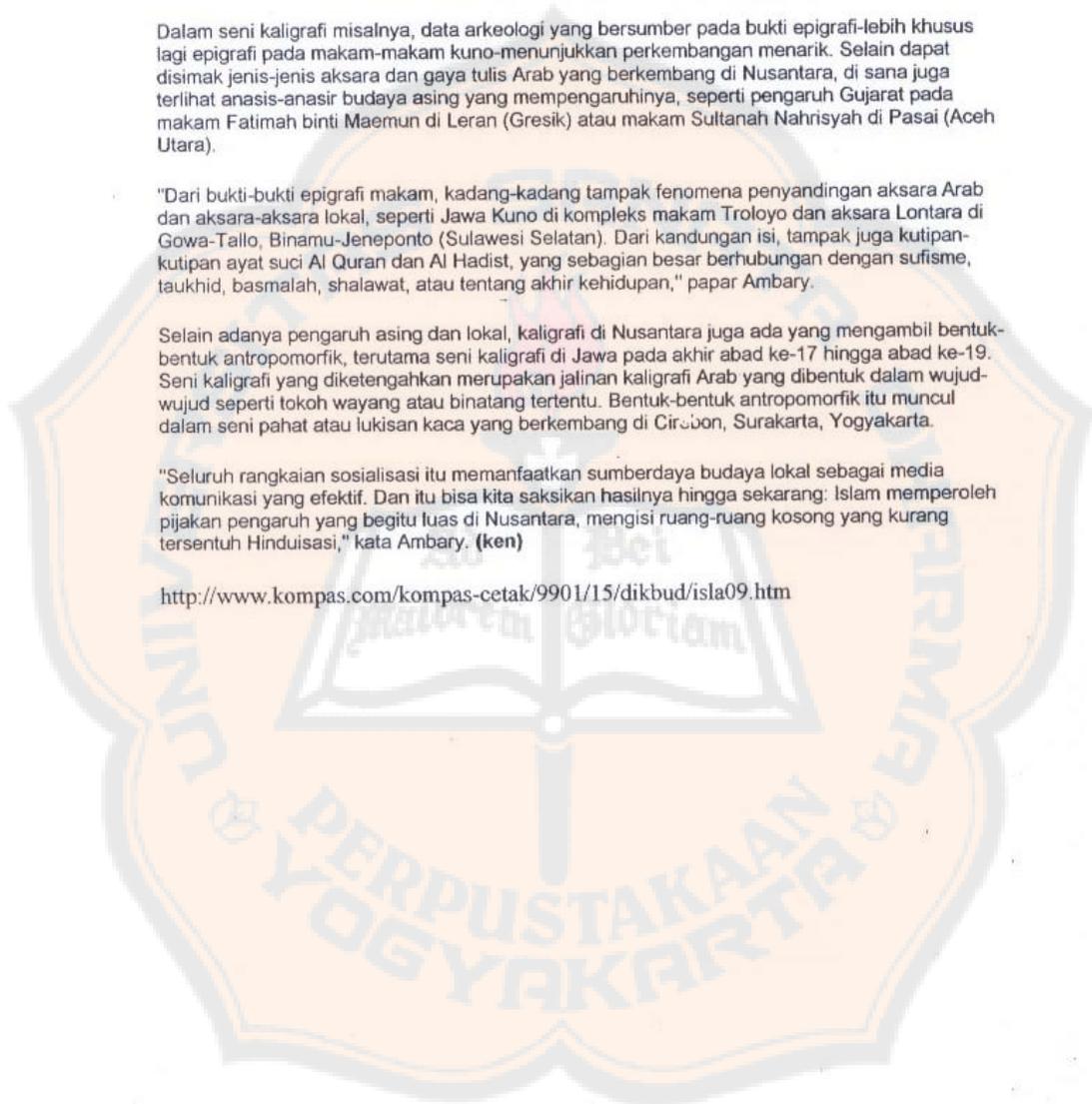
Dalam seni kaligrafi misalnya, data arkeologi yang bersumber pada bukti epigrafi-lebih khusus lagi epigrafi pada makam-makam kuno-menunjukkan perkembangan menarik. Selain dapat disimak jenis-jenis aksara dan gaya tulis Arab yang berkembang di Nusantara, di sana juga terlihat anasis-anasir budaya asing yang mempengaruhinya, seperti pengaruh Gujarat pada makam Fatimah binti Maemun di Leran (Gresik) atau makam Sultanah Nahrisyah di Pasai (Aceh Utara).

"Dari bukti-bukti epigrafi makam, kadang-kadang tampak fenomena penyandingan aksara Arab dan aksara-aksara lokal, seperti Jawa Kuno di kompleks makam Troloyo dan aksara Lontara di Gowa-Tallo, Binamu-Jeneponto (Sulawesi Selatan). Dari kandungan isi, tampak juga kutipan-kutipan ayat suci Al Quran dan Al Hadist, yang sebagian besar berhubungan dengan sufisme, taukhid, basmalah, shalawat, atau tentang akhir kehidupan," papar Ambary.

Selain adanya pengaruh asing dan lokal, kaligrafi di Nusantara juga ada yang mengambil bentuk-bentuk antropomorfik, terutama seni kaligrafi di Jawa pada akhir abad ke-17 hingga abad ke-19. Seni kaligrafi yang diketengahkan merupakan jalinan kaligrafi Arab yang dibentuk dalam wujud-wujud seperti tokoh wayang atau binatang tertentu. Bentuk-bentuk antropomorfik itu muncul dalam seni pahat atau lukisan kaca yang berkembang di Cirebon, Surakarta, Yogyakarta.

"Seluruh rangkaian sosialisasi itu memanfaatkan sumberdaya budaya lokal sebagai media komunikasi yang efektif. Dan itu bisa kita saksikan hasilnya hingga sekarang: Islam memperoleh pijakan pengaruh yang begitu luas di Nusantara, mengisi ruang-ruang kosong yang kurang tersentuh Hinduisasi," kata Ambary. (ken)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/9901/15/dikbud/isla09.htm>



Bedug: Akulturasi Budaya Islam dan Lokal

Dipublikasi pada Sunday, 03 April 2005 oleh admin

M. Muzakki Kholil

Pada tahun ke I atau II Hijriah Allah Swt mensyariatkan adzan (*Hasyiyatu al Syarqowi*, vol. I) untuk memberitahukan masuknya waktu shalat. Sebelum itu, para shahabat banyak yang usul. Ada yang usul memakai lonceng, yang lain berinisiatif memakai terompet, dan bahkan ada yang ingin memakai api. Nabi tidak suka dengan semua itu karena perbuatan itu adalah perbuatan yang biasa dilakukan orang Nasrani dan Yahudi.

Dalam konteks Indonesia, ada hal yang unik tentang panggilan memenuhi kewajiban shalat. Bukan hanya adzan yang ada, namun bedug juga di tabuh bertalu-talu sebelum adzan berkumandang.

Entah, dari mana sebetulnya bedug datang dan masuk di tengah-tengah komunitas muslim Indonesia dan menjadi salah satu simbol (*syiar*) agama Islam. Gunawan Muhammad dalam salah satu Catatan Pinggir-nya menyatakan bahwa bedug berasal dari negeri Cina. Informasi ini ia dapat dari seorang guru besar etnomusikologi Amerika, Charles Capwell. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dizaman Hindu dan Budha instrumen itu tidak pernah disebut. Mungkin baru ketika Zheng He dan pasukannya datang sebagai utusan maharaja Ming ke Jawa, dialah yang memperkenalkan bedug ketika ia memberi tanda panggilan untuk berbaris pada tentara.

Terlepas dari valid dan tidaknya sumber ini, pada intinya bedug adalah budaya lokal yang telah menjadi budaya Islam. Di situlah terjadi akulturasi timbal balik antara Islam dan budaya lokal. Adanya kemungkinan akulturasi timbal balik ini digambarkan dalam salah satu kaidah *kulliyah fiqhiyah*; kebiasaan bisa menjadi patokan hukum (*al 'adah muhakkamah*), atau perkara yang ditetapkan oleh 'uruf (adat/tradisi) sama seperti yang ditetapkan oleh dalil syara (*al tsabit bi al urfi ka al tsabit bi dalilin syar'iy*).

Jadi kehadiran Islam selalu merekonstruksi tatanan masyarakat atau transformasi sosial dari "masa jahiliyah" menuju ke masa yang lebih baik. Namun bukan berarti Islam bersifat disruptif atau menghapus semua kebiasaan tradisi masyarakat dengan fundamental. Islam tetap melegalisir kebiasaan suatu masyarakat asalkan tidak kontradiksi dengan hukum-hukum syariat.

Tidak terkecuali bedug, setidaknya menurut pengamatan penulis ada dua faktor kenapa bedug ditoleransi oleh para ulama terdahulu menjadi salah satu budaya dan simbol Islam (di Indonesia). *Pertama*, bedug telah menjadi kebudayaan Hindu yang mengakar pada masyarakat sebelum kedatangan Islam di Indonesia. Seandainya bedug dicabut dengan serta-merta dari masyarakat, maka mereka akan sulit menerima Islam, karena Islam akan terasa asing di tengah-tengah mereka. Hal ini jugalah yang pernah dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ketika dia berhasil menaklukkan Negara Persia dan menjadikan istana raja Kisra sebagai tempat ibadah, namun Sa'ad tidak memusnahkan patung-patung berhala yang ada di dalamnya (*Durus Tarikh al Islami*, al-Khayyath, vol. II).

Kedua, bahwa bedug sebagaimana adzan hanyalah sebagai *washilah* (mediator) untuk melaksanakan ibadah Shalat. Artinya menabuh bedug bukan bagian dari ibadah *mahdhah*

(*murni*) yang merupakan salah satu syarat sahnya '*uruf* menjadi patokan hukum syariat (*Ushul fiqh*, Metodologi Hukum Islam).

Namun bukan berarti semua tradisi masyarakat dapat dibenarkan oleh agama. Sikap apriori terhadap tradisi dengan menerima dan membenarkannya tanpa sikap kritis dan selektif akan bisa menyebabkan hilangnya nilai-nilai *samawi* dalam agama. Karenanya, setiap budaya yang masuk ke dalam ranah Islam harus dilakukan proses penelitian agar bisa diterima menjadi bagian dari hukum syariah.

KH. Ahmad Shiddiq (Rais Aam PBNU, 1984) mengemukakan bahwa Islam mempunyai tiga prinsip yang harus dipegang untuk menyikapi tradisi masa lalu. *Pertama*, akomodatif. Artinya, Islam bisa mengakomodir budaya lokal dengan tetap mengedepankan syara sebagai barometer.

Kedua, selektif. Artinya tradisi atau budaya tersebut diteliti terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan syariat, dan ketiga proporsional. Bahwa pelaksanaan suatu kegiatan yang terkait dengan budaya lokal itu sebanding dengan pengakuan syara, tanpa dilebih-lebihkan (*mubalaghah*) atau dikurangi.

Nah, memang benar pada konteks masa lalu bedug perlu ditoleransi untuk menjadi bagian dari Islam. Namun, pada saat ini bedug sering menjadi masalah, ketika bedug bukan hanya digunakan untuk memberitahukan masuknya waktu shalat, bahkan ia merambah kepada hal-hal negatif. Di daerah Banten ada seni Tari Bedug yang ditabuh oleh gadis-gadis di depan Masjid Agung Banten (*lihat*: Ensiklopedi Nasional, entri *Bedug*), atau kita lihat konser bedug yang sering diadakan pada bulan ramadhan, atau pada bulan yang sama sering kita mendengar bedug menjadi ajang untuk "unjuk kegaduhan dan keramaian."

Nah, di sinilah kita perlu lebih menelaah kembali agar bedug diletakkan secara proporsional sebagai sebuah budaya lokal. Konon, Kiai Hasyim Asyari pun pernah berbeda pendapat dengan Kiai Faqih Maskumambang tentang masalah bedug. Menurut Kiai Hasyim bedug adalah bid'ah. Sedangkan Kiai Faqih berpendapat bukan bid'ah.

hal ini tidak dimaksudkan sebagai bentuk provokasi untuk melakukan disrupsi budaya bedug yang telah menjadi bagian dari Islam. Namun barang kali ini bisa menjadi *ibrah* bahwa kita harus lebih bersikap moderat (*tawasshut*) dalam menyikapi sebuah tradisi, bukan dengan sikap aprioristik dan disruptif.

Akhiran, barang kali patut kita renungi dalam-dalam kembali makalah ulama, *al muhafadzah al qadimis shaleh wal akhdzu bil jadidil ashlah*; memelihara tradisi lama yang baik dan melakukan transformasi tradisi baru yang lebih baik. *Allahu a'lam*.

SUARA MERDEKA

INDEPENDEN - OBJEKTIF - TANPA PRASANGKA

Jumat, 1 Maret 2002

Karangan Khas

Muhammadiyah dan Dakwah Kultural

Oleh: Ibnu Djarir

BEBERAPA waktu lalu, Wakil Ketua PP Muhammadiyah Prof Dr H Dien Syamsuddin menyatakan, implementasi dakwah kultural tentu akan bersinggungan dengan unsur budaya lokal.

Tampaknya, hal itu berkaitan dengan pernyataan Dr Kuntowijoyo sebelumnya yang mengatakan, Muhammadiyah sering disebut sebagai organisasi Islam bercorak "puritan" yang berakibat keringnya kegiatan dalam bidang seni dan budaya. Yang dimaksud budaya di sini tentu budaya dalam arti sempit. Sebab, budaya dalam arti luas meliputi segenap gagasan dan karya manusia beserta hasil-hasilnya.

Selama ini Muhammadiyah telah melaksanakan dakwah kultural dalam arti luas, meliputi pendidikan, sosial, ekonomi, politik, kesehatan, dan lain-lain.

Ditinjau dari perspektif ilmu dakwah, kegiatan penyiaran Islam atau penanaman nilai-nilai ajaran Islam dalam masyarakat semestinya dilakukan dalam seluruh bidang kehidupan, seperti bidang sosial, ekonomi, politik, pendidikan, budaya (kultur), dan lain-lain. Jadi, dakwah kultural bukanlah suatu ide baru.

Jika kemudian dibahas dalam sidang tanwir, dimaksudkan hanyalah untuk lebih menggalakkan pelaksanaannya. Guna mencapai keberhasilan dakwah, para dai harus memanfaatkan berbagai macam media, seperti dakwah lisan, dakwah *kitabiah* (tulisan), dan dakwah *bil hal* (tindakan).

Beberapa metode juga perlu digunakan, misalnya metode informatif, edukatif, persuasif, dialogis, dll. Dari uraian tersebut dapat dimengerti, teori dakwah banyak mengalami perkembangan. Hal itu dipahami oleh

sebagian dai dan lembaga-lembaga dakwah.

Kalau sampai saat ini dakwah kultural di kalangan Muhammadiyah dinilai kurang maju, itu karena terdapat kendala-kendala teologis di lapangan.

Berkaitan dengan hal itu, penulis ingin menambah informasi sehubungan dengan tulisan Absori yang berjudul "Muhammadiyah dan Persoalan Budaya Lokal" (SM, 26/1).

Dakwah Para Wali

Banyaknya orang yang memeluk Islam di Tanah Air ini, tidak terlepas dari jasa para dai yang telah mendahului kita. Terutama para wali yang kemudian terkenal dengan sebutan *Wali Sanga*. Mereka terkenal sebagai para dai yang bijaksana dalam berdakwah, karena mengenal betul budaya dan karakter bangsa.

Dakwah para wali itu informatif, edukatif, persuasif, dan memanfaatkan jalur seni dan budaya. Mereka tidak serta merta menghapus unsur-unsur adat dan seni budaya lokal yang bertentangan dengan Islam, tetapi sampai batas tertentu mereka mengakomodasikannya dan kemudian memasukkan unsur-unsur Islam ke dalamnya.

Beberapa contoh, misalnya adat yang berupa sedekah laut dan sedekah bumi. Sebelum agama Islam masuk ke Nusantara, sebagian penduduk telah memeluk agama Hindu dan Buddha. Mereka telah mengamalkan ritus-ritus kedua agama tersebut, selain paham-paham dinamisme, animisme, dll yang masih memengaruhi kepercayaan penduduk.

Adat istiadat penduduk pun terpengaruh oleh agama dan paham tersebut.

Sedekah laut pada mulanya adalah upacara ritual memuja dewa laut yang dipercayai memberi rezeki. Mereka mempersembahkan sesaji yang dilengkapi dengan makanan dan minum, disertai mantra-mantra.

Demikian pula sedekah bumi, pada mulanya itu sebuah upacara ritual memuja dewa bumi (Pertiwi, Dewi Sri) yang dipercayai memberi rezeki berupa hasil pertanian, juga untuk menghormati roh-roh nenek moyang dan *danyang-pekayangan* yang memelihara (*baureksa*) desa.

Oleh para dai (dulu) upacara-upacara itu dimasuki unsur Islam, antara lain diberi istilah sedekah. *slametan*. diberi doa-doa secara Islam. Ada

substansi Islam yang dimasukkan di dalamnya, seperti memohonkan ampun (istighfar) kepada Tuhan atas kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa para leluhur.

Contoh lain, wayang purwa yang ceritanya bersumber dari kitab-kitab Hindu, seperti ceritera Mahabharata dan Ramayana. Oleh para wali, bentuk wayang itu dimodifikasi. Bentuknya tidak persis manusia, tetapi diubah seperti bentuk yang dapat kita saksikan sekarang. Namun, cerita tentang dewa-dewa masih lekat di dalamnya.

Masih sangat banyak contoh lain tentang adat istiadat dan seni budaya yang telah diakomodasi, dimodifikasi, dan diinfiltrasi oleh para wali dan dai masa lalu, agar masyarakat lama masih merasa memilikinya, dan masyarakat baru yang telah memeluk agama Islam diharapkan dapat menerimanya. Namun, dengan kebijaksanaan akomodatif seperti itu tanpa modifikasi atau substitusi-unsur-unsur sinkretis tidak dapat dielakkan.

Misi Tajdid

Muhammadiyah merupakan organisasi keagamaan Islam yang dikenal dengan misi dakwah dan tajdid yang kental. Dalam setiap programnya selalu diwarnai dengan nilai-nilai dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Dakwah melalui bidang pendidikan, sosial, ekonomi, politik, dan budaya telah dijalankan. Hanya, dakwah melalui bidang budaya terasa kurang menonjol.

Dakwah yang dilakukan tidak bisa dilepaskan dari misi tajdid, yakni membimbing umat untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan keaslian dan kemurniannya (reformasi dan purifikasi) sebagaimana digariskan dalam Alquran dan sunah Rasul.

Selain itu juga membimbing umat untuk memahami agama dengan menggunakan akal pikiran (rasional) sesuai dengan jiwa ajaran Islam dan membuka diri untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (modernisasi) guna meningkatkan kualitas kehidupannya.

Paradigma pemahaman agama menurut Muhammadiyah itu tentu harus dipahami oleh para pimpinan, anggota, dan warganya. Dengan begitu, ormas tersebut tetap berja'an di atas khitahnya. Jika tidak, Muhammadiyah hanya tinggal nama, sedangkan pola berpikir dan bertindak sudah bergeser dari tujuan aslinya ketika ormas itu didirikan pada 1912.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tidak begitu mudah berdakwah melalui jalur seni budaya jika harus memanfaatkan unsur-unsur seni budaya lokal yang telah mapan. Sebab, tidak sedikit adat istiadat dan seni budaya lokal yang bernapaskan ajaran agama dan paham non-Islam.

Sesuai dengan misi tajdid, Muhammadiyah tentu harus berupaya menjauhi sinkretisme dengan mengadakan pembaharuan dalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam yang dilakukan oleh para pemeluknya.

Sejenak kita menoleh ke belakang untuk menyimak sejarah masuknya Islam ke Jawa (Indonesia). Prof Dr HA Mukti Ali menyebutkan, Islam masuk ke Indonesia mula-mula dibawa oleh ulama sufi dari Arab dan India. Menurutnya, ada elemen-elemen Hindu yang terkemas dalam ajaran Islam yang disiarkan, tetapi hal itu membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat Jawa.

Konon, ketika Wali Sanga bersidang membicarakan perilaku Sunan Kalijaga yang selalu berpakaian ala Jawa, yakni tidak berjubah dan bersorban seperti kebiasaan wali-wali yang lain, Sunan Kalijaga menjawab, "Justru dengan pakaian seperti ini saya mudah memasuki dari satu desa ke desa yang lain untuk menyiarkan Islam. Toh suatu ketika nanti, pasti ada generasi yang sanggup melakukan pembaharuan ajaran Islam".

Dari percakapan tersebut, meski pakaian ala Jawa tidak termasuk sinkretisme teologis, tetapi tersirat suatu pengakuan dari Sunan Kalijaga perlunya ada usaha-usaha pembaruan ajaran Islam di kemudian hari. Hal itu mengingatkan ajaran Islam yang disiarkan oleh sang wali tersebut masih bercampur dengan unsur-unsur non-Islam.

Kita menyadari akulturasi budaya antara satu bangsa dan bangsa lain yang positif tidak ada masalah, dan kenyataannya telah berjalan berabad-abad. Namun, kalau menyangkut aspek teologis tentu kita harus bersikap kritis dan selektif.

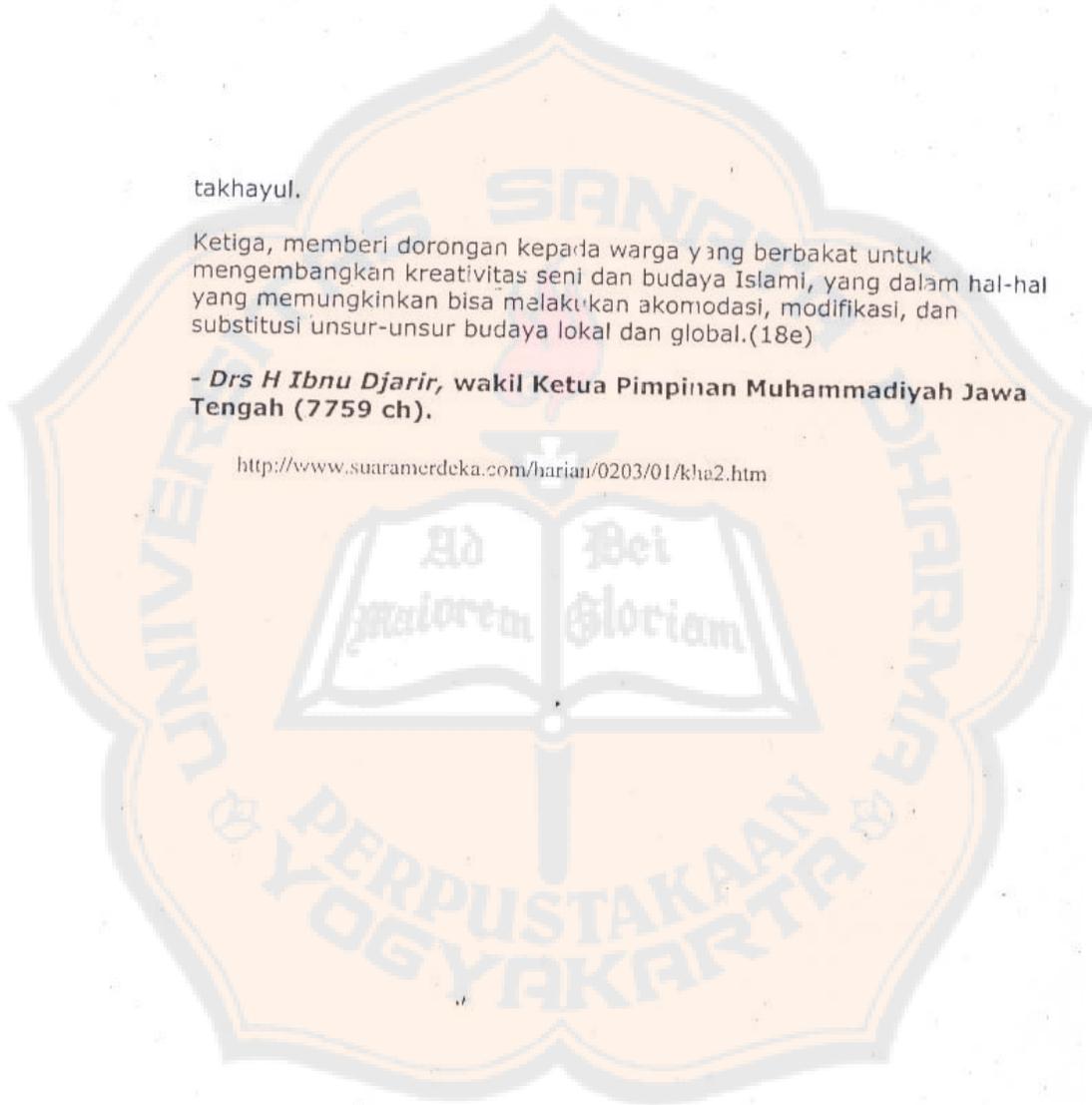
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dakwah kultural, ada tiga hal yang perlu disarankan. Pertama, Majelis Tablig mengintensifkan sosialisasi Intern di kalangan warga Muhammadiyah tentang pentingnya dakwah kultural. Kedua, Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam memberi penjelasan seluas-luasnya kepada warganya mengenai pola pemahaman agama menurut Muhammadiyah agar mereka tidak memiliki pencertian yang keliru tentang *bid'ah*, *khurafat*, dan

takhayul.

Ketiga, memberi dorongan kepada warga yang berbakat untuk mengembangkan kreativitas seni dan budaya Islami, yang dalam hal-hal yang memungkinkan bisa melakukan akomodasi, modifikasi, dan substitusi unsur-unsur budaya lokal dan global.(18e)

- **Drs H Ibnu Djarir**, wakil Ketua Pimpinan Muhammadiyah Jawa Tengah (7759 ch).

<http://www.suaramerdeka.com/harian/0203/01/kha2.htm>



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

SILABUS BERBASIS KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

Mata Pelajaran : Sejarah
 Satuan Pendidikan : SMA
 Kelas / Semester : XI / Semester I
 Tahun pelajaran : 2006 / 2007
 Standar Kompetensi : Kemampuan menganalisis muncul dan berkembangnya pergerakan Nasional Indonesia.

Kompetensi Dasar	Indikator	Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Penilaian			Alokasi Waktu	Sumber bahan
				Jenis Tagihan	Bentuk Tagihan	Contoh tagihan		
Kemampuan memahami Peranan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsi biografi Hasyim Asy'ari. 	A. Biografi Hasyim Asy'ari. 1. Latar belakang keluarga. 2. Latar belakang pendidikan. 3. Riwayat Hasyim Asy'ari.	Siswa dapat mendeskripsikan dalam diskusi biografi Hasyim Asy'ari.	Tes / pretest	Uraian/ esai	1. Deskripsikan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan riwayat Hasyim Asy'ari !	1 x 45 menit	- Heru Sukadri, 1985, <i>Kiai Haji Hasyim Asy'ari Riwayat Hidup dan Pengabdiannya</i> , Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan latar belakang dan berdirinya NU. 	B. Latar belakang dan berdirinya NU. 1. Kondisi Islam sebelum tahun 1926. 2. Pertentangan	Siswa dapat mendeskripsikan dalam diskusi latar belakang dan berdirinya NU.			2. Deskripsikan latar belakang dan berdirinya NU !		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947. 	<p>antara kaum tradisional dan modernis.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Proses berdirinya NU. 4. Perkembangan organisasi NU pada masa Hasyim Asy'ari. <p>C. Sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masa kolonial Belanda (1926-1942). 2. Masa pendudukan Jepang (1942-1945). 3. Setelah kemerdekaan Indonesia (1945-1947). 	<p>Siswa dapat mendeskripsikan dalam diskusi sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947.</p>		<ol style="list-style-type: none"> 3. Deskripsikan sumbangan Hasyim Asy'ari dalam organisasi NU tahun 1926-1947. 		<p>Direktorat Sejarah Dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi Dan Dokumen Sejarah Nasional : Jakarta.</p> <p>- Lathiful Khuluq, 2000, <i>Fajar Kebangunan Ulama Biografi K. H. Hasyim Asy'ari</i>, LkiS : Yogyakarta.</p>
--	---	---	--	--	---	--	--

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

								<p><i>Nahdlatul Ulama, LTN dan Pustaka Pelajar : Yogyakarta.</i></p> <ul style="list-style-type: none">- M. Ali Haidar, 1994, <i>Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia; Pendekatan Fikih dalam Politik,</i> Gramedia : Jakarta.- Choirul Annam, 1985, <i>Perkembangan dan Pertumbuhan</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

									<i>Nahdlatul Ulama, Jatayu : Surakarta</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mengetahui,
Kepala Sekolah

Yogyakarta, 17 Maret 2007
Guru Mata Pelajaran

Nama
Nip

Paulina Nola

